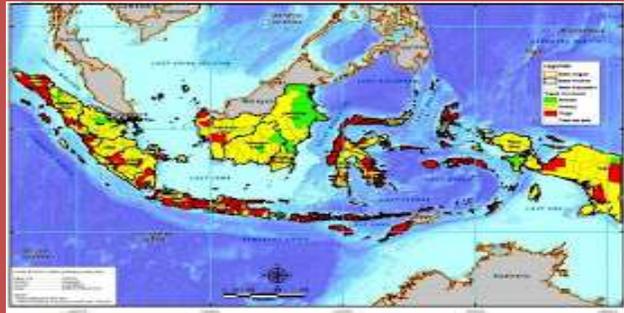


Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran-On line

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

E-Learning

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Penulisan modul Pendidikan Kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa akan literasi yang berhubungan langsung dengan bahan pembelajaran. Dengan tersedianya bahan belajar berupa modul, diharapkan mahasiswa akan lebih mudah mendapatkan pengetahuan dan memahaminya.

Modul ini terdiri dari tujuh bagian, meliputi : (1) Apa Pendidikan Kewarganegaraan dan Mengapa Perlu Bagi Setiap Warganegara; (2) Hakikat, Urgensi, Historis, Politik dan Sosiologis, Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Perkembangan dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan; (4) Identitas Nasional; (5) Integrasi Nasional; (6) Wawasan Nusantara; dan (7) Wilayah Geografi-Teritorial, Geopolitik dan Geostراتيجية Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada prinsipnya pengguna modul ini diutamakan bagi mahasiswa program reguler (tatap muka) dan program paralel (*online*) dalam lingkungan Universitas Esa Unggul. Namun tidak menutup kemungkinan, siapapun yang dapat mengakses untuk memfaatkannya.

Jakarta, Januari 2018

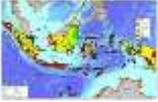
Penulis

DAFRTAR ISI

Katar Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Modul 1 Apa Pendidikan Kewarganegaraan dan Mengapa Perlu Bagi Setiap Warganegara	1-14
Modul 2 Hakikat, Urgensi, Historis, Politik dan Sosiologis, Pendidikan Kewarganegaraan	15-54
Modul 3 Perkembangan dan Kopmpetensi Pendidikan Kewarganegaraan	55-66
Modul 4 Identitas Nasional	67-84
Modul 5 Integrasi Nasional	85-99
Modul 6 Wawasan Nusantara	100-111
Modul 7 Wilayah Geografi-Teritorial, Geopolitik dan Geostrategi Negara Kesatuan Republik Indonesia	112-131

MODUL 1

APA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN MENGAPA PERLU BAGI SETIAP WARGA NEGARA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan dan menengapa perlugapa perlu bagi setiap warga negara. sehingga memiliki sikap kepribadian sadar berbangsa, cinta tanah air dan bertekat untuk melaksanakan bela negara secara sepanjang hayat.

Pendahuluan

Untuk menjelaskan apa pengertian pendidikan kewarganegaraan dan mengapa perlu bagi setiap warga negara, maka langkah pertama perlu difahami dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan dan apa pengertian kewarganegaraan, kedua substansi itu penting difahami lebih awal. Begitu pula, jika ingin mengatakan bahwa mengapa pendidikan kewarganegaran diperlukan bagi setiap warga negara dan menjustifikasi wajib dipelajari, maka terlebih dahulu harus mengetahui, memahami secara utuh tentang pengertian dan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian akan lebih mudah memahami dan memantapkan kepribadian, hingga menjadi insan yang cerdas intelegensi, bermoral tinggi, peka terhadap lingkungan dan konsisten dalam membela negara Indonesia.

Baiklah apa sesungguhnya hakikat dan pengertian pendidikan kewarganegaraan? Sudah tidak diragukan lagi bahwa setiap insan dapat menjadi pintar, beradab dan maju perlu belajar terus menerus sepanjang hayat. Belajar bisa ditempuh di sekolah formal, yaitu institusi pendidikan formal yang berjenjang dari SD, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat hingga pendidikan tinggi seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan sebagainya. Bisa juga di luar sekolah, yaitu di institusi keluarga berupa pendidikan informal yang sudah berlangsung sejak anak di dalam kandungan ibunya, lahir hingga menjadi orang dewasa. Dan belajar bisa pula melalui institusi pendidikan luar sekolah yang lazim disebut pendidikan non formal, yang tidak berjenjang secara formal. Seperti

kursus-kurus, bimbingan belajar, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan institusi pemerintah maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Ristek Dikti. 2016 : 6) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara. Menurut Undang-Undang Nomor RI Nomor 12 tahun 2006, pasal 1 ayat (2) pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Menurut Nu'man Somatri (Ristek Dikti. 2016 : 7) Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya sudah dipelajari sejak dini, yaitu di ketiga institusi pendidikan tersebut. Disadari atau tidak disadari bahwa setiap manusia Indonesia secara terus menerus belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Hanya intensitas dan kualitas hasil belajar relatif berbeda-beda dan sering berubah-ubah penerapan di masyarakat sesuai dengan tingkat pemahaman. Sehingga tidak dapat diukur secara mutlak bahwa setiap orang yang sudah belajar, termasuk mahasiswa yang telah selesai mengikuti pendidikan kewarganegaraan dapat dipastikan menjadi lebih baik dan taat azas, belum tentu! Hal ini, sangat tergantung pada karakter dan kepribadian, situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhinya dan biasanya selalu dihadapkan pada dua pilihan melakukan atau melanggar. Pada hakikatnya semua sudah dipelajari, artinya dapat dihipotesis sudah mengerti dan memahami, tinggal komitmen mereka

apakah mau berbuat baik secara konsisten ? atau malah sebaliknya, mengabaikan dan mengingkari. Memang perlu kesadaran yang tinggi untuk dapat mengimplementasikan hasil belajar yang diharapkan, dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Apa Arti dan Makna Pendidikan Kewarganegaraan

Pertama kali, pendidikan kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan kewiraan. Suatu pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran bela negara yang diberikan secara teoritis, dengan maksud agar mahasiswa memiliki kemampuan bela negara secara non fisik, menjadi cendekia yang nasionalis. Seiring dengan tuntutan perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional setelah reformasi, maka mata kuliah pendidikan kewiraan bermetamorfosis menjadi pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Nugroho. dkk (2015 : 2) pendidikan kewarganegaraan didesain dalam upaya mengembangkan wawasan warga negara sebagai upaya penanaman, penumbuhan dan kesadaran bela negara di tengah-tengah tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Saat ini, eksistensi suatu negara tidak hanya bergantung kepada letak geografi saja, melainkan terletak kepada sejauh mana kualitas sumber daya yang dimilikinya. Pendidikan kewarganegaraan hendaknya berkontribusi produktif pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, terlebih dalam menghadapi tatanan dunia baru, yaitu revolusi industri 4.0 dewasa yang terus berlangsung hingga akhir zaman.

Memaknai bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya penanaman, penumbuhan dan kesadaran bela negara, maka dapat dikatakan bahwa secara pedagogis dan andragogis pendidikan kewarganegaraan mentransformasi pengetahuan, sikap dan keterampilan (*soft skill*) bela negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945, pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Hal ini makin menjadi penting, sebab esensi pendidikan kewarganegaraan secara filosofi adalah untuk menanamkan keyakinan dasar dan fundamental kepada warga negara Indonesia

agar mampu menggerakkan daya nalar dan rasionalitas membela negara. Oleh sebab itu, penanaman pengetahuan, sikap-kepribadian dan keterampilan bela negara harus dilakukan sejak usia dini, agar kadar cinta kepada tanah air dan nasionalisme makin kuat dan membumi.

Ada beberapa terminologi pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari berbagai aspek dan kelimuan. Arwiyah dan Runik (2014 : 2-5) menjelaskan beberapa istilah yang intinya adalah pendidikan kewarganegaraan, sebagai berikut :

1. **Civic**, diterjemahkan menjadi kewarganegaraan berasal dari bahasa Yunani yaitu *civicus* yang berarti penduduk sipil yang mempraktekkan demokrasi langsung dalam negara kota atau *polis*. Tradisi Yunani telah memberikan inspirasi konseptual tentang kebaikan umum, kesejahteraan umum dan kebijakan atau keutamaan sipil (*civil virtue*) yang lahir kembali dalam rangka melawan otokratik raja-raja. *Civis* merupakan cabang dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.

Dengan begitu *Civics* diartikan sebagai *The sciences of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state*. Bila diartikan secara bebas, *Civics* dirumuskan dalam ilmu kewarganegaraan yang membicarakan tentang hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi dalam organisasi sosial, politik, ekonomi, (b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson, dalam Nugroho. dkk (2015 : 4), memberikan pengertian bahwa *Civics is usually defined as the study of government and of citizenship, that is, of the duties, right and privileges of citizens*. Secara bebas diartikan bahwa keewarganegaraan sebagai suatu pembelajaran tentang pemerintahan dan kewarganegaraan, yaitu tentang tugas, hak dan hak istimewa warga negara.

2. **Citizenship Education**

Memberikan makna yang lebih luas dari sekedar *civic education* yang lazim dipelajari di sekolah dan perguruan tinggi secara formal. *Citizenship Education* merujuk pada istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di

sekolah dan di luar sekolah, seperti yang diimplementasikan dalam lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dalam organisasi politik dan dalam media.

Penulis berpendapat bahwa *Citizenship Education*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu usaha transformasi pengetahuan tentang bela negara, pembentukan sikap kepribadian patriotis, dan bertekad untuk melaksanakannya secara konsekuen. Pembelajaran berlangsung sepanjang hayat, yang dilakukan pada institusi pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dengan demikian, maka secara konspesional tentang pelaksanaan dan pemaknaan dari citizenship education, lebih luas jangkauan dan tidak terbatas pada satu jenis transformasi bentuk penyelenggaraan pendidikan saja.

3. Civic Education

Dalam kajian historis, istilah *civic education* dan *Citizenship Education* muncul pada tahun 1990 dan sering dipergunakan secara bertukar pakai antara keduanya. Mahoney dalam Nugroho. Dkk. (2015 : 4), merumuskan bahwa "*Civic education includes and involves those teaching; that type of teaching method; those student activities; those administrative and supervisory procedures which the school may utilize purposively to make for better living together in the democratic way (synonymously) to the develop better civic behavior*"

Secara bebas diartikan bahwa *civic education* merupakan suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Dengan demikian, fokus dari *civic education* adalah membahas tentang warga negara di dalam negaranya dengan berbagai kompleksitasnya. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya diorientasikan untuk membina dan membelajarkan anak menjadi warga negara yang baik, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat (mantap), sadar serta mampu membina dan melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat dan bangsa negaranya, taat azas

(ketentuan), demokratis dan partisipatif, aktif-kreatif-positif dalam kebhinekaan pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Secara umum objek studi *civic education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, keagamaan, kebudayaan dan negara. Sedangkan secara spesifik, objek studi *civic education* mencakup :

- a. Tingkah laku
- b. Tipe pertumbuhan berpikir
- c. Potensi yang ada dalam setiap diri warga negara
- d. Hak dan kewajiban
- e. Cita-cita dan aspirasi
- f. Kesadaran, patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila
- g. Usaha, kegiatan, partisipasi, tanggung jawab.

Menurut pandangan penulis, pendidikan kewarganegaraan menyangkut pembelajaran tentang pengetahuan pedoman berinteraksi antara individu dengan negara, individu dengan kelompok-kelompok bangsa, dan individu dengan individu lain. Dimana segenap aktivitas individu sebagai warga negara harus dapat dilaksanakan secara baik, cerdas dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membela negara. Pengetahuan yang dipelajari menjadi kompetensi inti untuk bersikap-berkepribadian, sekaligus sebagai keterampilan (*soft skill*) bagi individu untuk bela negara secara konsisten.

Mengapa Perlu Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan perlu dipelajari secara terus-menerus sepanjang hayat, karena berkaitan langsung dengan aktivitas warga negara di dalam negaranya. Sepanjang manusia masih hidup, maka pengetahuan, sikap-kepribadian dan keterampilan bela negara yang diinisiasi oleh pendidikan kewarganegaraan menjadi pedoman dalam hubungan individu dengan negara, individu dengan individu, individu dengan kelompok-kelompok bangsa, agar tercipta harmonisasi, keselarasan dan keserasian dalam berbangsa dan bernegara.

Ada yang melatar belakang, sehingga pendidikan kewarganeraan perlu dipelajari dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Juliardi (2014 : 2-4) dan Nugroho. Dkk. (2015 : 4) ada dua alasan yang melatar-belakangi perlu pendidikan kewarganeraan di perguruan tinggi, yaitu latar belakang eksternal dan internal, kemudian ditambah lagi latar belakang menurut pandangan penulis, sebagai berikut :

1. Eksternal

Didasarkan atas kuatnya pengaruh global dan modernisasi dewasa ini. Globalisasi menjadi realitas yang tak terelakan yang membawa pengaruh terhadap struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti tercermin pada pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat. Globalisasi tidak saja membawa pengaruh positif tentang demokrasi, hak azasi manusia (HAM), keterbukaan dan lain-lain. Namun di sisi lain globalisasi membawa pengaruh negatif, seperti dekadensi moral, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Pada masyarakat yang semakin terbuka, maka pendidikan karakter yang tercermin dalam pendidikan kewarganeraan menjadi benteng dalam upaya membekali individu dari pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi tidak bisa dibendung atau dihindari, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyikapi globalisasi tersebut secara kritis, dewasa dan bijaksana.

Globalisasi pun pada sisi lain menempatkan dominasi negara-negara maju atas negara-negara berkembang. Negara-negara maju dengan segala kekuatannya menjadi penentu peta politik dunia dan mampu memberikan tekanan kepada negara-negara yang secara politis kurang berpengaruh. Amerika, misalnya telah menjadi “polisi dunia” yang bisa menjatuhkan hukuman kepada negara-negara yang tidak sehaluan dengannya. Dialektika antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang pada gilirannya akan menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang sangat mempengaruhi pola pikir dan mentalitas negara lain. Akibatnya, identitas masing-masing negara menjadi memudar, bahkan mungkin bisa hilang. Pada tataran sosiologi terjadi pergeseran nilai sebagai konsekuensi benturan antara nasionalisme dan internasionalisme. Bila kondisi itu tidak disikapi secara bijaksana, maka cepat atau lambat sendi-sendi negara makin longgar.

2. Internal

Didasarkan atas perjalanan bangsa Indonesia yang telah mengalami beberapa masa sejak era pra penjajahan, masa penjajahan, era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan, era pengisian kemerdekaan, era reformasi dan pasca reformasi saat ini. Setiap perubahan membawa tantangan yang berbeda-beda, sehingga perlu disikapi dengan nilai yang dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di sisi lain, ada kecenderungan memudarnya nilai-nilai kebangsaan pada tataran individu maupun kelompok yang tercermin pada penyelenggara negara yang terkena korupsi, sikap hidup hedonis dan pragmatis. Kondisi destruktif itu tentu harus dihadapi dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental yang tangguh. Pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah yang diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai individu dan kelompok, sehingga Indonesia bisa tetap tegak di tengah-tengah perubahan zaman yang cepat.

3. Pandangan penulis

Revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh perubahan cara berpikir dan cara bekerja, yang sudah hampir semua berbasis pada teknologi informasi membuat semua aktivitas serba instan, tanpa batas dan terhubung-koneksitas. Pada satu sisi, banyak manfaat positif bagi perkembangan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan dan loncatan prestasi maupun karir. Tentang pemenuhan kebutuhan manusia, bisa instan mendapatkannya tidak harus dijemput secara fisik ketempat dimana benda atau makanan itu berada. Kita, dengan santai sambil duduk di teras rumah, bahkan sambil tidur-tiduran bisa mengoperasikan *smartphone*, memesan kebutuhan yang diperlukan. Menunggu beberapa saat, kemudian orderanpun tiba diantar oleh "*driver Ojol*" pekerja jasa *on line*, hingga barang, benda atau makanan yang sudah dipesan tersebut dapat segera diperoleh. Begitu juga jika ingin belajar menterjemahkan padanan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa asing seperti bahasa Inggris, China, Arab dan sebagainya, bila dulu harus membulak-balik lebar halaman kamus

mencari terjemahan padanan kata yang tepat. Namun dengan adanya teknologi informasi, *google* pencarian padanan kata terjemahan tersebut dapat dengan mudah diperoleh, begitu juga dengan aktivitas yang ekonomi seperti *e-money*, *e-commerce*, dan lain sebagainya.

Namun pada sisi lain, dampak negatif sangat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lunturnya jiwa nasionalisme, makin menguat paham liberlisme, panetrasi budaya, hegemoni ekonomi negara-negara kuat, seperti Amerika, Eropa dan akhir-akhir ini negara China juga telah mengembangkan sayapnya ke Indonesia. Kekawatiran adanya ancaman terhadap sumber daya alam, yang menjadi pusat perhatian dunia. Dimana di Indonesia, sumber daya alam menjadi primadona dan incaran negara-negara di dunia. Ada kecenderungan revolusi industri 4.0 ini dimanfaatkan sebagai jembatan “maya” yang dapat dengan mudah menguasai segala sektor kehidupan yang sudah ada di Indonesia, berubah menjadi tatanan baru yang bertentangan dengan norma, nilai dan Pancasila sebagai ideologi negara.

Landasan, Tujuan dan Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Landasan Pembelajaran

Mengapa perlu pendidikan kewarganegaraan, argumentasi lain selain apa yang telah dibahas di atas landasan pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu justifikasi tentang perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Secara konstitusional landasan pembelajaran adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat pada :

1. Pembukaan UUD NRI 1945, pada alinea kedua dan keempat yang membuat cita-cita, tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.
2. Pasal 30 ayat (1) menyatakan : “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”
3. Pasal 31 ayat (1) menyatakan : “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”

Secara yuridis formal, mengenai pentingnya pembelajaran telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI dan Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, pada :
 - a. Pasal 18 (a) hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikut-sertakan dalam upaya bela negaradiselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.
 - b. Pasal 19 (2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diuakti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah ada dalam gerakan pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk pendidikan kewiraan.
3. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, secara eksplisit dan tegas menyatakan nama mata kuliah bahwa kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggii wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum inti Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

45/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembang kepribadian, yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

Tujuan Pembelajaran

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan cinta tanah air Indonesia. Menurut Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Nomor. 43/DIKTI/Kep/2006 bahwa misi utama pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pencapaian misi untuk membantu mahasiswa guna memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan moral.

Ubaedillah dan Abdul Rozak (2013 : 6) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan warga negara Indonesia cerdas, bermartabat dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi basis pendidikan karakter guna mempersiapkan generasi muda atau peserta didik di perguruan tinggi menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, unggul, ulet, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi (2010 : 4) tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan falsafah bangsa Pancasila. Secara detail, Arwiyah dan Runik Machproh (2014 : 11), menguraikan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah :

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta berinda secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan ant dan anti korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan bangsa-bangsa lainnya.
5. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Metode Pembelajaran

Cara, teknik, strategi atau lazim disebut metode merupakan bagian penting untuk mencapai hasil yang optimal dari suatu proses belajar. Ada banyak metode yang dapat diterapkan dalam mentransfer materi pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswa, namun perlu dipertimbangkan efektivitas dan produktivitas hasil belajar yang diperoleh ketika sudah memutuskan untuk menggunakan suatu metode pembelajaran. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan membutuhkan metode yang tepat agar seluruh upaya transformasi benar-benar memantapkan kepribadian menjadi manusia yang berwawasan nasional, memiliki rasa kebangsaan yang kuat dan cinta tanah air.

Dwiyatmi (2012 : 10) mengemukakan, bahwa metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi :

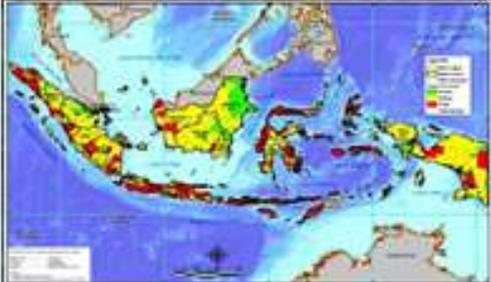
1. Menggunakan pendekatan berorientasi kepada kepentingan peserta didik dan memantapkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran dan sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara.
2. Metode proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pembahasan secara kritis analitis, induktif, deduktif, melalui dialog kreatif yang bersifat paripatoris, untuk meyakinkan kebenaran substansi dasar kajian dan motivasi sepanjang hayat.
3. Bentuk aktivitas proses pembelajaran : *On Line* atau Tatap Muka, diskusi-forum, penugasan, persentasi (kuliah tatap muka), quiz, studi kasus, kajian, evaluasi proses.

- Motivasi, menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk eksis dalam masyarakat global.

TUGAS TERSTRUKTUR

Esas Unggul Smart, Creative and Entrepreneurial

TUGAS TERSTRUKTUR



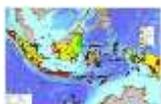
1. Anda diminta untuk menjelaskan secara argumentatif tentang beberapa pengertian dari Pendidikan Kewarganegaraan ?
2. Lakukan pengkajian secara mendalam melalui pengamatan di lingkungan ada dan kajian kepustakaan tentang mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan bagi setiap warga negara !

Daftar Pustaka

- Arwuyah, Yahya dan Runik Machproh. 2014. *Civic Education di Perguruan Tinggi di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Juliari, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Rajawali pers.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kemristek-Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Nugroho, Arisetyato. dkk. 2015. *Etika Berwarganegara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ridhuan, Syamsu., dan Wahid, Aliaras. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul
- Ubaedilla, A., dan Abdul Rozak. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Education*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Grup.

MODUL 2

HAKIKAT, URGENSI, HISTORIS, POLITIK DAN SOSIOLOGIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang hakikat, urgensi, historis, politik dan sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membentuk sikap-kepribadian cinta tanah air dan bertekad mampu melaksanakan kewajiban bela negara

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap negara di planet bumi ini pasti mengharapkan warga negara atau bangsanya menjadi manusia yang cinta pada bangsa dan negara. Ini sudah menjadi kewajiban setiap warga negara. Pribahasa Minangkabau “***Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung***” mengandung makna bahwa jika seseorang berada di suatu tempat atau negara, maka sebagai insan warga negara wajib membela, memahami, menyayangi, mencintai, menjaga, mengasahi, mengabdikan untuk negara tempat tinggalnya dan tidak berperilaku kontra produktif apalagi berkhianat.

Apa yang diutarakan di atas hanya menunjukkan bahwa hakikat manusia secara fitria memang harus dilakukan secara penuh kesadaran (***conditio sine quanon***), dengan bijak dilakukan seperti air mengalir begitu pula dengan hakikat-hakikat yang lain. Seperti dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, memiliki hakikat yang harus dimengerti dan dipahami agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran tentang ke-Indonesia-an, untuk membentuk keperibadian, membangun berkarakter kebangsaan, berani bela negara, cinta tanah air dan berwawasan nasional, sehingga menjadi **warga negara** yang baik dan pintar (***smart dan good citizen***) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pembelajaran ke-Indonesia-an yang dimaksud adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik pendidikan tinggi dalam membina mahasiswa dan pemuda agar benar-benar menjadi orang Indonesia. Pertanyaan mendasar adalah: apakah selama ini orang Indonesia belum menjadi bangsa Indonesia? Jawabannya tidak. Semua warga negara Indonesia sudah menjadi bangsa Indonesia yang sah dan memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo (2016), jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa. BPS tahun 2010 mempublikasikan hasil pencacahannya dimana terdapat 1.340 suku bangsa (etnik) yang mendiami bumi nusantara yang tersebar di 17.504 pulau besar dan kecil dan memiliki 1.211 bahasa daerah. Jadi semua penduduk, asal etnik dan bahasa daerah yang dimiliki yang mendiami pulau-pulau nusantara adalah bangsa Indonesia.

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat bertahan hidup (survival), mampu menghadapi tantangan abad ke-21 yang serba menuntut keterbukaan dan kecakapan untuk bisa menjadi sejahtera, aman dan damai. Pengaruh euforia reformasi membuat bangsa Indonesia hampir-hampir lupa diri bahwa sesungguhnya mereka adalah bangsa Indonesia. Boleh jadi seseorang sah sebagai warga negara Indonesia, namun orientasi cara berpikir, wawasan, sikap dan tidakannya jauh dari nilai-nilai kebangsaan, apa lagi cinta tanah air Indonesia. Pengetahuan, sikap dan perilaku sudah tergerus oleh hadirnya perkembangan situasi dan kondisi perorangan dan/atau kelompok yang saling memojokkan, membeci, menghasut, memfitnah, mengintimidasi dan mengutamakan konflik kepentingan yang dihebuskan oleh provokasi media sosial secara langsung atau tidak, dengan dalil dan berlindung pada tatanan demokrasi. Demikian juga semakin menguatnya arus globalisasi dan hegemoni negara-negara kuat yang masuk ke Indonesia tanpa bisa dibendung. Semua faktor tersebut telah membuat bangsa Indonesia hampir kehilangan orientasi, oleh sebab itu pelan tapi pasti sangat perlu meng-Indonesia-kan bangsa Indonesia.

Dalam konteks bangsa Indonesia sudah memasuki abad ke-21 pada era milenium ke-3 yang berada atau bermukim di negara kepulauan (**archipelago**) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tataran teori negara modern atau negara kebangsaan (**nation-state**), Indonesia memiliki bangsa sebagai warga negara (**citizen, citoyen**) berarti warga (**member**) dari suatu negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam bahasa Belanda disebut **staatsburger** atau **onderdaan** atau kawula negara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah **civic, citizen** atau **civicus**.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi warga negara Indonesia adalah semua penduduk yang berada di wilayah negara yang sudah memiliki status kewarganegaraan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Misalkan: petani, pedagang, PNS, Polisi, TNI, Karyawan, Guru, Dosen, Mahasiswa dan yang lainnya.

B. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting (urgent) bagi bangsa Indonesia? Sebelum diuraikan jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, ada baiknya kita melirik negara-negara lain tentang komitmen dan konsistensinya dalam memberikan pemahaman (**guiding principle**) bagi warga negaranya tentang nilai-nilai, filosofi negara dan kewajiban warga negara dalam membela negaranya. Jika di Indonesia bernama Pendidikan Kewarganegaraan, maka di Amerika Serikat (USA) **Civics, Civic Education**, di Inggris (**United Kingdom**), **Citizenship Education**, di Timur Tengah, **Ta'limatul Muawwatanah, Tarbiyatul Watoniyah**, di Mexico **Educacion**

Civicas, di Jerman, **Sachunterricht**, di Afrika Selatan, **Life Orientation**, di Rusia, **Obscesvovedinie**, di Malaysia, **Pendidikan Sivik**, dan tentunya di setiap negara pasti ada pembelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan ini.

Terkadung maksud bahwa setaip negara menginginkan dan mempunyai **expektasi** agar semua warga negara memahami filosofi, mengetahui sejarah bangsa, menjadi cinta bangsa dan negara serta menjadi cerdas dalam membela negaranya. Nah, tentu para **fouding fathers, stakeholders** dan seluruh bangsa Indonesia mempunyai hal yang sama, yaitu agar harkat, martabat, identitas, integritas dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tetap terjamin, NKRI harga mati.

Apa yang diutarakan di atas sangat relevan dengan pengertian pendidikan kewarganegaraan. Secara harfiah **pendidikan kewaganegaraan** adalah sebagai program pembelajaran yang menginginkan dan mempunyai **expektasi** dapat membentuk manusia Indonesia memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Dari pengertian ini, jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam pembelajarannya. Oleh sebab itu, adalah sangat wajar dan dipandang urgen bagi setiap mahasiswa untuk menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Jika menilik maksud pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu proses pembentukan mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Merupakan implementasi dari UUD NRI 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU. No. 12/2012, tentang Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana pada Kurikulum Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, maka secara yuridis formal urgensi pemebelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan sebagai amanat yang harus sampai kepada setiap warga negara Indonesia.

Dari maksud pembelajaran tersebut, tentu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan yang spesifik yang harus dicapai karena sekaligus sebagai **outcome** yang diharapkan. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara Indonesia menjadi bersikap dan berperilaku baik dan pintar (**smart and good citizen**) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945. Ini tujuan yang sangat bagus, sebab mau kemana dan akan sampai dimana, tentu tergantung tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai tujuan tentu ada beberapa langkah, cara, pendekatan, metode dan teknik dalam proses pembelajarannya. Ikhwal proses penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran dalam pencapaian tujuan sudah diutarakan pada bagian pendahuluan.

C. Historis, Sosiologis dan Politis

1. Historis Pendidikan Kewarganegaraan

Supaya tidak tumpang tindih dengan pembahasan sejarah perjalanan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pada bagian terdahulu, maka pembahasan historis pendidikan kewarganegaraan pada bagian ini memfokuskan pada hakikat atau esensi pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa dan pendidikan bela negara yang cinta tanah air Indonesia.

a. Zaman Kerajaan dan Penjajahan

1.1. Kerajaan Sriwijaya

Pada zaman kerajaan Sriwijaya, di abad VII, dibawah Wangsa Syailendra (600-1400), nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan sudah mulai diinisiasi oleh Sriwijaya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebagai suatu negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi Wawasan Nusantara yang kita kenal dewasa ini. Kerajaan Sriwijaya telah mampu menyatukan wilayah nusantara yang terdiri dari pulau-pulau menjadi satu kesatuan yang kuat (terintegrasi), meskipun ada perbedaan suku bangsa, bahasa daerah dan adat istiadat namun sudah dapat dipersatukan dalam konsepsi kemaritiman. Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi wilayah Indonesia sekarang, Siam, dan Semenanjung Melayu yang terkenal sebagai pusat perdagangan, sehingga rakyat makmur dan sejahtera.

Masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 600-an – 1100-an atau dimulai abad VII, Raja pertama dipimpin oleh Daputra Hyang Sri Jayanasa, dengan lokasi kerajaan berdasarkan prasasti Kedudukan Bukit di Palembang (682), Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat berbasis maritim di Pulau Sumatra. Sedangkan menurut catatan perjalanan I-Tsing seorang pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan menerangkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Bahasa yang digunakan adalah melayu kuno dengan huruf **pallawa**, beragama Budha dengan mata uang koin emas dan perak.

Pada tahun 686 Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda dan di tahun 775 menguasai Selat Malaka. Masa jaya Kerajaan Sriwijaya pada abad IX - X Masehi, dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya digambarkan sudah berdaulat di wilayah nusantara dan memiliki kemakmuran, dimana rakyat aman dan sejahtera. Ada beberapa hal yang dapat dipedomani dari keberhasilan Kerajaan Sriwijaya dan rakyatnya dalam usaha mempertahankan kedaulatan, yang bila dikaji secara mendalam akan memperoleh gambaran bahwa ikhwal tersebut sama persis dengan upaya-upaya melaksanakan hak dan kewajiban **bela negara**, sebagai berikut:

Dalam **bidang perdagangan** telah diatur dengan baik, dimana pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat. Dengan demikian rakyat

mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produksi. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pengendali rute perdagangan di perairan lokal yang mengenakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat di Selat Malaka dan Selat Sunda. Untuk lebih meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, Sriwijaya mengendalikan jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India.

Semangat bela negara terlihat nyata pada usaha-usaha yang dilakukan Sriwijaya dalam hal mencintai produksi lokal baik dalam bentuk kerajinan, maupun hasil-hasil bumi dalam negeri. Begitu pula dengan kemampuan Sriwijaya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah nusantara, hingga dapat menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara diantaranya: Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam dan Filipina.

Dalam **bidang pemerintahan** Kerajaan Sriwijaya sudah mengangkat pegawai kerajaan yang mengurus pajak harta benda kerajaan, ada pula pegawai yang melaksanakan urusan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan ada rohaniawan yang bertugas menjadi pengawas teknis dalam pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Sudah ada keterpaduan antara urusan pemerintahan dengan agama, yang menunjukkan keterkaitan sistem negara dengan nilai-nilai Ketuhanan. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara sudah tercermin di Kerajaan Sriwijaya, seperti yang diabadikan cita-cita negara Sriwijaya "***marvuat vannua Criwijaya siddhayatra subhiksa***" artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur.

Di bidang pemerintahan didapati adanya kontribusi konsep bela negara yang hakiki dalam suatu negara. Hal ini tampak jelas pada sistem pemerintahan, dimana sudah ada pegawai kerajaan yang bekerja dibagi menjadi kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi secara spesifik. Keberadaan para pegawai atau petugas di bidang pajak, keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan pengawasan, menunjukkan bahwa sudah ada sistem kerja yang profesional yang dilakukan para pegawai Kerajaan Sriwijaya. Hal ini berarti, pada zaman Sriwijaya sudah ada tekad melaksanakan hak dan kewajiban bela negara.

Dalam **bidang pendidikan**, pada zaman Kerajaan Sriwijaya sudah didirikan Universitas Agama Budha yang sangat terkenal di Asia. Para pengajar di universitas ini umumnya berasal dari Kerajaan Sriwijaya, tetapi ada pula guru-guru tamu yang didatangkan dari India, antara lain: Dharmakirti. Para pelajar yang sudah ditamatkan dari Universitas Agama Budha bisa melanjutkan belajar ke India. Sudah menjadi tesa bahwa pendidikan menjadikan bangsa cerdas. Rakyat yang cerdas dapat membangun bangsa dan negaranya menjadi berkembang dan maju. Pada zaman Sriwijaya sudah banyak rakyat yang cerdas karena mereka belajar di Universitas Budha. Ini artinya bahwa rakyat Sriwijaya sudah memiliki pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) tertentu khususnya Agama Budha. Rakyat cerdas

yang dilandasi dengan nilai-nilai moral ketuhanan dan idiologi suatu negara, pasti cerdas pula dalam membela negaranya.

1.2. Kerajaan Majapahit

Pada Abad XIII berdiri kerajaan Majapahit yang masa kekuasaannya tahun 1293-1527. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang memerintah sejak tahun 1293 sampai tahun 1309. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya (Papua). Zaman keemasan Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan maha patih Gajah Mada. Letak Kerajaan Majapahit berpusat di Provinsi Jawa Timur dengan Ibu kota di wilayah sekarang bernama Trowulan Kabupaten Kediri. Bahasa yang digunakan adalah Jawa Kuno dan Sansekerta, agama Siwa-Budha (Hindu dan Budha), Kejawean dan Animisme, dengan mata uang koin emas dan perak, kepeng (koin perunggu yang diimpor dari Tiongkok). Majapahit memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan dan Vietnam bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Persahabatan dengan negara tetangga atas dasar "**Mitreka Satata.**"

Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada isinya : "Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum bisa menyatukan nusantara". Pada bagian lain Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pada sidang Ratu dan Menteri-Menteri pada tahun 1331 berisikan cita-cita untuk mempersatukan wilayah nusantara raya. Berbunyi : "Saya baru berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, jika Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan."

Tergambar dari semangat sumpah palapa bahwa sebenarnya pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit cukup banyak ancaman bagi wilayah kekuasaan Majapahit. Dari dalam timbul beberapa pemberontakan yang mau meruntuhkan kerajaan, juga dilancarkan beberapa strategi penyusupan untuk melemahkan kerajaan Majapahit. Pada masa ini juga sudah banyak kerajaan-kerajaan kecil di wilayah nusantara yang saling perang (perang saudara) menjadi ancaman tersendiri bagi Majapahit. Namun dengan sistem pertahanan yang dibangun Patih Gajah Mada, pasukan-pasukan yang menyusup dan yang melancarkan serangan ternyata dapat dipatahkan. Begitu pula dengan ancaman yang datang dari luar wilayah kekuasaan, baik yang dilancarkan dengan taktik perdagangan maupun dengan strategi infiltrasi, semua dapat ditangkal oleh pertahanan dan sistem pemerintahan kerajaan yang tangguh.

Untuk menyatukan perbedaan dan keanekaragaman suku bangsa yang tergabung dalam wilayah kekuasaan Majapahit, dipergunakan seloka nasional karangan Empu Tantular dalam buku Sutasoma. Sloka persatuan nasional yang terkenal itu berbunyi **Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua** artinya walaupun berbeda-beda, namun satu juga dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal

ini tampak dengan jelas menunjukkan bahwa pada zaman itu sudah menerapkan strategi persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan negara. Persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan kesatuan dalam berbagai pandangan menjadi satu kekuatan besar dalam mempertahankan wilayah nusantara.

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik, pemerintah kerajaan Majapahit mengangkat para penasehat kerajaan yang berfungsi memberikan nasihat dan memberikan pedoman dasar dalam menjalankan pemerintahan. Seperti, **Rakryan I Hino I, Sirikan dan I Halu** yang berarti memberikan nasihat kepada raja. Terdapat kehidupan yang rukun dan gotong royong yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sistem yang baik ini, meskipun pemerintahan menggunakan asas monarki, namun kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat ditumbuhkan adat dan adab bermusyawarah untuk mufakat, terutama dalam mengambil keputusan bersama secara bijak.

Menurut catatan sejarah masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, merupakan dua kerajaan besar yang telah mampu melaksanakan pemerintahan yang baik, yang ditopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga dapat dipahami bahwa zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita. Dengan demikian berarti embrio bela negara sudah ada pada masa itu dan semangat bela negara makin realistis manakala kedua kerajaan ini berjuang habis-habisan demi terbentuknya wilayah nusantara sebagai cikal bakal wilayah NKRI.

1.3. Zaman Penjajahan

Masa penjajahan merupakan suatu masa yang sangat kelam. Nilai-nilai persatuan, rasa kebangsaan, nasionalisme dan semangat kejuangan yang sudah diletakkan secara historis oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sirnah adanya. Bukan berarti tidak ada semangat dan gelora bela negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan yang bersemayam dalam dada, tetapi kondisi yang dijajah menyebabkan tidak dapat dilaksanakan.

Keberadaan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara tidak dapat bertahan lama dan runtuh satu persatu akibat dari perang saudara maupun pengkhianatan dari dalam tubuh kerajaan. Diperparah lagi dengan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan diantara kerajaan-kerajaan yang bernaung di wilayah nusantara, karena masing-masing kerajaan ada keinginan yang besar untuk mewujudkan ambisi menguasai kerajaan-kerajaan lain. Kondisi perang saudara dan pengkhianatan seperti ini berlangsung terus menerus dan berkesinambungan sejak adanya kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara, hingga kedatangan bangsa Eropa pada abad XVI sampai menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

1. Perjuangan Fisik

Seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit akibat perselisihan dan perang saudara, datanglah bangsa Eropa ke Indonesia. Pada awalnya kedatangan bangsa Eropa seperti: Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda hanyalah untuk membeli rempah-rempah yang dibutuhkan negaranya. Kemudian, mengingat Indonesia merupakan negara makmur yang sangat subur dan penghasil rempah-rempah, serta hasil bumi maka bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Indonesia. Sejalan dengan misi penguasaan perdagangan, bangsa Barat merasa lebih strategis kalau bercokol dan berkuasa. Akhirnya, mereka merubah strategi menjadi menguasai. Sejak itu lembaran hitam penjajahan mulai terjadi.

Penjajahan Belanda memusnahkan kedaulatan negara yang telah dibangun Sriwijaya dan Majapahit, menghancurkan persatuan bangsa yang terkenal dengan politik - ***divide et impera*** - pecah bela kuasa, dan melenyapkan kemakmuran karena segala kekayaan hasil bumi diraup penjajah dan dibawa ke negeri Belanda. Pendek kata seluruh wilayah diinjak-injak bangsa penjajah dan semua kerajaan yang ada ditaklukan serta dikuasai agar mampu bercokol dan melakukan kolonisasi yang lebih luas sampai ke seluruh wilayah nusantara dikuasai penjajah Belanda. Meski raja-raja melakukan perlawanan, namun kondisi pahlawan yang dilancarkan sangat tidak berimbang dan tidak sebanding. Bangsa Belanda menggunakan senjata api dan senjata meriam untuk meluluhlantakan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara sedangkan bangsa Indonesia hanya menggunakan Bambu Runcing dan persenjataan seadanya. Tak pelak lagi, Belanda menang dan menguasai wilayah-wilayah kerajaan yang kalah yang berada di seluruh wilayah nusantara.

Tercatat banyak kerajaan dan para Pahlawan Bangsa yang berjuang gigih melawan penjajah. Misalnya pada abad XVI hampir bersamaan bangsa Eropa ke Indonesia, berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, tetapi tetap tidak mampu membendung masuknya bangsa penjajah. Pada abad XVII dan XVIII dengan semangat patriotik yang tinggi tampil pejuang bangsa dengan gigih melawan penjajah seperti yang dilancarkan pahlawan Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Agung Tirta Yasa dan Ki Tapa (Banten 1650), Hasanuddi (Makasar 1660), Iskandar Muda (Aceh 1635), Untung Surapati dan Trunojoyo (Jawa Timur 1670), Ibnu Iskandar (Minang Kabau 1680), dan yang lainnya.

Nasionalisme bangsa Indonesia tidak pernah surut dan padam, meski penjajah Belanda makin keras melakukan penindasan. Terbukti pada awal abad XIX penjajah Belanda merubah sistem kolonisasi, yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir yang lazim lebih dikenal dengan VOC berganti dengan Badan Pemerintah Resmi yaitu: Pemerintahan Hindia

Belanda. Pada sistem kolonialisasi Hindia Belanda ini, makin jelas bahwa penjajah Belanda tidak akan memberikan kesempatan kepada pahlawan bangsa untuk memenangkan dalam setiap melancarkan pemberontakan. Sistem kolonisasi ini dibangun dengan strategi yang melemahkan para pejuang bangsa dalam melakukan serangan. Selain dilengkapi dengan persenjataan tergolong mutakhir pada saat itu, para penjajah Belanda sudah menguasai ilmu pengetahuan yang lebih maju dibandingkan nenek moyang kita.

Perlawanan fisik tetap terjadi, bangsa Indonesia tidak pernah menyerah terbukti serangan demi serangan dilancarkan pahlawan bangsa. Perlawanan-perlawanan tersebut dilakukan para pahlawan Indonesia, seperti Patimura di Maluku (1817), Imam Bonjol di Minangkabau (1822-1837), Diponegoro di Mataram (1825-1830), Badaruddin di Palembang (1817), Pangeran Antasari di Kalimantan (1860), Jelantik di Bali (1850), Anang Agung Made di Lombok (1895), Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro, Cut Nya' Din di Aceh (1873-1904), dan Sisingamangaraja di daerah Batak (1900). Perlawanan-perlawanan terhadap penjajah ini dilakukan secara sendiri-sendiri di setiap daerah, tidak ada koordinasi satu dengan yang lain serta belum ada persatuan dan kesatuan visi dalam melawan penjajah Belanda. Pada akhirnya perlawanan fisik yang dilakukan oleh pejuang bangsa tidak dapat berhasil mengalahkan penjajah Belanda, sebaliknya semakin menguatkan dan memperkokoh kedudukan penjajah Belanda di bumi nusantara, yang berkuasa selama lebih kurang 3,5 abad.

2. Perjuangan Non Fisik

Mempelajari pengalaman kekalahan-kekalahan masa lalu yang dilakukan dengan gerakan fisik dan seiring telah ada beberapa putra bangsa Indonesia yang berpendidikan, maka pada permulaan abad XX para putra bangsa Indonesia mulai mengadakan perubahan cara dan strategi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Perjuangan ditandai dengan semangat nasionalisme dengan membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara bersama, membangun komunikasi dan koordinasi dalam setiap tindak pergerakan perjuangan melawan penjajah.

Kebangkitan Nasional

Perjuangan non fisik dilakukan dengan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, tidak bersifat politik. Perintis perjuangan non fisik ini dipelopori oleh Boedi Oetomo (***Ejaan Van Ophuijsen***) yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, dengan tokoh yang terkenal bernama dr. Wahidin Sudirohusodo. Ada tokoh lain Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji. Para pemuda bangsa yang tergabung dalam organisasi ini adalah para

mahasiswa *Stovia* dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka memulai perjuangan dengan merintis jalan baru ke arah tercapainya tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya Douwes Dekker seorang tokoh Indo-Belanda mencoba mempopulerkan pergerakan ini dan dengan terus terang mengatakan bahwa perlu mewujudkan aktivitas “politik” dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, maka pengertian mengenai “tanah air Indonesia” makin lama makin diterima dan masuk dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Perubahan *image* perjuangan dari pendidikan dan sosial ke arah pergerakan politik, membawa konsekuensi pada perubahan cara pandang para pemuda dalam menetapkan arah perjuangan. Oleh sebab itu, masa perjuangan Boedi Oetomo ini merupakan tonggak awal perjuangan bela negara non fisik yang terkenal dengan nama **kebangkitan bangsa**.

Setelah itu bermunculan pergerakan-pergerakan bela negara non fisik, antara lain muncul Serikat Dagang Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar dan kecil di Solo untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Oleh Tjokroaminoto nama Serikat Dangan Islam diganti dengan nama Serikat Islam, dengan tujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidup tertindas oleh penjajah. Munculnya pergerakan yang bernuansa politik, menyebabkan Boedi Oetomo agak terdesak ke belakang. Sehingga kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Serikat Islam dan *Indische Partij*. Dengan gerakan baru dalam bidang politik ini, maka Serikat Islam makin eksis dalam **bela negara** yaitu dengan memberikan pengertian dan menanamkan kesadaran nasionalisme Indonesia serta patriotisme di kalangan masyarakat luas.

Dengan makin kuatnya jiwa kebangsaan Indonesia terpatri dalam semangat pemuda bangsa Indonesia, maka tatkala Belanda meminta uang kepada bangsa Indonesia dalam perayaan hari ulangan tahun negara Belanda, timbul kemarahan dari para pejuang bangsa, sehingga mendorong Soewardi Soeryaningrat yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara menulis sebuah artikel berjudul ***Als ik Nederlander Was*** (Sendainya Saya Seorang Belanda). Mengingat tulisan ini merupakan sindiran keras terhadap penjajah Belanda, maka dirinya bersama dua temanya Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo dipenjarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun para tokoh pergerakan kebangkitan bangsa dipenjarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, namun pergerakan dan perjuangan **bela negara** menuju kemerdekaan Indonesia tidaklah kendur dan surut. Malahan nasionalisme Indonesia semakin menguat dikalangan pemuda, mengingat dari

pembelajaran perjuangan kemerdekaan yang telah dirintis oleh Boedi Oetomo memberikan kontribusi pemikiran yang amat berguna dalam melakukan perlawanan secara non fisik kepada pemerintah Hindia Belanda, yang tidak lain adalah penjajah Belanda. Hal ini mendorong Soekarno dan kawan-kawan memelopori berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Pergerakan politik untuk mencapai perjuangan kemerdekaan semakin dipertajam, dengan menanamkan nasionalisme Indonesia, yang tidak lain adalah sebagai semangat perjuangan bercorak aktivitas politik yang nyata dalam mewujudkan persatuan bangsa.

Sumpah Pemuda

Embrio pergerakan melawan penjajah Pemerintah Hindia Belanda dengan memupuk rasa persatuan dan bangsa dalam **membela negara** pada dasarnya sudah tertanam semenjak pergerakan Boedi Oetomo dan pergerakan-pergerakan lainnya di era sebelum tahun 1928. Perjuangan ke arah kemerdekaan yang dipelopori oleh para pelajar pemuda Indonesia, yang terhimpun dalam organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan para pemuda yang berasal dari berbagai daerah dalam wilayah nusantara, tampaknya makin jelas dan tegas untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Soegondo Djojopoespito (Ketua PPI), Mr. Muh. Yamin (*Jong Sumateranen Bond*), Senduk (*Jong Cilebes*) dan yang lainnya yang mewakili daerah, seperti *Jong Java*, *Jong Sumateranen Bond*, *Jong Batak*, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Ambon*, dan *Jong Cilebes*. Juga hadir pengamat dari pemuda Tiong Hoa seperti : Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda, yang hasilnya adalah menyepakati ikrar suci Seumpah Pemoeda, yang berisi pengakuan adanya Bangsa, Tanah Air dan Bahasa satu yaitu Bahasa Indonesia.

Eksistensi kongres Sumpah Pemuda telah memberikan kemajuan dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses persatuan makin kuat, perjuangan **belanja negara** tidak dilakukan secara sporadis lagi, seperti halnya pada masa-masa lalu. Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai titik awal adanya kebersamaan (integrasi masyarakat) yang berasal dari berbagai suku bangsa yang berada dalam wilayah nusantara ini. Persatuan ini membuat Pemerintah Hindia Belanda semakin mengalami tekanan politik didesak untuk memberikan pengakuan atas keberadaan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Semangat nasionalisme makin meningkat, karena sumpah pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap

sebagai suatu bentuk kristalisasi semangat **bela negara** untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Perjuangan Bela Negara Zaman Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 bangsa Jepang masuk ke Indonesia, menerima penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang di Kali Jati Jawa Tengah. Setelah sebelumnya pada tanggal 7 Desember 1941 meletus Perang Pasifik dimana Jepang mampu meluluhlantakkan Pearl Harbour dengan mengebomnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat Jepang telah menduduki daerah-daerah jajahan Sekutu di Asia Pasifik.

Tipu muslihat Jepang mempropagandakan untuk menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia jauh dari kenyataan. Jepang justru secara terang-terangan menindas bangsa Indonesia dengan keji dan kejam. Mencermati kekejaman penjajahan Jepang, para pejuang bangsa dengan patriotis yang tinggi secara bahu membahu melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Jepang terjadi dimana-mana dalam wilayah nusantara. Beberapa perlawanan yang dilakukan para pejuang merupakan gerakan **bela negara** untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajahan Jepang.

Beberapa bentuk perlawanan bela negara terhadap penjajahan Jepang, antara lain : perlawanan dengan menggunakan strategi kooperatif atau kerjasama, perlawanan dengan strategi gerakan bawah tanah (illegal), dan perlawanan bersenjata secara fisik terjadi dimana-mana. Perlawanan **bela negara non fisik** yang paling menonjol adalah perlawanan dengan menggunakan strategi Kerjasama (Kooperatif). Para pejuang yang sudah banyak belajar dari pengalaman kekalahan dalam perlawanan bela negara menggunakan strategi fisik dan pemberontakan, lalu memanfaatkan sebaik mungkin organisasi-organisasi sebagai pengikat persatuan berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia.

Memang, Jepang hanya mengakui organisasi-organisasi yang dibentuknya saja yang ditujukan untuk kemenangan perang Asia Pasifik. Sebaliknya melarang semua organisasi pergerakan nasional yang dibentuk oleh para pejuang, pemuda dan pelajar Indonesia. Namun, tidak kalah pintarnya, dimana tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu sebagai alat perjuangan bela negara, yaitu dengan cara menggembelng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan bangsa Indonesia **bela negara** melawan penjajah Jepang adalah dengan melakukan kerjasama (kooperatif) dari organisasi-organisasi bentukan Jepang. Organisasi-organisasi yang dimanfaatkan untuk melawan penjajah Jepang secara non fisik tersebut adalah Pusat Tenaga Rakyat (Putera), Himpunan

Kebaktian Jawa (*Jawa Hokokai*), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Masyumi, Badan Pertimbangan Pusat (*Cuo Sangi In*), dan BPUPKI serta PPKI. Kecerdasan bangsa Indonesia pada saat itu, terbukti dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang, telah berhasil menyusun UUD dan Dasar Negara sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.

2. Politis Pendidikan Kewarganegaraan

a. Awal Kemerdekaan (Orde Lama)

Pada masa ini, secara tersirat aktivitas pembelajaran pendidikan bela negara lebih banyak berorientasi pembentukan karakter kebangsaan melalui aktivitas sosial kultural dapat dikatakan sebagai babak baru dalam mengisi ruang-ruang kemerdekaan.

Pada awal kemerdekaan situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masih sangat rawan dan tidak stabil. Dalam bidang politik dan keamanan terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, yaitu dengan datangnya kembali Belanda membonceng tentara Sekutu melalui ***Nederlandsch Indie Civil Administratie***. Tentara Sekutu melakukan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang sehingga menimbulkan bentrokan bersenjata. Dalam bidang ekonomi, kondisi perekonomian sangat parah. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menyelenggarakan konferensi ekonomi dan berhasil menghapus autarki lokal warisan Jepang kemudian menggantikannya dengan sistem sentralisasi. Pada bidang sosial budaya terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan adanya penghapusan diskriminasi, yang memberlakukan penghapusan semua perbedaan perlakuan berdasarkan ras (warna kulit), keturunan, agama dan kepercayaan yang dianutarganya.

Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu dan mengemban misi melucuti senjata dan memulangkan para *interniran*. Pada hakikatnya Belanda ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia melalui "Pemerintahan Sipil Hindia Belanda" atau lebih terkenal dengan istilah ***Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA)***. Belanda yang membonceng tentara Sekutu tiba kembali pada tanggal 29 September 1945. Sangat jelas tujuannya untuk menjajah Indonesia kembali. Kondisi makin parah lagi, ternyata para tentara Sekutu juga membantu Belanda yang ingin membatalkan kemerdekaan Indonesia. Melihat kenyataan itu, rakyat Indonesia tidak ingin lagi membiarkan Indonesia menjadi ladang penjajahan Belanda, maka secara bahu membahu bangkitlah perlawanan **membela negara** bangsa dan Indonesia melawan tentara Sekutu dan NICA. Rakyat Indonesia hanya menggunakan senjata rampasan dari Jepang dan senjata tradisional yang dimilikinya.

Setelah berhasil memukul mundur para tentara Sekutu dan NICA keluar dari wilayah Indonesia, masalah keamanan dalam negeri masih belum stabil. Timbul konflik dan ancaman pemberontakan dimana-mana sehingga menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan agar

TNI melakukan perlawanan yang menentukan dalam rangka mengamankan kondisi tanah air dari gangguan keamanan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Misalnya Peristiwa Madiun (18 September 1948) dimana aliran kiri Moeso yang baru kembali dari Moskow merebut Madiun dan memproklamasikan “Sovyet Republik Indonesia”, Pemberontakan Kartosuwiryo (19 September 1948) yang dilakukan oleh pasukan Darul Islam di Jawa Barat, peristiwa Angkatan Perang Ratu Adi (APRA) di Bandung (23 Januari 1950) dibawah pimpinan Westerling memberontak kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), peristiwa Andi Azis di Ujung Pandang (5 April 1950) sebagai bekas tentara KNIL memberontak kepada RIS, peristiwa RMS di Maluku (1 Nopember 1950) dibawah pimpinan Soumokil memberontak kepada RIS, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan (1949), pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah (1949-1962) dibawah pimpinan Karosuwiryo berencana membentuk negara Islam Indonesia, pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan (1957) dibawah pimpinan Kahar Muzakar, pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh, gerombolan Merapi Merbabu Complek (MMC) memberontak kepada RI, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sulawesi (1958-1961), pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) melakukan pemberontakan di Sulawesi (1958-1961), hingga pemberontakan G30S/PKI 30 September 1965 yang dilakukan oleh kelompok Dewan Revolusi Indonesia dibawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. PKI beserta ormas-ormasnya ; Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERHIM), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Semua pemberontakan ini membuat situasi keamanan, politik, ekonomi dan sosial menjadi tidak stabil dan mengalami *stagnan* dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Dalam kondisi yang carut marut tersebut, Presiden Soekarno juga mengemukakan perlu adanya konsep pembangunan mental sebagai bentuk perjuangan **membela negara** non fisik, untuk mengimbangi pembangunan fisik material, maka Soekarno menyampaikan konsep yang lebih dikenal dengan nama Trisakti dalam membangun negara Indonesia. Menurut Soekarno, membangun suatu negara tidak hanya sekedar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya juga membangun jiwa bangsa. Bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak harus memiliki tiga hal, yaitu berdaulat (1) di bidang politik, (2) berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dibidang ekonomi, dan (3) berkepribadian di bidang kebudayaan. Pemikiran ini, lazim di sebut konsep Trisakti.

Embrio pembangunan karakter bangsa (*character building*) sesungguhnya berasal dari pemikiran Soekarno tentang konsep Trisakti itu. Dengan memahami konsep Triskati, bangsa Indonesia

dapat berkerjasama dengan bangsa internasional yang memiliki identitas dan harga diri serta menghormati kedaulatan masing-masing. Memang menurut Soekarno, tidaklah mudah membangun karakter bangsa Indonesia, sebab masyarakat Indonesia saat itu baru saja merdeka dari penjajahan Belanda selama tiga setengah abad dan tiga setengah tahun oleh Jepang. Hal ini membuat bangsa Indonesia (saat itu) sudah terbiasa dengan mental rendah sebagai “bangsa kuli” diantara bangsa-bangsa lainnya. Akibat perjuangan melawan Belanda dan penjajahan Jepang, membuat banyak sekali kerusakan material, mental, serta moral. Untuk memperbaiki kerusakan mental dan moral lebih sukar dari pada memperbaiki kerusakan material.

Pembangunan moral dan mental yang lebih dikenal dengan nama pembangunan karakter bangsa, ditempuh dengan kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945. Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berhasil mengembalikan UUD 1945 secara murni yang mana di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai pedoman dasar dan pandangan hidup (*way of life*) dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teknis, Presiden Soekarno memberi tafsir sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin “Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul : “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang GBHN (Ali dalam Sarbaini dan Wahid, 2015 : 13).

Perjalanan sejarah perjuangan bangsa yang banyak mengalami pengorbanan pada era orde lama memaknai bahwa, meskipun banyak sekali ancaman dan tantangan yang akan menghancurkan kemerdekaan dan kedaulatan namun tetap tidak bisa diruntuhkan. Negara Indonesia tetap berdiri kokok di atas persatuan dan kesatuan bangsa yang pluralis. Ini menunjukkan betapa pentingnya suatu negara yang sudah lama dicita-citakan dan ketika proklamasi dikumandangkan, cita-cita kemerdekaan itu telah terwujud. Tinggal tergantung bagaimana kemampuan dari bangsa Indonesia sendiri mempertahankan kemerdekaannya. Keberadaan para pejuang dan patriotis bangsa yang telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, di atas (1) keinginan Pemerintah Sipil Belanda atau *Nederlandsch Indie Civil Administratie* (NICA) yang membonceng tentara Sekutu untuk kembali menjajah Indonesia dan (2) pemberontakan dan pergolakan dalam negeri yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia serta tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan akibat penjajahan, namun negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 tetap berdiri tegak *survival*.

Hal ini tidak terlepas dari adanya tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengingat pada masa itu sudah ada pembentukan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Agenda kebangsaan dan wawasan kebangsaan yang menonjol disamping nilai dasar yang sudah ada adalah persatuan dan kesatuan, kedaulatan dan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*). Bung Karno berhasil mengangkat tinggi kehidupan kebangsaan yang terus hidup hingga saat ini.

b. Masa Orde Baru

Periode Orde Baru penanaman semangat bela negara dan cinta tanah air salah satunya adalah melalui pendidikan Kewiraan dan pematapan moral Pancasila melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Awal mula timbulnya masa orde baru adalah setelah pecahnya peristiwa G 30 S PKI.

Peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 PKI, menjadi akhir dari keberadaan zaman orde lama. Presiden Soekarno menandatangani **Surat Perintah Sebelas Maret** yang lazim disingkat **Supersemar**, pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisi perintah untuk menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau yang disingkat Pangkopkamtib, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966.

Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS, sehingga lahirlah Ketetapan MPRS No. XXXIIIMPRS/1967 yang isinya mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Lahirlah babak baru dan sejak itu, tonggak pemerintahan orde baru mulai dilaksanakan. Pada hakikatnya orde baru merupakan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasannya.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan di Trilogi Pembangunan yaitu: konsepsi pembangunan nasional yang dicanangkan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Isi Trilogi Pembangunan itu adalah :

- 1) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- 3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Orde Baru memandang bahwa stabilitas nasional yang sehat dan dinamis perlu diprioritaskan, sebab kondisi negara yang aman dan tenteram merupakan modal dasar dalam memacu pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi, dan akan dapat melaksanakan pembangunan nasional yang hasil-hasilnya dapat didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Langkah ini ditempuh mengingat pengalaman masa lampau yang selalu bergolak. Di seluruh wilayah Indonesia terjadi pemberontakan, yang membuat rakyat selalu tidak aman dan tidak tenang dalam melaksanakan hajat hidupnya. Oleh sebab itu, pemikiran cerdas dari Soeharto untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan pembangunan nasional.

Kebijakan nasional dengan menggunakan Trilogi Pembangunan merupakan langkah maju dalam **bela negara** pada pemerintahan orde baru. Sebab bela negara itu tidak mesti memanggul senjata melawan pemberontak, penjahat dan gerombolan yang mengancam eksistensi negara. Akan tetapi dengan melaksanakan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat merupakan suatu keniscayaan dari konsepsi bela negara. Dengan kondisi yang aman dan tertib akan banyak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikuti serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semakin berhasil pelaksanaan bela negara yang dilakukan warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara**.

Kondisi pembangunan makin stabil karena dalam melaksanakan pembangunan sudah ada haluan negara yang disebut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang dalam pelaksanaannya ditempuh melalui strategi Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Dengan menganut pola pembangunan Jangka Pendek, Pembangunan Jangka Menengah dan Pembangunan Jangka Panjang. Untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana yang diharapkan dalam GBHN, maka pemerintah mengambil kebijakan sentralisasi pembangunan dengan model *bottom up* dan *top down planning*. Meski pelaksanaan pembangunan lebih banyak dilakukan dengan strategi top down, namun masyarakat dapat mengusulkan pembangunan mulai dari bawah dengan strategi *bottom up* melalui loka karya di tingkat desa dan kelurahan.

Untuk makin memantapkan ideologi negara Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka diambil kebijakan agar Pancasila menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut sejarahnya sejak awal pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto sudah bertekad untuk memperbaiki arah pemahaman Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Pada peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila” oleh sebab itu

nilai-nilai Pancasila harus dirumuskan kembali agar dapat diamalkan oleh bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, maka pada tanggal 22 Maret 1978 dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*). Pada pasal 4 menjelaskan “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.” Dengan demikian maka Pancasila menjadi bagian yang sangat fundamental dalam pembangunan nasional negara Republik Indonesia.

Dengan mencermati konsepsi pelaksanaan pembangunan nasional di atas, maka ada dua model konsepsi **bela negara** yang sangat tajam yang dilaksanakan dalam masa pemerintahan orde baru, yaitu (1) melalui Trilogi Pembangunan, GBHN dan REPELITA dan (2) melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kedua model konsepsi bela negara ini, seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi serta menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, masyarakat Indonesia dijamin dalam kondisi yang aman dan tertib, maka sejurus dengan itu perlu adanya modal dasar pembangunan berupa karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu dengan moral Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Kedua strategi ini menjadikan negara Indonesia menjadi negara Pembangunan yang aman, tenteram dan damai diatas kemerdekaan dan kedaulatannya sendiri. Tidak heran jika Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan.

c. Masa Transisi dan Reformasi Presiden BJ. Habibie

Transisi dan Reformasi menanamkan semangat bela negara, demokrasi dan revolusi mental. Masa transisi diawali pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai tanggal 20 Oktober 1999. Dalam waktu yang singkat Presiden BJ. Habibie telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi keadaan yang carut-marut dan menciptakan Indonesia baru yang bebas KKN. Langkah-langkah yang diambil adalah sbb:

1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998, terdiri atas unsur-unsur perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP dan PDI. Rapat kabinet pertama tanggal 25 Mei 1998 berhasil membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar, merencanakan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyetujui masa jabatan presiden dua periode. Upaya ini mendapat sambutan positif di kalangan masyarakat.
2. Perbaikan bidang Ekonomi

Agar Indonesia segera keluar dari krisis ekonomi, Presiden BJ. Habibie mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 2.1. Melakukan rekapitulasi perbankan.
 - 2.2. Merekonstruksi perekonomian nasional.
 - 2.3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah Rp. 10.000,-
 - 2.4. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
 - 2.5. Melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang diisyaratkan IMF.
3. Melakukan reformasi di bidang politik
Beberapa langkah yang dilakukan dalam reformasi di bidang politik adalah dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk membentuk partai serta rencana pelaksanaan pemilu yang diharapkan menghasilkan lembaga tinggi negara yang benar-benar representatif. Kemudian membebaskan narapidana politik seperti: Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang dipenjarakan karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang memicu kerusuhan di Medan tahun 1994). Presiden BJ. Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen. Amnesti pembebasan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dikukuhkan dalam Kepres No. 80 Tahun 1998.
 4. Kebebasan menyampaikan pendapat
Presiden BJ. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tugasnya adalah mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta, dengan keluarnya Marzuki Darusman. Kemudian, Presiden BJ. Habibie mengeluarkan satu kebijakan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Berdemonstrasi. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Lalu Presiden BJ. Habibie mencabut UU No. II/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Aksi Subversi dengan mengeluarkan UU No. 26 Tahun 1999.
 5. Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998.
Dalam rangka mengatasi krisis politik yang berkepanjangan, diadakanlah Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. Untuk mengantisipasi pengerahan massa aksi demonstrasi pada sidang Istimewa MPR, maka selain dijaga ketertutupan oleh pengamanan Polisi dan TNI, juga untuk pertama kali pengamanan Sidang Istimewa MPR melibatkan warga sipil yang dikenal dengan Pam Swakarsa, yang terdiri dari Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon) dengan basis di Masjid Istiqlal, organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Banser (GP Ansor), AMPI, FKPPi dan Kelompok Pendekar Banten. Sidang Istimewa MPR menghasilkan 12 Ketetapan, yaitu :

- Ketetapan MPR No. VII Tahun 1998 mengenai Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR No. 1 Tahun 1983 tentang Perubahan Tata Tertib MPR.
- Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Referendum.
- Ketetapan MPR No. IX Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1998 tentang GBHN.
- Ketetapan MPR No. X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- Ketetapan MPR No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Ketetapan MPR No. VII Tahun 1998, Negara yang Bebas KKN.
- Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
- Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR No. XIV Tahun 1998 mengenai Perubahan dan Tambahan Ketetapan MPR No. III Tahun 1998 tentang Pemilu.
- Ketetapan MPR No. XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
- Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*).

Dari dua belas ketetapan MPR tersebut, terdapat empat ketetapan yang memperlihatkan adanya upaya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi, yaitu sebagai berikut:

- Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Referendum. Adanya ketetapan MPR ini, memungkinkan UUD 1945 di amandemen
- Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris MPR dalam Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
- Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Maksimal Dua Periode.

- Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*). Menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal, seluruh organisasi politik tidak lagi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.

6. Pemilihan Umum Tahun 1999

Pemilu pertama setelah reformasi diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Penyelenggaraan Pemilu ini dianggap paling demokratis bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip luber dan jurdil. Pemilu diikuti 48 partai politik yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dari 141 partai politik yang mendaftar di Departemen Dalam Negeri.

Pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh PDIP (Megawati Soekarno putri) yang memperoleh 33,76 % suara. Posisi kedua diduduki oleh Golkar dengan 22,46 % suara, PKN (K.H. Abdurrahman Wahid) dengan 12,62 % suara, PPP dengan 10,71 % suara, PAN (Amin Rais) dengan 7,12 % suara. Sisa suara tersebar ke-43 partai lainnya. Hasil pemilu ini menunjukkan tidak ada satu partai pun yang memperoleh suara mutlak.

MPR yang terbentuk melalui mekanisme hasil Pemilu 1999 berhasil menetapkan GBHN, melakukan amandemen pertama UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999 berhasil memilih KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarno putri sebagai Wakil Presiden.

Masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie ini merupakan masa transisi dari pemerintahan Orde Baru yang otokratis kepada pemerintahan era reformasi yang demokrasi. Pada satu sisi secara historis BJ. Habibie berhasil mengadakan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan, antara lain dari sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi yang lebih demokratis. Namun pada sisi lain, atas berbagai desakan politik, ekonomi dan sosial dari berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri yang pro referendum Timor-Timur (provinsi ke-27 Republik Indonesia), hingga menyebabkan pada 30 Agustus 1999 dilakukan referendum yang di sponsori oleh PBB. Hasilnya bahwa mayoritas masyarakat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.

Timor Timur menjadi bagian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1967 semenjak Portugis gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis (Timor Timur, sekarang Timor Leste), karena Portugis meninggalkan dan tidak pernah mengurus wilayah Timor Timur ini. Amerika dan Australia merestui Indonesia, karena takut Timor Timur menjadi kantong komunisme, karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxix-Komunis.

Amerika Serikat dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS kalah dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City. Namun PBB tidak pernah menyetujui tindakan Indonesia.

Dari sudut pandang nasionalisme dan kepatriotisan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka para pendukung pro referendum dari dalam negeri yang menghasilkan Timor Timur lepas dari Indonesia dan kemudian menjadi negara merdeka Timor Leste merupakan suatu kemunduran bila dilihat dari kaca mata semangat juang dalam **bela negara**. Meskipun pandangan internasional, terutama PBB menilai sikap Indonesia yang merestui referendum merupakan langkah maju untuk sebuah demokrasi. Tetapi sekali lagi bahwa Indonesia telah “kecolongan” dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari wilayah Indonesia, adalah karena lemahnya kondisi ketahanan Indonesia pada masa transisi dalam mengatasi berbagai tekanan dan ancaman internasional.

Presiden K.H. Abdurrahman Waid (Gusdur)

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berlangsung sejak tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 23 Juli 2001, dengan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Sejarah mencatat bahwa K.H. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, pada tanggal 20 Oktober 1999 oleh Majelis Permusyawaratan Indonesia hasil Pemilu 1999. K.H. Abdurrahman Waid dicalonkan sebagai Presiden oleh Poros Tengah, yaitu : Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Bulan Bintang, proses pemilihan berjalan dengan demokratis dan transparan. Sehari setelah itu Megawati Soekarno putri terpilih sebagai Wakil Presiden.

Setelah resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, K.H. Abdurrahman Wahid menyampaikan pidato pertamanya yang memuat tugas-tugas yang akan dilanjutkannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan rakyat
2. Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran
3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Kabinet K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno putri disebut Kabinet Persatuan Indonesia, yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan Gus Dur ini banyak diwarnai oleh tindakan yang kontroversi, seperti :

1. Kabinet sering melakukan perubahan susunan (*reshuffle*)
2. Menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan
3. Sering melakukan kunjungan ke luar negeri

Dalam pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membagi tugas yang menjadi kewenangan Wakil Presiden Megawati Soekarno putri, sebagai berikut :

1. Menyusun program dan agenda kerja kabinet
2. Menentukan fokus dan kebijakan pemerintah
3. Memimpin sidang kabinet
4. Menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon satu

Dalam mengatasi krisis ekonomi negara. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tujuannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. DEN dipimpin oleh Prof. Dr. Emil Salim, anggota Anggito Abimayu, Sri Ningsih dan Bambang Subianto. Dalam hal memenuhi amanat reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid mulai melakukan langkah-langka reformasi, sebagai berikut :

1. Membubarkan Departemen Penerangan yang merupakan senjata utama rezim Soeharto masa Orde Baru dalam menguasai media.
2. Membubarkan Departemen Sosial yang korup.
3. Reformasi militer dengan mengeluarkan TNI dari ruang sosial-politik yang menjadi andalan pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, banyak sekali terjadi pertentangan dalam bidang politik, sosial budaya dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kontroversi yang diambil dalam menetapkan kebijakan pemerintahan, sehingga berdampak pada tidak stabilnya kondisi negara dalam melaksanakan amanat reformasi. Dalam kondisi negara yang tidak stabil itu, reformasi menjadi *kebablasan*, perubahan-perubahan sosial yang terjadi begitu cepat dan banyak yang jauh melenceng diluar amanat reformasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada umumnya tanpa perencanaan, sehingga sulit dikontrol dan diukur dengan indikator yang jelas menurut barometer reformasi. Banyak opini yang menyatakan bahwa reformasi gagal dan tidak mencapai sasaran.

Kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversi itu antara lain: Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan agar TAP MPR No. XXIX/MPR/1966 yaitu melarang Marxisme dan Leninisme dicabut. Berusaha membuka hubungan dengan negara Israel. Tukang Pijit Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang \$4 juta, meskipun uang tersebut berhasil dikembalikan tetapi peristiwa ini sudah muncul ke permukaan sehingga masyarakat mengenalnya dengan istilah *Bulogate*. Bantuan Sultan Brunai \$2 juta untuk pemulihan Aceh gagal dipertanggung jawabkan, sehingga muncul skandal *Bruneigate*. Memperbolehkan bendera Bintang Kejora di Papua untuk dikibarkan asal berada di bawah Bendera Indonesia. Pemberlakuan Tahun

Baru Imlek menjadi hari libur nasional yang diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa.

Lalu Presiden Abdurrahman Wahid mengadakan pertemuan dengan para Rektor Perguruan Tinggi se Indonesia pada tanggal 27 Januari 2001, pada saat itu Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal itu terjadi. Memberhentikan para Menteri Kabinet (*reshuffle*) yang bertentangan dengan kebijakannya. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan Dekrit Presiden yang berisi (1) Pembubaran MPR/DPR, (2) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat Pemilu dalam waktu satu tahun dan (3) Membekukan Partai Golkar. Namun Dekrit ini tidak mendapat dukungan. (<https://id.m.wikipedia.org>).

Dengan berbagai kebijakan yang kontroversi itu, membuat Presiden Abdurrahman Wahid banyak mendapatkan kritikan dan ditentang oleh berbagai pihak, para politisi dan masyarakat luas. Akhirnya sebanyak 151 anggota DPR telah menandatangani petisi meminta pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga pada tanggal 21 Juli 2001 dilaksanakan sidang istimewa MPR, menghasilkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001 yaitu secara resmi memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan Ketetapan MPR No. III Tahun 2001 yaitu menetapkan dan melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Soekarno putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia.

Mencermati kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, memberikan pembelajaran yang kontroversi dengan semangat pembelajaran **bela negara**. Sehingga semangat pembelajaran bela negara mengalami distorsi dalam mencapai tujuan. Namun demikian, justru dalam situasi seperti itu akan membuat sebagian besar masyarakat yang cerdas bela negara makin peduli terhadap cita-cita negara. Sehingga gangguan dan ancaman apapun yang akan menghancurkan kesatuan bangsa dan eksistensi NKRI, muncul semakin radikal dari berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menjamin tetap tegaknya NKRI yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Di sinilah diuji kesetiaan dan loyalitas anak bangsa dalam melaksanakan bela negara, agar NKRI tetap *survival*.

Presiden Megawati Soekarno putri

Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno putri berlangsung sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 20 Oktober 2004 dengan Wakil Presiden Hamzah Haz. Megawati Soekarno putri melanjutkan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan dalam Sidang Istimewa MPR. Kabinet nya diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001, yang terkenal dengan nama Kabinet Gotong Royong. Program Kerja Kabinetnya, antara lain:

1. Mewujudkan otonomi yang tangguh
2. Menyehatkan Bank
3. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri
4. Mewujudkan supremasi hukum.

Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami banyak persoalan dan dalam kondisi yang porak poranda, sebagai akibat beragam konflik yang memerlukan konsentrasi penuh untuk penyelesaiannya. Tercatat konflik komunal seperti Konflik di Ambon, Poso, Sampang dan konflik politik sebagai efek domino dari adanya pemakzulan Gus Dur. Namun perlu dicatat, bahwa pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diadakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang dipandang sebagai salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan supremasi hukum, pada tahun 2003 Megawati Soekarno putri mendirikan Lembaga Pemberantasan Korupsi, yang lazim disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada beberapa kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri, yaitu :

1. Meningkatkan kerukunan antarelemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
2. Membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengan mengeluarkan UU Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
3. Menjaga keutuhan NKRI, setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Pemberian perhatian khusus terhadap masalah ini, mengingat peristiwa lepasnya Timor- Timur dari NKRI.
4. Melanjutkan amandemen UUD 1945, dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
5. Meluruskan otonomi daerah, sebab dengan keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi.

(apria3.blogspotspot.co.id)

Megawati Soekarno putri merupakan perempuan pertama Indonesia yang menjabat sebagai Presiden, tentu ini merupakan simbol kesetaraan gender dalam bidang politik. Berpenampilan tenang dan tampak kurang acuh dalam menghadapi persoalan, namun dalam hal-hal tertentu Megawati Soekarno putri memiliki determinasi dalam kepemimpinannya. Misalkan mengenai persoalan di BPPN, kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Gaya kepemimpinan Megawati Soekarno putri yang anti kekerasan sangat tepat untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas pada kala itu.

Berbagai masalah yang dihadapi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri, antara lain perekonomian Indonesia masih

terlilit utang warisan orde baru kepada IMF. Terjadi tuntutan dari daerah Aceh dan Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, aksi terorisme di Kedutaan Besar Australia. Bom Bali I dan II, Atrium, Hotel Jw. Marriot. Dunia internasional ramai menyoroti masalah terorisme terutama Amerika Serikat, proliferasi nuklir Irak dan Korea Utara, menguatkan dukungan Palestina untuk berdaulat. Sangat dilematis karena berbagai usaha diplomasi harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Sementara tenaga diplomatik sangat terbatas dan masih kurang *capable* baik kabinet maupun Departemen Luar Negeri.

Ada beberapa kelebihan dari kepemimpinan Megawati Soekarno putri, antara lain:

1. Menstabilkan fundamen ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar dan angka kemiskinan.
2. Mulai melakukan pemberantasan KKN dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya keberanian dengan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutejo) serta menangkap konglomerat bermasalah, Nurdin Halid.
3. Berhasil menyetatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi 1998, terbukti dengan dibubarkan BPPN pada bulan Februari 2004 yang telah berhasil melaksanakan tugasnya.
4. Indonesia berhasil keluar dari IMF tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.

Selain keunggulan tersebut, patut dicatat ada beberapa kelemahan dalam pemerintahan Megawati Soekarno putri, antara lain:

1. Kurang pemahaman dalam bidang ekonomi, sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat.
2. Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.
3. Dipandang kurang berhasil dalam melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa.

(wartasejarah.blogspot.co.id).

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pijakan pembelajaran **bela negara** yang kurang menguntungkan pada satu sisi, terutama terhadap beberapa kebijakan yang tidak populis dan kurang berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan harga BBM, penjualan BUMN ke tangan luar negeri dan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari NKRI. Pada sisi lain terjadi pembelajaran **bela negara** yang begitu nasionalis, seperti kemampuan dalam mengatasi berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa. Mempertahankan keutuhan integrasi wilayah dengan mempertahankan Aceh dan Papua yang mau memisahkan diri dari wilayah NKRI, mengatasi krisis ekonomi dengan keluarnya Indonesia dari INF dan

meningkatkan kerukunan antarelemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjabat dua periode dalam pemerintahannya. Periode pertama pada tahun 2004 sampai dengan 2009 dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Periode kedua pada tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan Wakil Presiden Budiono.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)

Pada periode pertama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla mengusung visi dan misi dalam pemerintahannya, sebagai berikut:

Visi :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Misi yang dicanangkan:

1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

Kabinet SBY-JK dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 masa bakti sampai dengan 2009, dengan nama Kabinet Bersatu. Atas evaluasi kinerja kabinet, maka pada tanggal 5 Desember 2005 melakukan *reshuffle* perombakan kabinet yang pertama, kemudian pada tanggal 7 Mei 2007 dilakukan *reshuffle* perombakan kabinet kedua. Sampai akhir masa baktinya, tidak lagi dilakukan perombakan kabinet. Reshuffle bertujuan untuk memperbaiki kinerja kabinet agar dapat mewujudkan visi dan misi yang diusung pemerintahan SBY-JK.

Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan nama program 100 hari kerja. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh Presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan terhadap tersangka korupsi pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang dalam masa 100 hari kerja pemerintahan SBY-JK. (wartasejarah.blogspot.co.id).

Kepemimpinan SBY-JK mencoba menganut konsep Trias Politika. Dimana secara teoritis kekuasaan suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Secara umum ada tiga pembagian kekuasaan, yaitu legislatif lembaga pembuat undang-undang, eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang dan yudikatif lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi kepada lembaga-lembaga ataupun perorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Pelaksanaan konsep Trias Politika pada masa pemerintah SBY-JK mengalami perubahan progresif. Dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural sistem politik Indonesia, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan **legislatif**, dan pilpres untuk memilih **eksekutif**, sekalipun **yudikatif** pemilihannya masih dilakukan oleh DPR melalui pertimbangan presiden.

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan pemerintahan SBY-JK, al:

1. Dalam hal supremasi hukum, telah berhasil melakukan perang melawan korupsi dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor) yang memiliki kewenangan luar biasa dalam menangani kasus hukum korupsi.
2. Dalam bidang integrasi bangsa, telah dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki, menghasilkan situasi keamanan kondusif di Aceh dan yang lebih strategis lagi adalah Aceh tidak lepas, melainkan tetap dalam wilayah NKRI.
3. Kondisi politik di tanah air cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi, terutama dengan keberhasilan pilkada di Aceh menjadi prestasi tersendiri dalam pemerintahan SBY-JK

Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pemerintahan SBY-JK adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional.
2. Masih rendahnya komitmen terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat. Misalnya: terjadi tragedi Bom Bali II, teror bom di Poso dan hal yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

Ada hal yang sangat menggugah semangat pembelajaran **bela negara**, yaitu dengan makin menguatnya rasa nasionalisme kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan dalam mengembalikan kondisi keamanan yang kondusif dan mampu mempertahankan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) tetap tidak lepas dari pangkuan ibu

pertiwi. Meskipun dalam hal penetapan instrumen peraturan perundang-undangan bidang pertahanan tidak ada produk yang ditetapkan. Pada kenyataannya juga secara politis telah berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh dengan sangat demokratis, aman dan damai.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono-Budiono

Pada periode kedua masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono (2009-2014) mengusung visi dan misi dalam pemerintahannya, sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Misi : Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis.

1. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Melanjutkan upaya *clean* dan *good corporate governance*.
3. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.
4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi
5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Untuk menjalankan roda pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet, yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada tanggal 18 Oktober 2011 mengadakan perombakan Kabinet yang mengakibatkan ada beberapa menteri yang direshuffle dan ada yang bergeser jabatan di dalam kabinet. Pada masa pemerintahan yang kedua ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak kurang sigap dalam menangani berbagai masalah. Ada beberapa isu hangat membingungkan dan menimbulkan tanda Tanya. Misalnya: dari pemberantasan korupsi menimbulkan pertanyaan mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum serta politisasi di berbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitraan. (*wartasejarah.blogspot.co.id*).

Ada 15 (lima belas) program prioritas pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, yang disampaikan SBY se usai sidang Kabinet, sebagai berikut:

1. Pemberantasan mafia hukum
2. Revitalisasi industri pertahanan

3. Penanggulangan terorisme
4. Meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia
5. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan
6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula
7. Mengurai keruwetan agraria dan tata ruang
8. Membangun infrastruktur
9. Mengucurkan Rp. 100 triliun per tahun untuk kredit usaha kecil dan menengah
10. Mencari solusi pembiayaan dan investasi
11. Merumuskan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim dan lingkungan
12. Reformasi kesehatan
13. Menyingkronkan antara pendidikan dan dunia kerja
14. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana
15. Sinergi antara pusat dan daerah.

Dalam rangka melaksanakan pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutamakan musyawarah mufakat. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lamban. Meski begitu musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan demokrasi sudah cukup berkembang dan mengalami kemajuan. Hasilnya di dalam negeri sangat terasa bahwa dengan demokrasi tercipta suasana yang dapat menghargai kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Di luar negeri adanya pengakuan bahwa Indonesia ditempatkan sebagai *free country* (negara bebas) di Asia, sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, India dan Taiwan.

Kondisi perekonomian sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat seiring dengan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Namun ekonomi Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis tersebut. Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor non migas Indonesia pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi, yakni 17 % dan masih berlanjut hingga Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara.

Sejalan dengan perjalanan demokrasi, maka sistem sosial mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan kebebasan individualis, yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok dari pada kepentingan bersama. Hal ini sangat kentara dengan kurangnya sosialisasi antara warga masyarakat, yang bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan saja tetapi juga sudah terjadi di wilayah pedesaan. Arus urbanisasi semakin meningkat,

seiring dengan adanya tuntutan kebutuhan hidup yang makin konsumtif dan hidup di wilayah perkotaan lebih menjanjikan dibandingkan di desa untuk mendapatkan pekerjaan selain sektor pertanian.

Perjalanan demokrasi Indonesia pada satu sisi sudah mengalami kemajuan, namun pada sisi lain masih banyak yang belum siap secara mental dan ideologis. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kurang menekankan penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila yang sangat berbeda pada masa orde baru yang sangat menekankan prinsip dari nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka kemajuan demokrasi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kurang diimbangi dengan usaha-usaha filterisasi masuknya pengaruh global di segala bidang yang sangat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hasilnya sangat terasa dimana terjadi penurunan ketahanan mental ideologi bangsa, yang mengakibatkan terjadi penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Nuansa euforia reformasi sangat kentara, masyarakat sudah hampir melupakan alat filterisasi nilai-nilai Pancasila yang digali dari akar budaya bangsa sendiri. Seiring dengan keasyikan pemerintah dan masyarakat dalam menyambut dan mengisi era reformasi dengan demokrasi yang terbuka. Sehingga tanpa disadari pengaruh global di segala bidang terjadi. Dalam bidang ideologi terlihat nyata Pancasila sudah makin ditinggalkan, di bidang ekonomi menyusul ekonomi neo liberal dan etatisme yang makin jauh dari ekonomi koperasi, pada bidang sosial budaya terjadi pergeseran nilai-nilai yang makin individualis, masuk tidak terbandung budaya pergaulan bebas, seks bebas melalui media sosial, internet sampai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba makin bertambah. Oleh sebab itu, di akhir pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono meski terdapat beberapa kemajuan dalam bidang-bidang, seperti demokrasi, ekonomi dan supremasi hukum namun banyak juga meninggalkan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah kepada pemerintahan berikutnya.

Terkait dengan pembelajaran bela negara, terjadi pelemahan keteguhan dalam mengatasi tantangan dan ancaman yang mempengaruhi moral dan mental bangsa. Hal ini akibat terjadi *kebablasan* dalam mengartikan demokrasi, dimana pemerintah asyik dengan permainan demokratisasinya sedangkan masyarakat bergembira ria menyambut kebebasan dalam segala bidang. Sehingga makna demokrasi dan reformasi itu sendiri hilang ditelan kesalahan persepsi masing-masing ditambah dengan lemahnya pengawasan sosial yang konsisten dalam menggunakan norma dan nilai-nilai Pancasila.

Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)

Jokowidodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2014 setelah memenangkan pertarungan dengan lawannya Prabowo Subianto dan Hata Rajasa. Pemerintahan secara resmi mulai dilaksanakan setelah keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh pada tanggal 20 Oktober 2014. Kabinet pemerintahannya disebut Kabinet Kerja. Sama dengan pidato pertama Presiden Joko Widodo pada pelantikan kabinet, yang menyatakan ungkapan untuk kerja, kerja dan kerja.

Visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lima tahun ke depan (2014-2019) adalah “Terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”

Menurut Joko Widodo-Jusuf Kalla, gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Adanya keyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam bekerja. Kedaulatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat secara bahu membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangan. Dilandasi kesadaran tinggi bahwa untuk mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang maupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong royong. Dengan kolektivitas itulah “ruh” ideologi akan memiliki “raga”, keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata berdaulat, mandiri dan berkepribadian adalah amanat Pancasila dan TRISAKTI.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antarbangsa. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang maju mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu untuk membangun kemandirian mutlak diperlukan kekuatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan berdayasaing menjadi kunci utama mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenai kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, pertimbangan maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian suatu bangsa

tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integrasi dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mampu meningkatkan pendapatan dan pembagiannya secara adil, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak azasi dapat terpenuhi, terpelihara keamanan dan ketenteraman warga tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam segala aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati diri, masyarakat serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.

Upaya untuk mewujudkan visi nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong, ditempuh melalui misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Nawa Cita Agenda Prioritas Jokowi-JK. Ada 9 program prioritas dalam menjalankan visi dan misi pembangunan nasional yang diusung oleh Jokowi-JK yang nasional yang diusung oleh Jokowi-JK yang lebih dikenal dengan nama Nawa Cita sebagai berikut:
 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
 2. Membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi bermartabat dan terpercaya.
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 (Sembilan) hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.
 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

(*nasional.kompas.com*)

Ada satu hal yang menarik untuk dikaji bahwa menurut analisis Jokowi-JK, kondisi bangsa Indonesia saat ini sangat memerlukan tindakan *redesign* dalam hal nasionalisme yaitu dengan memberikan suatu treatment revolusi karakter bangsa. Sehingga masyarakat Indonesia menemukan kembali sendi-sendi kehidupan dari nilai-nilai kebangsaan yang asli yang digali Pancasila. Mengingat nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan budi pekerti sudah banyak terkontaminasi pengaruh gegap gempitanya reformasi dan tatanan dunia maya yang kian mengglobal. Oleh sebab itu, menurut Franz Magnis Suseno (dalam *Kompasiana.com*) revolusi karakter bangsa yang lebih dikenal dengan nama revolusi mental tersebut harus dilakukan dengan perombakan sistem pendidikan nasional secara fundamental, total dan gradual. Pendidikan kewarganegaraan yang berisi pengetahuan bela negara dan moral bangsa harus dinomorsatukan sebagai episentrum perekayasaan kemanusiaan dalam gerak sentrifugal pencapaian tujuan kenegaraan, seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Hal itu memang menjadi urgen mengingat hasil kajian tentang wawasan kebangsaan yang diterbitkan oleh media *online* Republika (*Republika.co.id.2015*) terhadap 105 negara di dunia, diperoleh hasil yang sangat mengecewakan bagi bangsa Indonesia, karena disebutkan bahwa Negara Indonesia berada diurutkan ke 96 dalam melaksanakan wawasan kebangsaannya. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi rendah dalam kesetiaan dan kepatuhan **membela negara**. Bahkan menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Riyacudu bahwa posisi **bela negara** masyarakat Indonesia berada diurutkan *buncit*.

Eksistensi posisi bela negara yang berada di urutan *buncit* diakibatkan adanya berbagai ancaman eskalasi gelombang globalisasi dunia yang telah benar-benar menjadi kenyataan. Bukan saja telah menembus batas-batas benteng normatif bangsa, tetapi telah sangat melemahkan tingkat ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOKEKSOSBUD). Misalkan pengaruh ideologi liberal, ekonomi pasar global, politik kepentingan manca negara, kontak sosial media dan dunia maya, serta adanya kebebasan dan reformasi yang *kebablasan* telah menjadi racun pembunuh kesadaran bela negara bangsa Indonesia.

Implementasi amanah reformasi masih banyak disalahgunakan, tidak konsisten dan tidak tepat mengenai sasaran pencapaian target. Keterbukaan diidentikan dengan kebebasan sebebas-bebasnya yang tidak terbatas dan anehnya dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, seperti tanpa dosa. Sesungguhnya faktor inilah yang

sangat mempengaruhi dan berkontribusi terhadap melemahnya tingkat ketangguhan ketahanan nasional. Semangat bela negara telah terkontaminasi oleh motivasi kebebasan individual, sehingga rentan menjadi tidak setia dan tidak patuh kepada negara.

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan otonomi daerah belum matang, masih dalam proses pembelajaran dan berpotensi banyak disalahkan gunakan. Masing-masing daerah otonom menginginkan pelaksanaan kekuasaan yang berlebihan (mutlak). Sehingga menciptakan pemerintahan yang salah kaprah, seperti timbul kembali daerah-daerah yang "dikuasai oleh raja-raja kecil laksana kerajaan zaman dulu". Kondisi seperti ini menyebabkan timbulnya potensi konflik wilayah yang menuntut otonomi luas yang dapat menjurus kepada disintegrasi, dan tentu sangat melemahkan wawasan kebangsaan.

Bercermin dari beberap ancaman, tantangan, situasi dan kondisi semangat bela negara tersebut, maka sangat perlu dilakukan revolusi mental seperti yang telah menjadi salah satu program **Nawa Cita**. Prioritas pembangunan karakter bangsa yang ditujukan untuk menggableng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Seperti yang pernah dilontarkan oleh Bung karno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizar Riyacudu pada tahun 2015 telah mulai melaksanakan program nasional pendidikan dan pelatihan bela negara sebagai Nawa Cita program prioritas pembangunan karakter bangsa yang dilaksanakan secara intensif dan komprehensif. Pendidikan dan pelatihan bela negara tersebut dilaksanakan selama satu bulan sarannya membentuk kader bela negara di kalangan masyarakat. Program ini banyak mendapat sorotan, sebab masih ada yang beranggapan bahwa pendidikan dan pelatihan bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini adalah wajib militer. Padahal esensinya tidak begitu melainkan sama halnya dengan kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, tetapi dilakukan secara intensif dan komprehensif terhadap domain *knowledge*, *attitude* dan *skill* atau lazim disebut kognitif, afektif dan psikomotorik.

Domain kognitif diberikan pembelajaran pengetahuan teoritis bela negara yang akan memberikan pemahaman dan persamaan persepsi tentang hal-hal yang perlu diketahui tentang kompetensi hak dan kewajiban bela negara. Afektif menyangkut pembelajaran penguatan sikap mental nasionalisme Indonesia, cinta tanah air dan berwawasan nasional. Psychomotor mencakup kemampuan awal bela negara yang memiliki ketahanan nasional

yang tangguh dan rela berkorban dalam melaksanakan bela negara.

3. Sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan

Secara sosiologis, bahwa keberadaan tatanan sosial kultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, secara nyata dapat mengajak mahasiswa dan pemuda untuk bela negara dan cinta tanah air Indonesia. Dalam konteks ini dinamika sosial selalu mengalami perkembangan, bahkan lebih cepat dibandingkan ilmu pengetahuan yang diajarkan di dunia pendidikan. Sehingga sering membuat kita terkejut, sepertinya tiba-tiba sudah terjadi perubahan sosial, perubahan budaya yang bisa jadi sesuai atau tidak sesuai norma-norma yang ada.

Menyikapi perkembangan dinamika sosial dan perubahan sosial yang cepat, diperlukan aktivitas sosial yang dapat mengontrol dan mengadaptasi kejadian-kejadian yang memiliki dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan, jika diajarkan dengan *style* implementatif, *quiry* dan *problem solving* terhadap situasi dan kondisi aktual yang berkembang di masyarakat, maka tentu akan dapat membantu percepatan beradaptasi, namun tidak bertentangan dengan nilai, norma dan peraturan perundangan yang ada. Ini penting mengingat informasi sosial kultural yang hadir melalui media sosial, internet dan kontak sosial budaya tidak dapat dibendung transformasinya.

a. Kemampuan Adaptasi

Transformasi informasi pengetahuan dari belahan bumi luar Indonesia, kontak budaya, derasnya pesan-pesan di media sosial, gambar-gambar porno, porno aksi, kekerasan seksual, radikalisme, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, haker, infiltrasi paham komunisme, liberalisme, terorisme sampai dengan perang proxy (*proxy war*) telah terjadi dengan frekuensi yang sangat kuat. Bisa dikatakan hampir setiap detik terjadi dan sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Spektrum *proxy war* sudah sangat meluas pengaruhnya, bukan hanya disasar terhadap kalangan anak-anak, pelajar, mahasiswa dan pemuda tetap juga melanda orang dewasa. Jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan doktrin bela negara yang tinggi, maka bukan saja dapat menghancurkan diri yang bersangkutan, tetapi juga mengancam integritas dan identitas bangsa.

Interaksi sosial yang terjadi baik secara langsung berhadapan muka (*face to face*) maupun melalui sosial media, dipastikan akan terjadi perubahan sosial. Perubahan ini menyangkut pandangan, prinsip, kaidah dan perilaku yang diakibatkan oleh transformasi sosial. Kontrol sosial sangat diperlukan untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya perilaku menyimpang, tindakan diluar norma sosial dan agama. Penguatan institusi sosial dengan cara mentransformasikan pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, agama dan Pancasila yang diaplikasikan dalam sikap dan tindakan, dimungkinkan dapat beradaptasi dengan benar,

cerdas, adaptif, kreatif, inovatif dan produktif namun tetap memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tebal.

Kebutuhan akan pengetahuan, teknologi dan material menangani perubahan juga sesuai dengan perkembangan peradaban, kemajuan dunia. Tentu tidak boleh terjadi *culture lag* dan berhenti, sebab manusia selalu mudah mengalami perubahan. Apa lagi bila faktor lingkungan juga mendorong kuat untuk beradaptasi dengan hal baru, maka sudah dapat dipastikan akan mengadopsi dan mengakomodasi peristiwa-peristiwa sosial budaya yang terjadi. Peristiwa-persitiwa sosial dan budaya itu terjadi, seperti disajikan kepada setiap orang melalui kontak sosial dan sosial media. Ibarat seseorang yang sedang lapar, lalu disajikan hidangan makan dapat dipastikan akan menikmati makanan itu. Padahal mungkin, makanan itu haram jika dimakan, atau mengandung bakteri yang bila dimakan dapat membuat tubuh menjadi sakit.

b. Mengisi Pembangunan

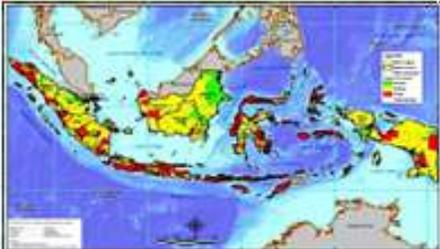
Ikhwal lain yang penting, memebuat pembelajaran pendidikan kewarganegaran menjadi urgen bagi bangsa Indonesia adalah karena harus mengisi pembangunan bangsa dengan aktivitas positif dan produktif yang dilandasi moral bangsa, yaitu Pancasila dan kecintaan terhadap tanah air melalui bela negara sepanjang hayat. Mengisi pembangunan bangsa dengan tatanan sosial budaya, harus memiliki kemampuan dan sikap yang dapat mendorong terjadinya modernisasi yang beradab. Apalagi dalam era reformasi yang sangat demokratis, maka selayaknya di Indonesia untuk mengisi pembangunan tidak dengan aktivitas-aktivitas yang kontra produktif dan anarkis. Perilaku seperti itu harus dijauhan dari kehidupan demokratis. Musyawarah dan mufakat yang telah menjadi landasan demokrasi di Indonesia harus dikedepankan agar apa yang diharapkan dalam tujuan nasional dapat tercapai dengan baik.

Mengisi pembangunan dengan rasa cinta tanah air, akan memberikan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Contoh cinta tanah air dapat diimplemntasikan dalam wujud pikiran, sikap dan tindakan yang menghadirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Misalnya: konsisten mempergunakan produk dalam negeri. Terlihat ekspresi yang muncul ada rasa kebanggaan kalau memakai hasil (*made in*) Indonesia. Dapat dicontohkan membeli sepatu, pakaian, peralatan rumah tangga, perabotan dan lainnya adalah produksi lokal, bukan berasal dari impor negara luar.

Dalam hal kuliner nusantara, akan ada rasa senang dengan memakan makanan atau kuliner “ala Indonesia asli” yang bahan-bahannya bersumber dari dalam negari. Membudayakan makanan tradisional khas Indonesia yang kaya gizi, vitamin dan nutrisi seperti singkong, tahu, tempe dan kuliner-kuliner yang khas daerah dari Sabang sampai Merauke, seperti Mie Aceh, Rendang Padang, Mpek-mpek Palembang, Soto Betawi, Gudeg Jogja, Rawon Jatim, Coto Makasar, dan lainnya. Kenapa harus beli ayam di *Kentucky*? Kenapa harus beli roti di

Mac Donald? Padahal untuk beli ayam goreng dan kuliner Indonesia asli tersedia sangat banyak dan bervariasi di bumi ibu pertiwi ini.

TUGAS TERSTRUKTUR



Anda diminta untuk merangkum materi pembelajaran kedua pada lembaran berikut di bawah ini. Hasil rangkuman paling banyak 2 lembar, dan langsung di-submit untuk dinilai. Selamat mengerjakan!

Daftar Pustaka

Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)

Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga

Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.

Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri

Rawlins E.A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.

Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.

Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.

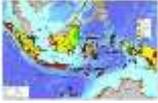
Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.

Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.

Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

MODUL 3

PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang perkembangan dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Sehingga memiliki sikap dan kepribadian sadar berbangsa, cinta tanah air dan bertekad untuk melaksanakan bela negara secara sepanjang hayat.

Pengantar

Bangga menjadi warga negara Indonesia! Sangat Perlu! Anda, saya dan kita adalah warga negara Indonesia, yang beradab dan bermartabat. Oleh sebab itu sebagai warga negara yang baik mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka membela negara. Bela negara, merupakan suatu tekad, kemampuan intelektual dan ketangguhan setiap warga negara dalam menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung maupun tidak langsung, dari dalam dan luar negeri yang membahayakan identitas dan integritas bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Saat ini ancaman dan tantangan yang paling serius adalah bersumber dari disrupsi revolusi industri 4.0, suatu ancaman yang dapat membuat bangsa menjadi “terjajah” dan ketergantungan oleh kepentingan-kepentingan bangsa dan negara lain. Penjelmaan lain dari ancaman disrupsi yang kian terasa, yaitu adanya perang proxy, pemberitaan hoax, bully, provokasi, intimidasi, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Tidak lain merupakan “peluru kendali” bagi para pihak yang berkepentingan untuk melancarkan serangannya dalam rangka melemahkan dan menghancurkan ketahanan, keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Menghadapi dan mengantisipasi ancaman disrupsi revolusi 4.0 tersebut, perlu ada wawasan yang standar, yaitu wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Kondisi tersebut harus dimanifestasikan dalam perilaku dan tindakan bela negara. Dengan demikian, maka identitas nasional yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, yang sekaligus membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia, makin menguat dan ada kebanggaan tersendiri menjadi warga negara yang setia dan cerdas. Inilah harapan yang diamanatkan dalam sesi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semoga kita semua tetap menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan

Dasar hukum yang menjadi landasan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta

Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Telah diamanatkan bahwa dalam kurikulum pembelajaran di Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, **Pendidikan Kewarganegaraan** dan Bahasa Indonesia.

Asal muasal pendidikan kewarganegaraan berawal dari keberadaan sintesis atau **merger** dari dua substansi mata kuliah pokok yaitu; **pertama**, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. **Kedua, Kewiraan**. Keduanya dilaksanakan secara terpisah pada jenjang pendidikan yang berbeda juga. Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diberikan kepada siswa mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di beberapa perguruan tinggi ada yang menggabungkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedangkan Kewiraan yang lazim disebut sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Tahap Awal, diberikan pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama tuntutan reformasi di segala bidang pada akhirnya mempengaruhi eksistensi dari kedua substansi mata kuliah tersebut. Sebagai konsekuensi logis, maka diadakan evaluasi dan koreksi total terhadap seluruh konteks materi pembelajaran sehingga menimbulkan beberapa penyederhanaan, oleh karena harus disesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat yang berkembang terutama pada awal era reformasi tahun 1998. Selanjutnya, pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) digabung dengan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang pembelajarannya diberikan pada jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTA. Sementara **Kewiraan** berubah nama menjadi **Pendidikan Kewarganegaraan** yang diajarkan di Perguruan Tinggi dan terpisah dengan Pendidikan Pancasila.

Rekrutmen tenaga pendidik, para guru yang mengampuh mata pelajaran PMP berasal dari guru kelas untuk jenjang pendidikan SD dan guru mata pelajaran yang berlatar belakang pendidikan S0 atau S1 bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau Pendidikan Moral Pancasila untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Bagi Para dosen Pengampuh mata kuliah Kewiraan rekrutmen awalnya berasal dari kalangan militer (TNI) dan polisi. Sehingga sangat terbatas keberadaan sumber daya dosen perguruan tinggi yang berbasis (spesialis) pengetahuan pendidikan kewiraan (pendidikan pendahuluan bela negara). Namun seiring dengan perkembangan zaman, dirasa kebutuhan tenaga dosen Kewiraan sangat diperlukan guna mengantisipasi dan memenuhi kekurangan dosen pengampuh mata kuliah ini. Menyikapi keterbatasan tenaga Dosen Kewiraan, maka Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu), membuka program pendidikan Calon Dosen Kewiraan atau disingkat SUSCADOSWIR yang terbuka bagi kalangan perwira TNI, Polisi dan Dosen PTN/PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk dididik di Lemhanas menjadi Dosen Kewiraan.

Maksud dan tujuan diadakannya **crash** program SUSCADOSWIR-LEMHANAS adalah menambah dan memenuhi kebutuhan dosen Kewiraan di PTN/PTS sekaligus untuk menghilangkan adanya **image atau persepsi** bahwa

pembelajaran Kewiraan sebagai betuk doktrin militerisasi warga Negara sebab para dosen atau staf pengajar berasal dari kalangan TNI dan Polisi. Dengan keberadaan dan kehadiran para dosen sipil dari lingkungan perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa dapat memahami sepenuhnya bahwa Pendidikan Kewiraan bukanlah pendidikan militerisasi melainkan pendidikan pendahuluan bela negara yang wajib dipelajari oleh setiap warga negara. Bukan juga sebagai doktrin wajib militer. Keniscayaan setiap warga negara berhak dan wajib bela negara merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat (1). Oleh sebab itu semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban membela negara Indonesia.

Image dan kritik terhadap keberadaan pembelajaran Kewiraan di Perguruan Tinggi semakin berkembang dan tajam dari waktu ke waktu, terutama berasal dari kalangan **ilmuwan dan praktisi** yang belum mengetahui secara menyeluruh dan mendalam tentang duduk persoalan dan esensi pembelajaran kewiraan. Sesungguhnya, esensi pembelajaran Kewiraan adalah untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan kepribadian mahasiswa agar menjadi ilmuwan dan/atau profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriot sejati. Begitu kuatnya arus kritik ditambah dengan berbagai dorongan adanya kepentingan dalam era reformasi, maka pembelajaran kewiraan disederhanakan dan dirubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak itu banyak sekali terjadi distorsi, baik terhadap Pendidikan Kewiraan maupun terhadap Pendidikan Moral Pancasila (PMP), serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewiraan di-**merger** menjadi satu dengan Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan dan diajarkan sejak duduk di bangku SD sampai Perguruan Tinggi. Secara kasat mata, ada beberapa esensi dasar pengetahuan yang ditiadakan berhubungan dengan moral Pancasila, begitu pula dengan beberapa bahan pembelajaran Kewiraan makin disederhanakan. Semua pengetahuan yang dipandang tidak relevan lagi dengan kondisi objektif zaman harus segera ditiadakan, seperti materi pembelajaran keberadaan “Dwi Fungsi ABRI” langsung dihilangkan. Namun pada kenyataannya, bukannya itu saja melainkan beberapa esensi dasar pengetahuan bela negara juga ikut tergerus seiring dengan penyederhanaan materi pembelajaran pendidikan pendahuluan bela negara (Kewiraan).

Hasilnya tentu sangat terasa, semenjak adanya reformasi 1998 pengamalan terhadap nilai-nilai moral Pancasila makin menipis. Para generasi muda hampir tidak paham tentang apa itu nilai-nilai Pancasila, bahkan ada kalangan artis yang “menghina” burung Garuda Pancasila. Singkatnya, nilai-nilai Pancasila semakin merosot tajam seiring dengan berjalanya reformasi dan makin terbuka lebar arus informasi, globalisasi dan demokratisasi. Begitu pula tatanan pendidikan pendahuluan bela negara (Kewiraan) makin tipis pemahaman terhadap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkorban.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Eksistensi, arah dan tujuan yang hendak dicapai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk mewujudkan kompetensi :

1. Memperkuat *softskill* untuk membentuk karakter ke-Indonesia-an dalam menghadapi tantangan dan peluang yang makin kompleks di abad 21.

Karakter ke-Indonesia-an semakin menipis akibat adanya kompleksitas pengaruh arus globalisasi yang tidak bisa dibendung dan juga berkembangnya sosial media yang sulit dikontrol, sehingga menggerogoti serta mengikis moralitas, mentalitas, kepribadian, nasionalisme dan karakter bangsa Indonesia. Sedangkan abad ke-21 merupakan abad melinium ke-3, dimana setiap orang dipastikan sangat memerlukan *softskill* yang mampu menghadapi peluang dan tantangan agar dapat hidup maju, berharkat, bermartabat dan sejahterah, namun tidak meninggalkan ciri khas kaharakter ke-Indonesia-an.

Softskill merupakan sikap dan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan global dan tuntutan zaman, sehingga mampu mengisi kehidupan dengan baik. Ada 10 (sepuluh) *softskill* yang harus dikuasai :

a) Keterampilan berkomunikasi (*communication skill*)

Bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa nasional Indonesia. Bahasa pemersatu ini, merupakan bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi antar suku bangsa dan sebagai bahasa resmi. Artinya semua aktivitas yang berhubungan dengan acara-acara formal kenegaraan, seperti di sekolah-sekolah, kantor-kantor, sermonial, acara-acara resmi, dan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dihadiri oleh lintas suku bangsa, agama dan sosial budaya, maka wajib mempergunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.

Namun demikian untuk menghadapi tantangan abad 21, yang serba kompetitif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan berkomunikasi bahasa internasional minimal mampu berbahasa Inggris. Akan lebih bagus lagi apabila ada bangsa Indonesia yang mampu berkomunikasi lebih dari satu bahasa internasional, misalnya bahasa Jerman, Prancis, Madari, Jepang dan lain sebagainya. Kemampuan berkemomunikasi seperti ini harus dimiliki, agar bangsa dan negara Indonesia dapat sukses dalam menghadapi tantangan dan persaingan bebas yang mendunia ini.

b) Kemampuan membangun hubungan baik (*interpersonal skill*)

Jumlah suku bangsa (etnis) di Indonesia sebanyak 1340 suku bangsa ditambah dengan suku bangsa keturunan yang sudah hidup di negara Indonesia sejak sebelum kemerdekaan yang sudah turun temurun, maupun yang baru datang setelah kemerdekaan namun telah menjadi warga negara Indonesia, yaitu warga masyarakat yang berasal dari keturunan Tionghoa, Arab, Eropa, India dan lain sebagainya adalah bangsa Indonesia.

Keanekaragaman suku bangsa serta ada perbedaan-perbedaan yang melekat pada kebiasaan-kebiasaan di setiap suku bangsa, akibat pembentukan budaya lokal, bila tidak diketahui, dimengerti dan dipahami, maka dapat menimbulkan gagal paham. Sebaliknya dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, diharapkan semua suku bangsa dan warga keturunan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat saling mengetahui, mengerti dan memahami antara sesama warga negara Indonesia bahwa semua warganegara Indonesia adalah bersaudara. “*Torang semua bersaudara*” kata orang Medano. Pemahaman ini akan membangun hubungan baik antar sesama warga negara.

Kemampuan hubungan baik, tidak terbatas hanya pada konteks membina kerukunan berbangsa saja, tetapi hubungan baik antar negara juga harus dibina. Tentunya terhadap negara-negara yang memiliki kesepahaman yang sama, sehingga dapat dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antar Negara.

c) Kemampuan memecahkan masalah (***problem solving skill***)

Setiap manusia yang sehat sudah diberikan kemampuan dalam memecahkan masalah, sebab manusia memiliki kelebihan dari pada makhluk-makhluk lain, yaitu manusia memiliki akal-pikiran. Namun demikian, tidak jarang manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, bahkan menemui jalan butu. Manusia yang masuk dalam tipe ini, adalah manusia yang tidak mau, bukan “tidak mampu” dalam memecahkan masalah. Sebab mereka tidak suka atau tidak mau berpikir keras menggunakan akal dan tidak mau berusaha seoptimal mungkin untuk menemukan jalan pemecahan masalah. Ada kalimat motivasi “tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, meski harus berakhir dengan kematian”. Oleh sebab itu, kemampuan memecahkan masalah harus dilatih oleh setiap manusia dalam mengisi kehidupan di dunia.

Terkait dengan kemampuan memecahkan masalah, umumnya bangsa Indonesia sudah ada yang terlatih dalam menyelesaikan masalah. Secara historis, negara Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan salah satu wujud adanya kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, disampai sebagai anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia.

Baik secara Individual atau perorangan maupun kolektif, perlu dilatih dan dibiasakan untuk memecahkan permasalahan. Sebab permasalahan itu akan ada terus-menerus sepanjang masih ada manusia. Maka kemampuan menyelesaikan masalah dengan hasil *win-win solution* adalah suatu wujud kemampuan memecahkan masalah yang sangat bagus.

d) Kemampuan mendengarkan (***active listening skill***)

Salah satu kemampuan yang mudah tetapi terkadang sangat sulit dilakukan adalah kemampuan mendengar. Setiap manusia yang normal, memang diberikan indera pendengaran oleh sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa agar setiap manusia bisa dan mampu merespon terhadap apa yang mereka dengarkan. Jadi dalam aktivitas sehari-hari kemampuan mendengarkan suara apa saja sudah menjadi fitra manusia, terutama bagi manusia yang alat pendengarannya masih berfungsi bagus.

Namun demikian, yang dimaksud kemampuan mendengarkan dalam konteks ini adalah kesediaan manusia yang secara ikhlas mau mendengarkan kritik dan saran baik yang bersifat menyakitkan maupun menyenangkan. Sebab tidak semua kritik dan saran bersifat menyenangkan, bahkan lebih banyak yang sebaliknya yaitu bersifat tidak menyenangkan. Dalam hal ini, manusia harus mampu untuk menahan diri dan mengedalikan diri, berpikir sehat dan kritis ketika mendengarkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang tidak menyenangkan. Jangan bertindak emosional, tetapi hadapi dengan tenang sambil berpikir sehat untuk mengambil hikmah dan peraikan atas masukan kritik dan saran yang didengarkan itu.

Sebetulnya kemampuan berpikir sangat berguna bagi setiap manusia, namun secara khusus adalah bagi para pemimpin. Sebab setiap pemimpin sudah difitrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak sempurna. Oleh sebab itu, untuk mendekati kesempurnaan, maka setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan mendengarkan lebih baik dari pada yang bukan pemimpin.

e) Belajar sepanjang hayat (***active learning, life long education***)

Tidak akan nada satu bangsa (individual dan kolektif) berubah menjadi lebih baik, lebih maju dan sejahtera, apabila mereka tidak mengubahnya sendiri dengan cara belajar. Belajar tidak hanya dalam lingkup sekolah dan perguruan tinggi saja, tetapi belajar bisa di mana saja dan dalam waktu yang tidak terbatas. Misalkan di dalam lingkungan alam dimana kita hidup, dimasyarakat, di tempat kerja, di organisasi dan lain sebagainya merupakan media bagi setiap manusia untuk belajar. Waktunya kapan saja misalkan pagi, siang malam, dalam kondisi masih anak-anak, remaja, pemuda, dewasa lansia dan sampai akhir hayat.

Belajar sepanjang hayat, bertujuan agar setiap manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan, situasi dan kondisi sehingga dapat bertahan hidup dengan lebih baik, berkembang, maju dan sukses. Manusia yang mampu beradaptasi adalah manusia yang bisa belajar secara baik, membaca lingkungan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab zaman akan terus mengalami perubahan. Setiap perubahan, pasti akan meninggalkan yang lama dan berubah menjadi yang baru. Oleh sebab itu, bila manusia tidak belajar, niscaya tidak akan mampu menyesuaikan diri terhadap kemajuan dan perubahan-perubahan tersebut.

f) Kemampuan mengorganisasi pekerjaan (***organizational skill***)

Setiap manusia, terlebih manusia yang sudah masuk dalam kategori modern, sudah memiliki kemampuan mengorganisasi dalam segala aktivitas kehidupan. Namun apakah kemampuan tersebut digunakan secara baik, atau sebaliknya tidak bisa memanfaatkan kemampuan mengorganisir, sehingga selalu gagal dalam mencapai

tujuan. Setiap saat manusia dapat dipastikan selalu menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam kondisi yang serba terbatas. Terbatas kepemilikan modal, sumber daya manusia, sumber daya alam sebagai *in put* bahan baku pekerjaan, dan lain sebagainya.

Eksistensi keterbatasan itu, membuat manusia harus mampu mengorganisir pekerjaan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu perlu ada aktivitas-aktivitas yang dikerjakan dengan prinsip-prinsip manajemen. Misalnya dengan menggunakan metode *planning, organizing, actuating* dan *controlling* (POAC). Membuat perencanaan yang baik dalam segala bidang pekerjaan, sebab dengan adanya perencanaan yang baik, sudah dapat diprediksi tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Perencanaan yang baik itu, sudah lebih separuh kesuksesan dicapai. Sebab perencanaan yang baik pada hakikatnya, sudah merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan, untuk menuju kesuksesan.

g) Kemampuan mengelola waktu (***time management skill***)

Salah satu alasan klasik, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya (Jabodetabek) adalah macet. Penyebab ketidak-tepatan waktu atau keterlambatan waktu adalah macet sebagai kambing hitam. Namun permasalahan tidak tepat waktu, bukan hanya terjadi di daerah Jabodetabek saja, ternyata di luar wilayah tersebut hampir selalu terjadi di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nuatenggara, Sulawesi, Maluku, Papua dapat dikatakan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Perihal terlambat dan tidak tepat waktu sudah menjadi budaya tersendiri.

Dari beberapa kasus pertemuan rapat (meeting), diundang pukul 09.00 WIB pagi, ternyata menunjukkan jarum jam tepat waktu pukul 09.00 WIB makin lama makin bergeser ke arah mendekati pukul 10.00 WIB baru beberapa orang saja yang sudah hadir. Waktupun terus berjalan hingga menunjukkan pukul 10,00 WIB lebih, itupun belum lengkap undangan yang hadir namun rapat tidak bisa ditunda lagi dan harus dilaksanakan. Jadi sudah bergeser lebih satu jam acara baru dimulai, karena menunggu undangan yang terlambat, tidak tepat waktu, alias tidak mempunyai kemampuan mengelola waktu.

Coba di renungkan, andai ada seorang pengusaha. Katakan saja pengusaha “Kerupuk”, bila rata-rata sa pengusaha. Katakan saja pengusaha “Kerupuk”, bila rata-rata satu detik mampu memproduksi satu kerupuk. Coba hitung berapa kerugian yang dialaminya akibat penundaan waktu, karena ketidak mampuan mengelola waktu. Baik kita hitung. Bila satu detik satu kerupuk diproduksi, berarti dalam satu menit ada 60 kerupuk yang diproduksi. Maka dalam satu jam diproduksi 3600 kerupuk. Bila harga satu kerupuk Rp. 1.000,- Dapat dihitung $60 \times 60 \text{ menit} = 3.600 \text{ kerupuk} \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp. } 3.600.000,-$

Jadi dalam satu jam, bila tidak bisa mengelola waktu telah merugi sebesar Rp. 3.600.000. Belum produksi-produksi, dan jasa-jasa dan pekerjaan-pekerjaan lain, begit banyak kerugian akibat tidak bisa mengelola waktu.

h) Kemampuan kerja tim (***team player***)

Dua orang lebih baik dari pada satu orang, bahkan lebih banyak personil dalam satu tim diyakini hasilnya akan lebih baik. Betul, tetapi ada syaratnya yaitu harus memiliki kemampuan kerjasama yang baik, bukan kerja bersama-sama. Maknanya berbeda, kerja sama artinya mengerjakan satu pekerjaan dengan tujuan yang sama, setiap anggota tim dapat mengikuti, beradaptasi dan menghargai hasil kerja dalam tim. Bila ada yang tidak sependapat, tidak masalah dan itu hal yang biasa atau wajar saja. Namun tidak boleh menjadi permusuhan dan pertentangan apa lagi berusaha untuk menghancurkan tim kerja.

Sedangkan kerja bersama-bersama bermakna bahwa kelompok orang ada pada suatu tempat tertentu, melakukan pekerjaan yang berbeda dengan tujuan pencapaian hasil pekerjaan yang berbeda pula. Sebab masing-masing bekerja secara individual dan hasil bekerjanya untuk kepentingan perorangan, bukan untuk tujuan yang kolektif. Hanya saja mereka bekerja secara bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama.

Bekerja dalam tim, membutuhkan sangat diperlukan, bukan hanya karena Indonesia sebagai negara yang plural yang didiami oleh beraneka ragam suku bangsa (etnis) dan warganegara keturunan, dan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Namun lebih dari itu, bahwa bekerja secara tim itu sangat baik. Proses dan hasilnya dapat berkualitas tinggi, sebab masing-masing anggota tim memiliki pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang berbeda-beda dan dapat saling melengkapi ketika bekerja dalam tim.

i) Profesional (***professionalism***)

Menghadapi jaman melinea yang penuh tantangan, abad 21 dan era perdagangan bebas dewasa ini dan kedepan, memang perlu memiliki sikap yang profesional. Tidak bisa lagi, bekerja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba konvensional. Sebab akan tertinggal tertinggal jauh kebelakang. Bekerja secara profesional tidak saja, hanya mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba modern saja (cerdas intelektual), tetapi perlu juga kecerdasan sikap mental dan spiritual, yaitu kecerdasan emosional dan matang dalam spiritual atau kecerdasan spiritual.

Perlunya memiliki kecerdasan IQ, EQ dan SQ tersebut, agar manusia tidak salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan apalagi yang bersifat strategis. Sebab orang-orang profesional, bila bekerja pasti akan mampu mempertimbangkan segala sesuatu resiko yang akan didapat termasuk-dampak buruknya, bukan hanya yang berdampak buruk terhadap dirinya saja, tetapi tetapi juga dampak

buruk bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu profesionalitas harus dilandasi oleh kecerdasan IQ, EQ dan SQ.

j) Kemampuan menyesuaikan diri (***adaptability skill***)

Dinosaurus punah, karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kalau binatang penyesuaian diri hanya terhadap lingkungan alam saja. Tetapi manusia tidak hanya sekedar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, namun harus mampu juga beradaptasi terhadap sesama manusia, baik dalam lingkup daerah (lokal), nasional dan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, situasi dan kondisi serta yang lainnya. Tujuannya agar dapat bertahan melangsungkan hidup dan kehidupan, serta meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, keamanan dan kebahagiaan.

Dalam konteks bela negara, setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi manusia Indonesia yang cerdas intelektual (IQ), cerdas emosional (EQ) dan cerdas spiritual (SQ). Sehingga dengan bekal itu, pada satu sisi dapat beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman, masa kini dan masa datang, terhadap eksistensi situasi dan kondisi serta mampu menjaga lingkungan alam. Pada sisi lain, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sukses dalam bekerja atau berkarir, berkeluarga dan memiliki sifat yang agamis, yang diimplementasikan dalam hubungan dengan alam semesta, manusia dan Tuhan Yang Maha Esa.

Orang Indonesia memang harus maju dan dapat menguasai segala ***softskill*** yang menjadi tuntutan kebutuhan dunia kerja, bisnis dan perdagangan, industri, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan rekayasa, dan yang lainnya, sehingga mampu berkompetisi dan sejajar dengan bangsa-bangsa negara maju. Akan tetapi tetap harus bercirikan khas Indonesia, berkarakter kebangsaan dan berwawasan nusantara.

2. **Meningkatkan kemampuan daya pikir, rasa, dan perilaku yang bermartabat dalam membangun karakter bangsa dan lingkungan.**

Transfer pengetahuan (***knowledge***), perbaikan sikap mental dan kepribadian bangsa (***attitude***), serta penguatan ***softskill*** merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Transfer pengetahuan (***knowledge***) akan mendorong peningkatan daya pikir makin kritis dan cerdas, sehingga dipastikan akan memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbaikan sikap mental dan kepribadian bangsa (***attitude***) memupuk sikap yang kuat terhadap rasa cinta tanah air, nasionalisme dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Penguatan ***softskill*** mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja, membangun dunia kerja, bisnis industri, perdagangan dan yang lainnya.

Setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi, dipastikan memilih salah satu disiplin ilmu dan mendalami keilmuan pada bidang yang dipilih. Ikhwal tersebut berkaitan erat dengan transfer pengetahuan, penguatan **softskill** dan **technical skill**. Sedangkan untuk membangun karakter bangsa diperlukan perbaikan sikap mental dan kepribadian (**attitude**) yang mempertebal semangat kebangsaan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendalami pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Memantapkan kepribadian secara konsisten untuk mewujudkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat.

Dulu kepribadian bangsa Indonesia sangat terkenal di dunia sebagai bangsa yang bermartabat, memiliki kesantunan, keramah-tamahan, penyabar, peduli, ulet, tangguh, rukun, harmonis, agamais, patriotis dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan harkat kemanusiaan. Kepribadian seperti ini memang pernah konsisten eksistensinya di Indonesia, namun menjelang reformasi dan pada masa transisi, kenyataannya kepribadian bangsa seperti ini tergerus oleh adanya arus euforia reformasi sehingga mengikis dan meluluhlantakkan nilai-nilai kepribadian bangsa yang sudah melekat seperti bangsa yang digambarkan di atas.

Disamping faktor di atas, masih ada faktor yang menjadi pemicu tergerusnya kepribadian bangsa yang cenderung menjelma menjadi kebalikannya, tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma ketimuran khususnya bangsa Indonesia. Antara lain dalam waktu bersamaan terjadi gelombang globalisasi yang melanda dunia tanpa terkecuali negara Indonesia. Globalisasi memang telah menembus tembok-tembok keterisolasian dunia, bangsa dan masyarakat, sehingga pada satu sisi mempengaruhi mentalitas dan moralitas bangsa yang cenderung menjadi degradasi. Namun di sisi lain memberikan manfaat bagus juga, yaitu makin terbuka luasnya kompetisi ekonomi, percepatan transfer pengetahuan dan teknologi ke seluruh dunia. Fakta ini telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan budaya bagi negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Perubahan ini pada akhirnya dapat dipastikan menyentuh ranah kepribadian bangsa, merubah cara pandang, sikap dan perilaku manusia Indonesia.

Bersamaan dengan itu, kualitas dan derajat rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia makin menurun. Menurut Ryamizar Ryacudu (2015) berdasarkan hasil survey tentang kesetiaan warga negara terhadap negara, kesediaan dalam bela negara dan kemampuan mengaplikasikan wawasan kebangsaan; dari 105 negara ternyata negara Indonesia berada di urutan ke-96 dari belakang. Hasil kajian ini sangat mengecewakan bagi bangsa Indonesia, karena kondisi seperti ini dapat

dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi rendah dalam kesetiaan dan kepatuhan membela negara. Fakta ini menunjukkan bahwa kepribadian bangsa Indonesia benar-benar telah mengalami kemunduran, sehingga perlu di **up-grade** untuk mengembalikan kondisi ideal kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

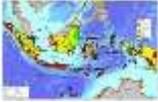
Rasa kebangsaan dan cinta tanah air, harus diimplementasikan secara konkrit. Sebagai ilustrasi, apabila kita cinta terhadap sesuatu : misalkan cinta keluarga, pacar, barang, hewan piaraan, kendaraan, harta benda dan lain sebagainya tentu kita akan bersikap dan bertindak menyayangi, melindungi, menjaga memenuhi kebutuhan, memperhatikan dan lain sebagainya. Bila yang kita cintai itu diganggu, dicuri, diancam, ditindas dan hal lain yang dapat mengancam dan membahayakan yang dicintai itu, pasti kita akan membela. Begitulah ilustrasi kalau mencintai tanah air berarti kita harus membela tanah air dari segala ancaman dan gangguan yang datang dari luar dan dalam negeri, baik langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan martabat bangsa.

Daftar Pustaka

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri
- Ridhuan, Syamsu & Waid, Aliaras. 2019. *Pendidikan Kewargangaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul.
- Rawlins E.A. 1993. *Bently's Texbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.

- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

MODUL 4 IDENTITAS NASIONAL



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang identitas nasional untuk membentuk sikap dan kepribadian cinta tanah air dan bertekad pribadi untuk mampu melaksanakan kewajiban bela negara secara sepanjang hayat.

Pengantar

Bahan pembelajaran pada modul keempat adalah identitas nasional. Menyangkut pengertian, keberadaan (eksistensi) dan unsur-unsur identitas nasional. Bangsa Indonesia memiliki identitas nasional berbeda dengan bangsa lain. Sebab penggalian identitas nasional sampai menjadi jati diri bangsa dan negara melalui perjuangan yang panjang dengan mengobarkan semangat persatuan dan berkorban demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bermartabat.

Identitas nasional Indonesia berbeda dengan identitas bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, perlu dijaga, dilestarikan dan diimplementasikan dalam kehidupan. Identitas menyangkut jati diri bangsa dan negara yang berdaulat, bermartabat. Tidak boleh eksistensi identitas nasional NKRI menjadi berubah, sebagai akibat dari pengaruh hadirnya era globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut percepatan peradaban dunia. Di satu sisi bermanfaat baik, bila dapat dimanfaatkan dalam rangka memantapkan identitas nasional, namun pada sisi lain akan menjadi ancaman apabila bangsa Indonesia, tidak peduli dengan identitas nasional Indonesia.

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas menyangkut jati diri (*self identity*). Menurut Stuart dan Sundeen (1991), identitas merupakan kesadaran akan diri bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut Rawlins (1993) identitas diri merupakan komponen dari konsep diri yang memungkinkan individu memelihara pendirian konsisten dan acapkali memungkinkan seseorang menempati posisi yang stabil di lingkungannya.

Menurut Kemristek-Dikti (2016 : 27) identitas berasal dari kata *identity* (Inggris) yang dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary, berarti : (1) *who or what sb/sth is* (2) *the characteristics feelings or beliefs that distinguish people from others* (3) *the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth*. Dalam kamus Maya Wikipedia dikatakan "*identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's conception and expression of his individuality or group affiliations (such as national identity and cultural identity)*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

Soedarsono (2002) berpendapat bahwa identitas dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita. Walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah saja. Artinya belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Jati diri adalah siapa diri anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Sebab Jati diri merupakan sifat dasar manusia yang kemudian akan menentukan karakter dan kepribadian seseorang.

Jadi identitas merupakan jati diri, cita-cita atau tanda-tanda, penanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Penanda pribadi bisa diwujudkan dalam bentuk performance seseorang atau tanda-tanda yang melekat pada diri sendiri, misalnya: berbadan kekar, kulit sawo matang, rambut lurus dan lain sebagainya. Penanda bisa juga dilihat sebagai bentuk keterangan tertulis secara administratif, misalnya ada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar dan lain sebagainya.

Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Menurut Kemristek-Dikti (2016 : 28) nasional berasal dari kata *national* (Inggris) yang dalam Oxpord Advanced Learner's Dictionary, berarti : (1) *connected with a particular nation; shared by a whole nation* (2) *owned, controlled or financially supported by the federal, government*. Nasional juga bisa merujuk yang menunjuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya.

Tilaar (2007, dalam Kemristek-Dikti. 2016), mengungkapkan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitas. Artinya seseorang tidak mempunyai apa-apa bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain seseorang akan mempunyai arti bila ada di dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antarbangsa, seseorang dapat dibedakan karena rasionalitasnya, karena bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Kaelan (2002, dalam Kemristek-Dikti. 2016), menguraikan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni: sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong-royong, musyawarah dan ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa sekaligus merupakan identitas nasional.

Jadi identitas nasional adalah jati diri yang merupakan ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Dalam konteks pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan istilah jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau

keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia.

B. Eksistensi Identitas Nasional

Identitas nasional dibentuk atau dibuat berdasarkan kesepakatan atau konsensus dari kesukubangsaan yang sudah ada di Indonesia. Keberadaan identitas nasional karena adanya perbedaan etnik, agama, ras dan antar golongan yang memerlukan suatu ciri khusus atau pokok yang diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia, sebagai bentuk identitas nasional. Oleh sebab itu identitas nasional harus dibentuk berdasarkan konsensus bersama agar memiliki persepsi yang sama dalam menilai dan menentukan identitas nasional itu sendiri.

Faktor-faktor pembentuk identitas nasional adalah primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, kelembagaan sejarah dan perkembangan ekonomi.

1. Primordial

Kemunculan identitas nasional, sebenarnya sebagai bentuk pengejawantahan dari sifat-sifat asli (original) yang sudah ada di dalam unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Sifat keaslian ini bisa dalam bentuk karakter atau kepribadian suku-suku bangsaseperti: sikap yang ulet bagi suku bangsa Jawa, ramah-tamah yang tercermin di hampir seluruh suku bangsa yang ada di bumi Nusantara, sikap pemaaf yang sudah melekat dalam jiwa dan keperibadian bangsa sejak lama, gotong-royong dan lain sebagainya. Begitu pula dalam tindakan atau perilaku, bahwa bangsa Indonesia suka menolong, religius yang taat beragama (tidak ada bangsa Indonesia yang tidak beragama), karena bertentangan dengan falsafah Pancasila. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, secara jelas menunjukkan bahwa setiap bangsa Indonesia dipastikan beragama, tidak boleh satu orangpun yang tidak beragama (*atheis*), sebab bertentangan dengan Pancasila.

Dari sudut pandang tata aturan, norma adat, kebiasaan atau kaidah-kaidah, sebetulnya semenjak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majahpahit dan masa penjajahan sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hanya pada zaman penjajahan kolonial kaidah-kaidah primordial ini tidak bisa diimplementasikan, apa lagi berkembang. Sebab bangsa Indonesia berada dalam posisi terjajah, tertindas dan harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh penjajah kolonial. Tetapi setidaknya nilai-nilai primordial itu masih tetap terjaga dan tersimpan di setiap suku bangsa. Meskipun mendapat pengawasan yang ketat dari penjajah, karakter atau jati diri bangsa yang berdasarkan pada keaslian tetap tidak luntur. Bahkan dijadikan sebagai dasar perjuangan untuk persatuan dan kesatuan yang terbukti di zaman Budi Oetomo telah melancarkan aksi kultural dan sosial pendidikan untuk melawan penjajah. Kemudian dipertegas pada tanggal 28 Oktober 1928, dengan diikrarkannya Supah Pemuda oleh peumda-pemuda bangsa Indonesia yang berkumpul di Yogyakarta : bertanah air satu, berbangsa satu, bahasa nasional bahasa Indonesia.

2. Sakral

Identitas nasional berawal dari suatu kesucian yang diidentifikasi sebagai bentuk yang sakral. Menyangkut kesucian dalam perjuangan, tulus dan ikhlas dalam mempertahankan bangsa Indonesia dari penjajahan, rela berkorban dan cinta tanah air. Sebagai perlambang kesucian itu, dianalogikan pada warna putih pada bendera merah putih. Sedangkan kerelaan berkorban dalam berjuang demi eksistensi bangsa dan negara Indonesia tetap jaya (*survival*), dimanifestasikan sebagai suatu ketangguhan, kekuatan dan keberanian bangsa Indonesia dalam berjuang. Sehingga dianalogikan pada warna merah pada bendera merah putih.

Kesakralan adat-istiadat, norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang telah mendarah-daging mengikat secara psikologis adanya rasa senasib dan sepenanggungan, persaudaraan dan ikatan emosional yang kental bangsa Indonesia untuk mentaati dan mematuhi. Sehingga tercermin pada sikap dan perilaku setiap suku bangsa yang menghargai dan menghormati adat leluhur, keadaban suatu kebiasaan yang positif, menjaga dan memelihara sistem sosial budaya yang telah ada, melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, seperti yang tercermin dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh dengan adanya kesakralan, suku bangsa mampu memelihara dan melestarikan budaya daerah menjadi budaya nasional. Keanekaragaman budaya bangsa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan bumi, langit, kesemestaan dan segala isinya.

3. Tokoh

Terkait figur menjadi suri teladan yang dapat diambil pembelajaran dari sepak terjang yang telah ditorehkan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik atau majemuk. Terdapat banyak tokoh pejuang bangsa yang menginspirasi generasi penerus untuk mengimitasi dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara (2 Mei 1889-26 April 1959) menciptakan semboyan "*Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut wuri handayani*" artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan *Tut wuri handayani*, menjadi slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pembentuk jadi diri bangsa.

Tokoh lain yang mampu meningkatkan harkat dan martabat perempuan, antara lain Raden Adjeng Kartini atau lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini (21 April 1879-17 September 1904), dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. RA. Kartini menginspirasi kaum perempuan Indonesia, karena usahanya yang tercermin dari buah pikirannya tentang emansipasi. Kumpulan surat-surat (korespondensi) Kartini, pada tahun 1922 diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Tentu masih banyak tokoh nasional lain yang telah

turut serta menyumbang bagi terbentuknya identitas nasional, yang menginspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Suku bangsa Indonesia sangat pluralistik dalam segala hal. Data BPS tahun 2010, mencatat sebanyak 1.340 suku bangsa, 1.211 bahasa daerah, yang terbesar di seluruh wilayah kepulauan nusantara (*archipelago*) dengan jumlah 17.504 pulau. Jika jumlah suku bangsa sebanyak itu, maka sekurang-kurangnya ada sebanyak itu pula perbedaan yang ada. Terutama tercermin dalam produk sosial budaya. Misalnya: kebiasaan, norma-norma, sikap atau watak dan perilaku yang antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya jelas ada perbedaan. Begitu pula bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh setiap suku bangsa, dimana tercatat sebanyak tersebut di atas yang berarti hampir setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah tersendiri.

Keberadaan perbedaan bagi bangsa dan negara Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kekuasaan Tuhan telah membuat bangsa Indonesia memahami arti perbedaan sebagai suatu potensi dan kekayaan sosio-kultural dan sumber daya yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu perlu dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia, yang terpatri pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.

5. Kelembagaan Sejarah

Setiap negara dipastikan mempunyai sejarah yang berbeda, namun tetap memiliki makna yang sama yaitu tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan mengilhami bangsanya untuk belajar dari pengalaman masa lalu jadi rujukan. Sejarah tidak boleh dilupakan, semua warga negara wajib mengetahui dan memahami sejarah bangsanya. Sejarah yang sesuai fakta-fakta kejadian akan memberikan kontribusi bagi pembentukan identitas bangsa. Secara psikologis, bangsa Indonesia yang sangat plural atau majemuk dapat dipersatukan dengan sejarah perjuangan melawan dan mengusir penjajahan yang merasa sama-sama tertindas.

Selain itu, fakta sejarah telah membentuk kristalisasi nilai-nilai sosial budaya menjadi falsafah bangsa, Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan zaman penjajahan kolonial. Nilai-nilai sosial budaya, norma-norma, kaidah-kaidah, harkat, martabat dan peradaban bangsa Indonesia tercermin dalam butir-butir setiap sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu, tidak lahir begitu saja, tetapi memakan waktu yang lama, yang secara konsisten dijaga dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia dalam setiap generasinya.

Jangan pernah mengubah sejarah demi untuk kepentingan kelompok atau golongan. Karena pada akhirnya dapat menciderai bangsa dan mengaburkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Akibatnya, akan mempengaruhi dan mengubah persepsi warga negara terhadap fakta

sejarah, sehingga akan terjadi ketidakjelasan dan perubahan cara pandang atau persepsi. Tentu akan berpengaruh pada pembentukan keperibadian bangsa, mengubah karakter dan pada akhirnya mengubah identitas bangsa. Contoh: sekarang ada desakan sekelompok masyarakat yang berkepentingan untuk mengubah sejarah G30S/PKI, padahal hasil konfirmasi kepada pelaku sejarah yang masih hidup dan turun langsung yang menyaksikan dengan mata kepala terhadap peristiwa G 30 S/PKI, menyatakan fakta sejarah bahwa peristiwa G 30 S/PKI benar adanya. Tentu ini harus menjadi acuan dalam mempertahankan sejarah yang benar.

6. Perkembangan Ekonomi

Keberadaan perkembangan ekonomi menjadi sangat penting untuk kesejahteraan suatu bangsa. Keadaan ekonomi berpengaruh langsung terhadap cara pandang bangsa dalam mengidentifikasi identitas nasionalnya. Kemiskinan dapat membelokkan cara berpikir, sikap dan tindakan warga masyarakat dalam kehidupan. Biasanya pada kantong-kantong masyarakat miskin, akan dengan mudah dipengaruhi oleh golongan tertentu yang membawa misi tertentu pula. Misalkan paham komunisme akan cepat bertumbuh subur di kantong-kantong wilayah miskin, pengaruh misi agama tertentu kepada warga miskin yang tidak kuat iman sehingga berubah agama dan tentunya kemiskinan dapat membuat kebodohan.

Sebaliknya kondisi ekonomi yang cukup atau dalam istilah ekonomi bahwa suatu negara yang makmur, tentu akan dapat membuat warga masyarakat menjadi cerdas, memiliki kualitas kesehatan tinggi, tingkat kehidupan baik, partisipasi dalam pembangunan tinggi dan lain sebagainya. Tentu kondisi ekonomi seperti itu akan dapat dengan mudah membentuk dan mempertahankan identitas bangsa. Keadaan ekonomi suatu negara baik (dan sehat), akan berkorelasi positif dengan pembentukan kepribadian, karakter dan identitas bangsa itu sendiri.

Negara Indonesia berusaha terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan perekonomian bangsa. Tujuannya untuk dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh bangsa dengan adil dan merata, seperti yang tercermin pada falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga tidak ada pilihan selain memenuhi amanah tersebut, agar betul-betul tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan mamur - makmur dalam keadilan yang sekaligus mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

C. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Untuk memahami unsur-unsur identitas nasional, perlu terlebih dahulu memahami keberadaan identitas. Secara empiris, keberadaan identitas dimulai dari identitas individu, suku bangsa dan identitas nasional. Berkaitan dengan identitas **individu** dapat dimanifestasikan sebagai :

- (1) tanda pengenal perorangan berupa KTP, SIM, Kartu BPJS dan lain sebagainya yang mengidentifikasi individu yang bersangkutan

- (2) karakter atau kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor bawaan (gen) dan lingkungan yang mengidentifikasi sebagai seseorang yang memiliki karakter atau kepribadian. Misalkan kepribadian dan/atau karakternya baik, bicara menyejukkan tidak memprovokasi, tegas, santun disiplin dan sebagainya. Bisa juga sebaliknya misalnya: tidak disiplin, kurang jujur, emosional dan lain sebagainya yang menggambarkan sifat-sifat buruk dari orang yang bersangkutan.



Identitas **suku bangsa** berkaitan dengan eksistensinya yang sudah berada sejak lama dan hidup di wilayah tertentu dengan jumlah komunitas yang banyak. Suku bangsa memiliki budaya lokal, aturan, norma, kaidah dan kebiasaan yang telah melembaga dan menjadi sistem sosial setempat. Memiliki bahasa daerah dan simbol-simbol tersendiri yang memberikan ciri khas dan turut serta membedakannya dengan suku bangsa lain. Misalkan, diantaranya: suku bangsa Bugis dari Sulawesi, suku bangsa Asmat dari Papua, suku bangsa Lintang dari Sumatra Selatan, suku bangsa Jawa dari Jawa, suku bangsa Madura dari Madura, suku bangsa Banjar, Dayak dari Kalimantan, suku bangsa Minang dari Sumatra Barat, suku bangsa Sunda dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Pada prinsipnya suku-suku bangsa tersebut mengidentifikasi karakter atau kepribadian secara umum yang telah dikenal oleh masyarakat.

Identitas nasional menggambarkan secara keseluruhan keberadaan identitas suku-suku bangsa yang ada di wilayah nusantara. Identitas nasional mengkristalisasikan unsur-unsur sosio kultural, sifat, karakter, kepribadian, norma, kebiasaan, bahasa daerah dan seluruh kekayaan suku bangsa menjadi perlambang identitas nasional. Dalam

implementasinya, identitas nasional ada yang dikuatkan dengan legalitas formal (hukum formal) dan ada yang hanya dari pengakuan (*justification*) bangsa Indonesia namun menjadi perlambang unsur-unsur identitas nasional.

Dalam banyak kajian menyebutkan bahwa unsur-unsur identitas nasional terdiri dari : bahasa nasional, bendera negara, lambang negara, falsafah negara, lagu kebangsaan, konstitusi negara, semboyan negara, bentuk negara, konsepsi wawasan nusantara dan kebudayaan daerah.

1. Bahasa Nasional

Sejak tanggal 28 Oktober 1928, ketika pertama kali diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta, telah diikrarkan bahwa bahasa persatuan nasional adalah bahasa Indonesia. Meskipun belum dituangkan dalam legalitas formal, maka sejak dilaksanakan kongres pemuda I secara implisit bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional.

Para pemuda di kala itu, sudah menyadari betul bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Jumlah bahasa daerah di Indonesia, menurut pendataan BPS (2010) terdapat sebanyak 1.211 bahasa lokal. Dapat dikatakan bahwa setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah atau bahasa lokal yang berbeda-beda. Bisa dipastikan kalau negara Indonesia tidak mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tentu sesama bangsa Indonesia tidak akan dapat berkomunikasi secara umum. Bisa dibayangkan misalnya ketika suku bangsa Jawa bertemu dengan suku bangsa Asmat (Papua) kedua belah pihak ketemu masing-masing berbicara dalam bahasa daerah masing-masing, lalu apa yang akan terjadi? Demikian pula misalnya suku bangsa Toraja (Sulawesi Utara) bertemu dengan suku bangsa Lintang (Sumatra Selatan), masing-masing sama-sama tidak bisa mengartikan bahasa daerah antara satu dengan yang lainnya. Alhasil, komunikasi tidak produktif.

Keberadaan bahasa nasional sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia yang beragam (plural), karena dapat menyatukan (mengintegrasikan) bangsa yang memiliki bahasa daerah beraneka ragam, sehingga berkomunikasi dapat nyambung dengan baik. Dengan demikian bahasa nasional - bahasa Indonesia, secara jelas dapat menjadi salah satu identitas asli bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara/nasional, sekaligus sebagai jatidiri dan identitas nasional.

2. Bendera Negara

Bendera negara Republik Indonesia adalah Merah Putih. Lazim disebut juga namanya sebagai Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih. Memang warna dari bendera, terdiri dari 2 (dua) warna, merah

dan putih. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih.

Warna bendera Merah Putih memiliki makna yang sakral. Secara psikologis, warna merah melambangkan sikap yang gagah berani bangsa Indonesia. Tatkala mengusir penjajah, bangsa Indonesia melakukan perlawanan sengit membuat para penjajah kewalahan dan sering hampir kalah. Perlawanan tidak seimbang, penjajah telah menggunakan senjata modern lengkap dengan amunisi, sedangkan bangsa Indonesia hanya menggunakan senjata tradisional bambu runcing, rencong dan panah. Namun tidak mengurangi nyali untuk berperang dan berjuang, korban nyawa dan persitiwa berdarah-darah sudah menjadi bagian perjuangan untuk merdeka. Warna darah merah, yang telah banyak tertumpah dan dikorbankan oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi saksi dan simbol, sehingga layak untuk diabadikan sebagai warna merah pada bendera negara.

Warna putih, mencerminkan niat bangsa Indonesia yang suci, tulus, ikhlas dan kesungguhan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak ada iming-iming, ambisi dan “udang di balik batu” untuk mendapatkan jabatan, pekerjaan yang layak atau upah seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, karena telah merasa berjasa kepada negara. Tetapi semata-mata hanya mengharapkan redho dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah), sehingga benar-benar suci-putih tidak terkontaminasi kotoran dari hasrat-hasrat nafsu negatif. Lebih jauh, dimaknai sebagai ketulusan hati berkorban, kesucian pikiran berjuang dan keikhlasan bela negara untuk mendirikan negara Indonesia. Sehingga warna putih diabadikan sebagai warna pada bendera negara.

Dasar Bendera Merah Putih sebagai bendera negara, tertuang dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, bendera Merah Putih merupakan salah satu unsur identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Setiap warga negara Indonesia wajib mencintai identitas nasional bendera negara Merah Putih.

3. Lambang Negara

Negara Indonesia mempunyai lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyannya *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda tetap satu. Diambil dari kutipan buku Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda, yang kepalanya menoleh kesebelah kanan (dari sudut pandang Garuda). Lambang negara Burung Garuda dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, lalu disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Diresmikan pemakaian sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.



Dalam mitologi kuno, Garuda digunakan sebagai kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang rajawali. Secara filosofis menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan

keagungan dan kejayaan. Paru, sayap, ekor dan cakar melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan rincian :

- a. 17 helai bulu pada masing-masing sayap
- b. 8 helai bulu pada ekor
- c. 19 helai bulu di bawah prisasi atau pada pangkal ekor
- d. 45 helai bulu di leher.

Pada burung Garuda Pancasila terdapat Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Dalam perisai terdapat lima ruang sebagai manifestasi dari dasar negara Pancasila, yaitu terdiri dari bintang, rantai, beringin, kepala banteng dan padi-kapas, merupakan uraian dari lima sila dalam Pancasila.

Lambang negara Garuda Pancasila, merupakan salah satu unsur identitas nasional. Berarti memberikan ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia, ke dalam mempunyai kekuatan sebagai salah satu unsur identitas nasional. Berarti memberikan ciri, karakter dan sifat tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kedalam, mempunyai kekuatan sebagai pemersatu dari berbagai perbedaan : suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, keyakinan, budaya, adat istiadat, sistem sosial, perilaku sosial, pandangan dan lainnya. Persatuan dalam keanekaragaman, merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), sebagai potensi dan modal pembangunan nasional.

Ke luar, menginformasikan kepada masyarakat di seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki lambang negara Burung Garuda, sebagai identitas nasional yang memberikan pesan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, bermartabat, berdaulat, tangguh, kuat dan jaya. Kekuatan tersebut tergambar pada makna filosofis burung Garuda Pancasila yang memberikan kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki ketangguhan dan ketahanan nasional yang kuat serta persatuan dan kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam segala bidang kehidupan nasional.

4. Falsafah Negara

Indonesia mempunyai falsafah negara yaitu Pancasila. Falsafah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketetapan MPR No. II/MPR/1979 menyatakan bahwa Pancasila merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa serta sebagai dasar negara Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri atau identitas khas bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain.

Sebagai falsafah negara, Pancasila dinyatakan dalam GBHN 1983 adalah sebagai “satu-satunya asas” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai implementasinya, maka setiap unsur sosial-budaya, organisasi, institusi, kepercayaan, keyakinan dan segala aktivitas bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya (IPOLEKSOSBUD) yang bertentangan dengan Pancasila, dilarang keberadaannya di Indonesia. Seperti tindakan radikalisme, terorisme, SARA, komunisme, liberalisme, organisasi yang tidak berasaskan Pancasila tidak boleh ada dan harus dilarang keberadaannya.

Pancasila sebagai falsafah memberikan ruang hidup yang seluas-luasnya kepada seluruh bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam keanekaragaman suku bangsa, damai dalam perbedaan profesi pekerjaan, harmonis dalam berperilaku, toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan, menghargai keberadaan perbedaan pendapat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, tolong-menolong kepada sesama terutama kepada warga yang tidak mampu, menghormati orang tua (dan lebih tua usianya), memberikan contoh yang baik (teladan) kepada generasi muda, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat, taat pada norma-aturan, tidak kenal menyerah dalam berjuang, cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Selain sebagai falsafah negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia juga menjadi Dasar Negara. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai implementasi, maka segala bentuk keputusan dan kebijakan yang diambil oleh bangsa dan negara, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Termasuk produk hukum yang ada di bawahnya, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Pancasila.

5. Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Syair lagu kebangsaan Indonesia Raya, sarat dengan semangat, motivasi dan gelora kebangsaan yang sangat kental. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan saat Kongres Pemuda II

tanggal 28 Oktober 1928 di Yogyakarta. Komposer musik oleh Wage Rudolf Supratman, sekaligus sebagai pencipta lirik lagu.

Dalam lirik lagu “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” mendorong agar bangsa Indonesia secara terus-menerus membangun jiwa, agar ada keseimbangan dengan pembangunan badan. Ilustrasi ini mencerminkan, pembangunan berawal dari pembangunan kekuatan jiwa (non fisik) mental spiritual. Di dalam jiwa yang sehat terdapat kejernihan pikiran, potensi pembangun dan badan yang sehat. Sedangkan “bangunlah badanya”, diilustrasikan sebagai pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Tatkala dalam kanca perjuangan kemerdekaan, keberadaan lagu Indonesia Raya memberikan semangat yang menyala-nyala dan mendorong untuk segera mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Membangun jiwa identik dengan membangun semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Ini terceminkan dari syair “Indonesia Tanah Air Ku, Tanah Tumpah Darah Ku” dengan semangat cinta tanah air dan bela negara, nasionalisme perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak memperdulikan pengorbanan jiwa maupun darah. Semua dicurahkan demi perjuangan mengejar kemerdekaan, sejak pertama kali dinyanyikan tahun 1928 hingga kemerdekaan 17 Agustus 1945, semangat lagu kebangsaan Indonesia Raya telah berhasil mempersatukan perjuangan, membakar semangat nasionalisme dan mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia.

Dalam perjalanannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, telah menjadi salah satu unsur identitas nasional negara Indonesia. Sehingga dengan jelas, eksistensi lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi resmi sebagai lagu Kebangsaan Indonesia, yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

6. Konstitusi Negara

Konstitusi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disebut sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Konstitusi negara Indonesia UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum. Secara historis, Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Bila diurut sejak kemerdekaan, maka konstitusi sudah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

- a. UUD 1945, 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
- c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia 1950, 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
- d. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) I, 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000.

- e. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) II, 18 Agustus 2000 – 9 Nopember 2001.
- f. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) III, 9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002.
- g. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) IV, 10 Agustus 2002.

Manfaat konstitusi negara adalah untuk memberikan pembatasan kekuasaan. Dalam pengertian bahwa terdapat pembagian kekuasaan secara tegas dan jelas, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, yang telah menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang menolak kekuasaan mutlak, otokrasi dan oligarki sejak kemerdekaan sampai sekarang. Konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Dengan demikian konstitusi bersifat membatasi kekuasaan suatu negara dan mengatur sistem ketatanegaraan.

Konstitusi negara Indonesia mencerminkan identitas nasional yang berbeda dengan konstitusi negara-negara lain di dunia. Memang secara umum, bahwa prinsip negara konstitusional adalah negara yang berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dimana negara tidak memiliki kekuasaan mutlak bersifat absolut atau kekuasaan belaka. Indonesia adalah negara hukum dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya.

7. Semboyan Negara

Negara Indonesia memiliki semboyan atau moto yang sangat khas, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda atau beraneka ragam, tetapi tetap satu. Tulisan *Bhinneka Tunggal Ika*, bersasal dari bahasa Jawa Kuno merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 (Santoso dan Soewito Sutasmoa. 1975 : 578). Semboyan bangsa Indonesia ini tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda Pancasila.

Semboyan negara Indonesia ini sangat tepat, mengingat bangsa Indonesia sangat pluralis atau majemuk. Ada sejumlah 1340 suku bangsa (etnis) dan 1.211 bahasa lokal (BPS. 2010), yang mendiami wilayah kepulauan nusantara dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Untuk dapat menjamin keanekaragaman suku bangsa, sosial budaya, norma, adat-istiadat, kebiasaan, keyakinan, kepercayaan, wawasan dan lain sebagainya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika*, sangat cocok untuk menyatukan visi dan misi bangsa dan negara Indonesia. Sehingga menjadi modal efektif dalam pembangunan bangsa serta keberlangsungan dalam mencapai tujuan nasional Indonesia.

Walaupun beranekaragam tetapi tidak bertentangan; berbeda tetapi harmoni, serta bersatu dalam keberagaman merupakan

pengjawentahan sikap arif, bijak dan sifat luhur bangsa Indonesia. Semboyan ini menjadi salah satu identitas nasional yang memberikan ciri khas karakter bangsa Indonesia. Dengan semboyan ini, bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan dan mengimplemetasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekaligus sebagai bentuk filter danantisipasi terhadap ancaman perpecahan atau disintegrasi bangsa.

8. Bentuk Negara

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lazim disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sifat negara kesatuan adalah tunggal, biasanya terdiri dari beberapa gugusan pulau besar dan pulau kecil, disebut juga *archipelago*. Gugusan pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh perairan (laut) sebagai pemersatu, laut bukan pemisah wilayah pulau satu dengan pulau lain sebagaimana *ordenatie* 1939. Di dalam wilayahnya tidak ada negara bagian dan/atau negara-negara kecil (negara dalam negara) yang memiliki kedaulatan tersendiri.

NKRI sebagai negara bercirikan republik, sistem pemerintahan tidak otoriter, melainkan demokrasi. Ini berarti rakyat berdaulat, dengan kata lain kedaulatan ada ditangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, yang dimandatkan kepada wakil-wakil rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Aspirasi dapat juga disampaikan langsung oleh rakyat melalui berbagai cara menyampaikan pendapat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Dalam hal penyampaian pendapat di muka umum, diwajibkan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (lihat pasal 6). Tidak boleh anarkis, intoleransi, intimidasi, rasis dan diskriminasi karena bertentangan dengan hak asasi dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara kesatuan, setiap insan berhak dan wajib menjaga nilai-nilai dan norma-norma kesatuan dan persatuan bangsa. Keanekaragaman suku bangsa harus dipandang sebagai kekayaan dan modal nasional untuk tetap eksis dalam mencapai tujuan nasional. Kekuatan semangat persatuan akan dapat mengalahkan segala bentuk ancaman dan tantangan yang akan membuat konflik dan perpecahan atau disintegrasi nasional. Oleh sebab itu, NKRI sebagai salah satu identitas nasional harus terus dimantapkan dan diperkuat, sehingga NKRI tetap jaya dan mampu beradaptasi dalam era globalisasi dan pasar bebas dengan tetap mempertahankan eksistensi negara kesatuan. NKR harga mati!

9. Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan. Wawasan secara harfiah berarti pandangan atau tanggapan indrawi, sedangkan nusantara identik dengan wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit dua benua dan dua samudra, yaitu: Benua Australia dan Benua Asia, Samudera Pasifik dan Samudera India.



Sumber : <https://infoindonesiakita.com>. 12 September 2014.

Keberadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada posisi silang, pada satu sisi sangat menguntungkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat strategis, berada pada jalur perdagangan internasional. Pada sisi lain, posisi silang dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan integritas dan identitas bangsa Indonesia.

Pemahaman pengetahuan (*knowledge*) dan pengaplikasian sikap dan tindakan (*attitude* dan *softskill*) wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia merupakan *conditio sine quanon* bagi setiap bangsa Indonesia. Hal ini sangat penting, sebab dengan mengetahui secara fisik keberadaan wilayah NKRI yang (1) berdaulat di wilayah darat seluruh kepulauan Indonesia, (2) berdaulat di wilayah perairan (laut) Indonesia dengan dasar ratifikasi hukum laut internasional (UNCLOS), terhadap keberadaan Deklarasi Djuanda dengan panjang wilayah laut 12 mil dari garis pantai, Deklarasi Landas Kontinen yang berdaulat di dasar laut dan di dalam landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia suatu zona perdagangan dan perikanan sepanjang 200 mil dari garis pantai. (2) berdaulat di wilayah udara setinggi 36.000 km di ruang dirgantara Indonesai termasuk wilayah khatulistiwa.

Begitu pentingnya konsepsi dasar wawasan nusantara untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah secara fisik dan juga satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) sehingga dapat dijadikan salah satu

wujud identitas nasional agar setiap warga negara Indonesia selalu dalam kerangka berpikir, bersikap dan bertindak untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

10. Kebudayaan Daerah

Seluruh kebudayaan daerah yang sudah diterima sebagai sistem sosial budaya bangsa Indonesia adalah kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah merupakan unsur-unsur budaya yang mengisi kebudayaan nasional, tanpa kebudayaan daerah maka tidak akan pernah ada kebudayaan nasional. Secara teoritis, melalui pendekatan antropologi budaya, Koentjaraningrat (1985 : 180) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia belajar. Melalui pendekatan sosiologi, Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi (1964) mendefinisikan kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Mengacu dari pendapat kedua pakar tersebut, bila digali lebih mendalam maka kebudayaan daerah merupakan kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Dipastikan bahwa kebudayaan daerah, merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat daerah setempat. Negara Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak dan plural, secara langsung memberikan corak dan warna budaya tersendiri yang berbeda-beda pula. Perbedaan tampilan kebudayaan itu, tidak lain sebagai sumbangan kebudayaan daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan nasional merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah yang berkualitas dan membentuk identitas nasional.

Sebagai salah satu unsur identitas nasional, kebudayaan daerah diharapkan tetap eksis, dilestarikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berarti setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah masing-masing agar tidak hilang ditelan pengaruh globalisasi, infiltrasi budaya dan hegemoni kebudayaan yang mengancam luntur dan hilangnya kebudayaan sendiri, sebagai kebudayaan daerah yang berada di wilayah NKRI.

Daftar Pustaka

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri
- Ridhuan, Syamsu & Waid, Aliaras. 2019. *Pendidikan Kewargangaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul.
- Rawlins E.A. 1993. *Bently's Texbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Kompotindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Suroyo, Djuliati. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fukutas Sasra, UNDIP Semarang.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

MODUL 5 INTEGRASI NASIONAL



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang integrasi nasional untuk membentuk sikap dan kepribadian cinta tanah air dan bertekad pribadi untuk mampu melaksanakan kewajiban bela negara secara sepanjang hayat.

Pengantar

Bahan pembelajaran modul kelima ini adalah integrasi nasional. Menyangkut pengertian integrasi nasional, bentuk-bentuk integrasi nasional terdiri dari : (1) integrasi wilayah nusantara, (2) integrasi ideologi, (3) integrasi politik, (4) integrasi ekonomi, (5) integrasi social budaya dan (4) integrasi pertahanan keamanan. Lalu faktor-faktor integrasi dan disintegrasi nasional, dalam penjabarannya diambil dari hasil penelitian yang relevan dengan pengakajian integrasi dan disintegrasi. Serta peran tokoh etnik dan integrasi nasional.

Negara Indonesia yang terkenal dengan kemajemukan penduduk mulai dari keberagaman suku bangsa, bahasa, agama, norma-norma, adat-istiadat, sistem sosial, kebudayaan, sampai kepada kebiasaan yang telah menjadi tradisi lokal (*local wisdom*). Bahkan wilayah teritorial negara Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil, yang dihubungkan oleh perairan (laut), sehingga sangat membutuhkan **integrasi nasional**. Integrasi akan membuat menjadi kuat dan jaya, sebaliknya disintegrasi akan menjadikan kehancuran dan runtuhnya suatu negara. Rawat persatuan dan jaga integrasi nasional agar NKRI tetap jaya.

Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional terdiri dari 2 (dua) kata. "Integrasi" berasal dari bahasa Inggris *integration* artinya pembauran. Pembauran dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang utuh. Kata "Nasional" berasal dari bahasa Inggris *nation* artinya bangsa, rakyat, atau negara. Maka secara etimologi integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Pengertian ini sangat cocok untuk menyebut integrasi nasional Indonesia. Negara Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa, budaya, sistem sosial, norma dan adat-istiadat. Oleh sebab itu, perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya.

Secara teoritis, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (2006) menyebutkan integrasi sebagai proses pembangunan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Sedangkan integrasi nasional menurut Saafaroedin Bahar (1996 dalam Ristek Dikti. 2016) menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Noer Arfani (2001),

integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan beberapa kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Djuliaty Suroyo (2002) menjelaskan bahwa integrasi nasional sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya, Ramlan Subekti (2010) mengungkapkan bahwa integrasi bangsa sebagai suatu proses penyatuan beberapa kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional.



Dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional, merupakan suatu proses mempersatukan bagian-bagian, unsur-unsur atau elemen-elemen yang terpisah kedalam satu wadah dari masyarakat yang beraneka ragam suku, bangsa, kebudayaan, adat-istiadat, agama dan ras menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh sehingga menjadi satuan-kesatuan bangsa yang besar yang memiliki identitas sama sebagai ikatan emosional sebangsa dan setanah air.

Bentuk-Bentuk Integrasi Nasional

Dalam implementasi konsepsi wawasan nusantara, integrasi nasional merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nusantara, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Integrasi Wilayah Nusantara

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) berarti pengintegrasian seluruh gugusan pulau besar dan kecil yang berada di ruang (*space*) wilayah teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia.

Bukan negara pulau (*island state*) sebab negara pulau hanya terdiri satu pulau besar yang dikelilingi oleh perairan (laut). Sedangkan negara kepulauan bermakna jumlah pulauanya banyak berserak tersebar dalam satu wilayah negara yang dihubungkan oleh perairan (laut). Jadi secara jelas, bahwa negara kepulauan diintegrasikan, dihubungkan dan disatukan oleh perairan (laut).

Integrasi wilayah nusantara, merupakan perwujudan satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah nusantara. Terbang dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh 2 (dua) benua, Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara 2 (dua) samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Jumlah pulauanya lebih kurang 17.504 pulau (BPS. 2010). Sebagai konsekwensi logis, negara Indonesia harus mampu menjaga keutuhan wilayah nusantara. Tidak boleh satu jengkalpun wilayah nusantara diambil secara paksa oleh negara lain maupun dijual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan air adalah milik negara, dalam hal ini negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, keutuhan wilayah merupakan harga mati. Moto ini lazim didengung-dengungkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati! Tidak boleh ada pemisahan wilayah dengan modus referendum untuk merdeka atau dengan paksaan melalui serangkaian gerakan separatis yang pada akhirnya membentuk negara merdeka. Gerakan separatis adalah salah satu bentuk makar yang bertujuan untuk memecah belah wilayah Indonesia dan membentuk negara sendiri yang berdaulat. Beberapa gerakan separatis diantaranya: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan Gerakan Papua Barat Merdeka. Gerakan-gerakan separatis ini sungguh bertentangan dengan hakikat integrasi nasional dan secara yuridis formal telah melanggar UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, keberadaannya tidak dibenarkan dan dilarang.

Dalam rangka menjaga keutuhan integrasi wilayah nusantara, maka pemekaran wilayah otonom sangat diperlukan. Sekaligus sebagai suatu solusi untuk meminimalisir dan menangkal keberadaan gerakan makar dan separatis untuk yang bertujuan membentuk negara. Pemekaran wilayah otonom menjadi suatu kebutuhan penting bagi negara kepulauan karena akan dapat (1) memperpendek rentang kendali pembangun wilayah, (2) melakukan pendistribusian sebagai tugas-tugas pemerintah kepada daerah, dan (3) pada akhirnya dapat mempercepat kemajuan daerah. Jadi sangat jelas perbedaan antara makar dan mekar. **Makar** untuk keperluan kelompok separatis membentuk wilayah merdeka terpisah dengan NKRI, sedangkan **Mekar** atau pemekaran untuk keperluan pembangunan bangsa yang berkontribusi sangat kuat dalam memperkuat integrasi nasional.

2. Integrasi Ideologi

Pancasila adalah Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai ideologi, jelas Pancasila dipandang mampu mewujudkan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Anjuran integrasi terlihat pada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada bangsa yang sangat pluralis, ideologi Pancasila mendapatkan tempat paling utama dan

terutama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan doktrin nasionalisme yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia memiliki wawasan, cara pandang dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai sistem nilai keberadaban, kemartabatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, diketahui juga bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan sumber hukum tidak boleh eksis di bumi nisantera ini. Misalnya: organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, gerakan-gerakan saporatis, makar dan anarkis bertentangan dengan Pancasila. Sehingga apapun aktivitas, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat membuat perpecahan bangsa dan negara dilarang keberadaannya di NKRI.

3. Integrasi Politik

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani, *politeia*, terdiri dari 2 (dua) suku kata. *Polis* artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. *Teia*, berarti urusan. Jadi politik adalah kesatuan masyarakat yang mengurus negara. Secara terminologi, politik berasal dari bahasa Inggris : *politic* dan *policy*. *Politic* mempunyai arti sebagai serangkaian asas, prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan *policy*, bermakna kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (negara) untuk kepentingan masyarakat agar keadaan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Implementasi politik dapat berupa urusan ketatanegaraan, sistem pemerintahan, berbagai aktivitas pencapaian tujuan, tindakan menyangkut siasat dan kebijaksanaan negara dan/atau pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Menurut Miriam Budiarmo (2008), politik merupakan rangkaian kegiatan menyangkut penentuan dan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan masyarakat bukan tujuan pribadi. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan.

Integrasi politik dapat dimaknai sebagai kesatuan politik untuk pembangunan bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Aktivitas, cara, bentuk, gaya dan strategi politik berbeda-beda. Politik dalam bentuk aktivitas merupakan segala bentuk kegiatan mulai dari perorangan, kelompok, organisasi, partai, pemerintah dan negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap pelaksanaan aktivitas dipastikan selalu menggunakan cara, gaya, strategi dan bentuk yang ditentukan oleh pelaku politik. Keanekaragaman cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik merupakan refleksi dari kehidupan yang demokratis. Akan tetapi perlu diingat bahwa dasar dan asas aktivitas harus ada jaminan sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang mengikat. Dalam pengertian yang mengintegrasikan aneka ragam cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas

politik, harus menjadi satu kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional.

Contoh integrasi politik melalui aktivitas partai politik di Indonesia. Pada Pemilu 2014, dari 24 Partai Politik yang mendaftar, ternyata hanya 10 yang dinyatakan lulus verifikasi dan berhak ikut Pemilu. Begitu juga untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) telah melakukan verifikasi 27 Partai Politik yang mendaftar dan memastikan hanya 14 yang dinyatakan lulus bisa ikut Pemilu tahun 2019 (KPU. 2017). Bila diamati cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik dari seluruh Partai Politik peserta Pemilihan Umum, jelas-jelas berbeda-beda antara satu Partai Politik dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut relatif sah dan wajar, sebab menyangkut hak asasi Partai Poltik. Tujuan jangka pendek adalah bagaimana memenangkan pemilu dengan menempatkan wakil partai menjadi wakli rakyat di lembaga legislatif pusat dan daerah sebanyak-banyaknya. Tujuan jangka panjang sama dengan partai politik lain yaitu mensukseskan pencapaian tujuan nasional Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Integrasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional pada prinsipnya merupakan serangkaian proses integrasi dari beberapa bentuk, prinsip, cara, model dan strategi ekonomi yang ada di bawahnya. Indonesia memiliki bentuk pembangunan ekonomi masyarakat dengan model pemberdayaan koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik. Pengaruh sistem perekonomian neo liberal, etatisme dan konglomerasi pemodal kuat mengakibatkan model ekonomi koperasi tenggelam dalam ketidakberdayaan. Sangat disayangkan, ekonomi koperasi sebagai ciri khas ekonomi ke-Indonesia-an dipandang hanya sebagai pelengkap dari salah satu integrasi nasional dalam bidang ekonomi.

Semangat integrasi ekonomi yang bercirikan ke-Indonesia-an, memang masih tetap ada. Namun kenyataan koperasi memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Kelemahan pengelolaan koperasi menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu permodalan, manajemen dan konsinyasi. Sedangkan fakta ekonomi pasar yang neo liberalis saat ini berkembang pesat, sebab sistem ekonomi neo liberalis ini memiliki keunggulan ketiga-tiganya yang justru menjadi kelemahan dari sistem ekonomi koperasi. Belum lagi adanya pasar bebas yang telah berlangsung dewasa ini, memerlukan daya saing yang tinggi dan perlu kompetisi yang tangguh. Alhasil, model-model sistem perekonomian tradisional sampai pada sistem ekonomi koperasi akan makin jauh tertinggal jika tidak mampu berkompetisi dan beradaptasi dengan performa dan kualitas yang tinggi.

Dalam kaitan dengan aktivitas ekonomi nasional agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka konsep integrasi ekonomi menurut Kemristek-Dikti (2016 : 61): integrasi ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antara daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan, menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan

dan sinergis (mutual simbiosis). Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya: peraturan, norma, prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan dalam bidang ekonomi.

Dalam skala nasional integrasi ekonomi perlu ada payung hukum yang mengatur, melindungi dan memperkuat perekonomian daerah yang sudah terhubung. Baik antardaerah, maupun antara daerah dan pusat supaya mampu bersaing dan berkompetisi dalam menghadapi pasar bebas (free trade) dan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

5. Integrasi Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan bangsa yang pluralistik, majemuk dan beranekaragam suku bangsa, bahasa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, dan sistem sosial. Jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 1.340 suku bangsa atau etnis (BPS. 2010) ditambah warga keturunan Tionghoa, India, Arab dan Kaukasia yang sudah bertahun-tahun, beranak-cucu menjadi warga negara Indonesia membuat keanekaragaman makin meningkat jumlahnya. Tentu masing-masing mempunyai ikatan emosional dan primordial terhadap sesama etnis. Begitu pula bahasa daerah/lokal menurut data BPS (2010) tercatat sebanyak 1.211 bahasa daerah/lokal, ditambah bahasa asing asal warga keturunan menjadi semakin bertambah banyak bahasa lokal yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dalam lingkup keluarga atau etnis yang sama.

Integrasi sosial budaya pada intinya adalah kemampuan setiap etnis beradaptasi, menerima dan bertoleransi atas eksistensi keaneka-ragaman suku bangsa, bahasa daerah/bahasa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, sistem sosial-budaya yang berada di dalam lingkup wilayah nusantara Indonesia menjadi suatu kebersamaan yang kuat dan utuh. Kesetiaan baru adalah kesetiaan terhadap tanah-air Indonesia, semangat baru adalah semangat kebangsaan - nasionalisme Indonesia. Sebagai pengikat adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Tidak ada yang boleh melakukan tindakan pecah-belah terhadap bangsa dan negara Indonesia. Maka integrasi nasional merupakan pilihan yang amat bagus untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis merangkai kata seperti ini : “Biarkanlah unsur-unsur sosial budaya bangsa ini mewarnai integrasi nasional karena sesungguhnya kebersamaan dalam perbedaan adalah rahmat Tuhan YME dan semakin menikmati akan semakin indah adanya”. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diragukan atas kehadiran sosial budaya bagi kuatnya integrasi sosial budaya. Justru yang harus diwasadai dan dantisipasi adalah pengaruh negatifnya berupa masuknya unsur-unsur sosial budaya luar ke Indonesia. Infiltrasi sosial dan hegemoni kebudayaan telah membentuk penjajahan baru di bidang sosial budaya pada negara-negara baru tidak terkecuali Indonesia. Makin kuat integrasi sosial budaya bangsa, akan makin kuat integrasi sosial budaya nasional. Akibatnya, pengaruh negatif dari unsur-unsur sosial budaya

asing dapat diatasi dan ditolak agar tidak mengerus dan melunturkan integrasi sosial budaya nasional Indonesia.

6. Integrasi Pertahanan Keamanan

Fungsi pemerintahan bidang pertahanan dan keamanan mutlak diperlukan dalam menjalankan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi pertahanan memberikan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Sedangkan fungsi keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kedua fungsi pemerintahan ini harus bersinergi dan berintegrasi agar tercipta suasana yang aman, tenteram, kondusif, demokratis, dinamis dan harmonis. Itu sebabnya dalam konteks bela negara, fungsi pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri) merupakan unsur utama sedangkan masyarakat sebagai unsur pendukung terkait dengan hak dan kewajiban dalam pembelaan terhadap negara.

Dalam membangun yang bersifat partisipasi aktif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, muncul inisiatif perorangan, kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, institusi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya membentuk kesatuan-kesatuan, gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain yang berasal dari unsur masyarakat sipil dengan semangat bela negara memberikan bantuan untuk tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan dan niat yang terkandung dan tersirat di dalamnya secara filosofis bagus, namun dalam implementasi bila tidak hati-hati dan kurang pengawasan dari aparaturnya dan masyarakat, sering berlangsung tidak sesuai dengan tujuan untuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sering melawan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formalnya. Sehingga perlu dievaluasi dan dikembalikan pada fungsinya agar partisipasi dalam bidang pertahanan dan keamanan benar-benar terpenuhi.

Integrasi pertahanan dan keamanan pada hakekatnya adalah terlaksananya hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Salah satu bentuk refleksi bela negara adalah kewajiban memberikan rasa aman, tenteram, tertib dan kondusif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh warga negara, baik secara orang-perorangan, kelompok-kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, institusi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kesatuan-kesatuan keamanan (Banser), gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain, dalam melaksanakan kewajiban bela negara menjaga negara dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri, menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan harus bersinergi dan berintegrasi dalam satu komando. Untuk bidang pertahanan dibawah komando Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan bidang keamanan dan ketertiban dibawah komando Polisi Republik Indonesia (Polri).

PEMBAURAN

DALAM ARTI INTEGRASI BANGSA



Faktor-Faktor Integrasi dan Disintegrasi Nasional

Kondisi integrasi nasional selalu mengalami pasang-surut dan dinamis mengikuti perkembangan tingkat ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Makin tangguh tingkat ketahanan nasional, makin kuat pula ikatan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kuatnya ikatan integrasi nasional. Hipotesis ini diambil dari berbagai informasi tentang implementasi ketahanan nasional yang mencakup pancagatra dan trigatra (astagatra). Pancagatra meliputi ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAN). Sedangkan trigatra mencakup : (1) posisi dan letak geografi Indonesia, (2) aspek keadaan dan kekayaan alam, serta (3) keadaan dan kemampuan penduduk.

Integrasi nasional mencakup kesediaan untuk membaur dan beradaptasi dalam segala perbedaan. Hasil penelitian Ridhuan (2017) tentang *national integrity* atau pembauran bangsa mengungkapkan bahwa pembauran bangsa atau integrasi nasional dalam perspektif beda suku bangsa dan beda agama justru memberikan kekuatan persatuan dari dua etnis berbeda. Terjadi pembauran alami baik perkawinan secara biologis, maupun perkawinan ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berikut penulis kutip hasil wawancara penelitian, mengenai pembauran bangsa (*national integrity*) dalam perspektif beda suku bangsa, beda agama dan berkembangnya isu SARA, sebagai berikut :

Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti dibantu *interviewer*, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum, Leny Herlina NPM. 20160401262 mewawancarai beberapa responden terkait dengan pengaruh sosial media dan eksistensi isu sara yang akhir-akhir ini kian berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Interviewer telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak dan berikut ini merupakan transkrip hasil

wawancara mengenai faktor-faktor pembauran kebangsaan (*national integrity*).

Pertanyaan utama:

1. Seperti yang kita lihat bahwa keadaan isu SARA di dunia maya dan media sosial begitu panas padahal pada prakteknya tidak demikian. Menurut Anda apakah yang menjadi penyebab kejadian demikian?
2. Bagaimana menurut Anda mengenai perkawinan antaretnis, apakah sudah membantu pembauran kebangsaan?

Jawaban/Pendapat interviewee:

1. Berikut merupakan jawaban/pendapat Christie (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga keturunan Tionghoa dan menikah dengan etnis Pribumi dari suku Jawa:

Menurut Christie diungkap bahwa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dunia pekerjaan, pendidikan dan bermasyarakat sudah tidak ada lagi namanya gesekan-gesekan dalam artian perbedaan etnis. Menurutnya, asal-muasalnya adalah kesenjangan sosial. Menurut Christie, panasnya isu SARA yang marak di media sosial adalah murni karena kepentingan politik yang mengangkat isu SARA untuk mengadu domba masyarakat, namun setelah kepentingan politik ini usai, masyarakat menjadi rukun kembali.

Pertanyaan lanjutan:

2. Mengapa masyarakat Pribumi lebih menerima etnis Kaukasian, India, Arab dibandingkan dengan orang Tionghoa?

Menurut Christie penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang membawa perbedaan besar antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa, dan juga menurutnya hal ini dikarenakan etnis Kaukasian, India dan Arab adalah murni pendatang yang menetap dan berbisnis di Indonesia. Sedangkan warga Tionghoa hidup berbaur sebagai warga sejak zaman penjajahan, ikut berjuang bersama dalam memerangi penjajah dan sudah diakui menjadi bagian warga Indonesia sejak dulu, sehingga dalam hal kesenjangan sosial yang menjadi perbandingan adalah hanya antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa.

Pendapat Christie perihal pernikahan antar etnis dan suku:

Menurut Christie ternyata dalam pernikahan antaretnis tetap ada jarak (*gap*) antara keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki dan menurutnya, sekalipun dalam pernikahan antara etnis Pribumi dengan etnis Pribumi juga pasti tetap ada jarak (*gap*) antara para keluarga besar masing-masing. Karena sekalipun dari etnis yang sama namun perbedaan suku juga terdapat perbedaan sifat dan kebudayaan, misalnya suku Jawa dengan suku Flores.

Tapi kerukunan dalam pernikahan semuanya tergantung dari pribadi dan sifat masing-masing pasangan dan pihak keluarga besar masing-masing pasangan. Namun, cekcok (perselisihan) dalam pernikahan

utamanya bukan dikarenakan perbedaan etnis, karena sekalipun pernikahan dari etnis yang sama juga sering terjadi pertikaian antara suami dan istri. Christie mengatakan bahwa ia tidak pernah membawa perbedaan etnis dalam pertengkaran. Tetapi, memang tidak dipungkiri para orang tua/keluarga besar sebenarnya menginginkan menantu dari etnis yang sama karena alasan perbedaan cara berpikir, kebudayaan dan sifat.

3. Berikut merupakan jawaban/pendapat menurut Natalia (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga Pribumi dan merupakan anak dari hasil pernikahan antaretnis Pribumi dari suku Jawa dan Manado:

Menurut Natalia sebenarnya sejak lahir di dalam hati manusia selalu ada toleransi, namun maraknya kasus diskriminasi terhadap etnis tertentu baik di dunia maya dan di dunia nyata sangat melunturkan sifat toleransi terhadap sesama. Dan menurut Natalia penyebab isu SARA di media sosial lebih panas adalah murni dikarenakan pengetahuan yang minim, gaya-gayaan dan ikut-ikutan membela suku/agamanya atau membela si A atau si B tanpa menyelidiki secara betul seluruh kebenarannya. Warga dunia maya hanya berani mengungkapkan kebencian yang membabi-butakan melalui media sosial padahal kenyataan yang terjadi di dunia nyata tidak ada pertengkaran antaretnis seperti yang terjadi di dunia maya semuanya baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Menurut Natalia apa yang terjadi di dunia maya atau media sosial murni hanya karena gaya-gayaan dan ikut-ikutan dan dasarnya bukan karena perasaan benci.

Pendapat Natalia perihal pernikahan antaretnis dan suku:

Menurut Natalia mengenai pernikahan antarsuku yang berbeda sebenarnya cukup berhasil membaurkan rasa kebangsaan, karena dalam keluarga yang berbeda suku, dalam hal cara berpikir dan sifat antara suku Jawa dan Manado tidak ada masalah antaretnis dan justru meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Namun memang tidak dapat dipungkiri pernikahan antaretnis Pribumi dan Tionghoa menurut Natalia memang lebih sulit diterima dan menurutnya hal tersebut dikarenakan alasan sejarah yaitu memilah-milah dan membedakan pelayanan dan perlakuan dalam hukum dan bermasyarakat antara etnis Eropa, Timur asing, Tionghoa dengan Pribumi yang terbawa hingga kini, khususnya perbandingan antara etnis Tionghoa dengan Pribumi yang semakin meruncing karena memang tujuan awal Belanda sebagai penjajah adalah ingin memecah-belah bangsa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara *interviewer* dengan *interviewee* adalah dalam perihal kehidupan bermasyarakat ternyata tidak ada gesekan atau pertengkaran serta caci maki secara nyata perihal etnis atau suku bangsa antara yang satu dengan lainnya. Dalam dunia kerja, pendidikan, dan bermasyarakat pada kenyataannya semua hidup dengan rukun dan tidak ada bahasan yang menyinggung hal SARA apalagi sampai bertengkar karena hal tersebut. Namun, harus diakui isu SARA sangat sensitif sehingga kita sebagai warga yang menjunjung tinggi

sikap toleransi selalu berusaha tidak terlalu membicarakan hal tersebut secara terbuka.

Asal-muasal isu SARA ini sebenarnya tercipta pada masa penjajahan Belanda. Pembagian-pembagian terhadap etnis-ethnis menjadi etnis Eropa, Timur Asing, Tionghoa dan Pribumi dan tidak adilnya pelayanan dan perlakuan Penjajah Belanda saat itu memicu ketidaksenangan warga etnis tertentu.

Dari seluruh etnis di Indonesia yakni etnis Kaukasian, India, Arab, Tionghoa dan Pribumi, harus diakui yang seringkali menjadi perbandingan hanyalah antara etnis Pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan karena **nenek moyang warga keturunan Tionghoa telah berbaur sejak dahulu** dengan warga asli etnis Pribumi. Warga keturunan Tionghoa telah hidup bermasyarakat, beranakcucu dan berbahasa Indonesia.

Karena terciptanya kesenjangan ekonomi baik secara sengaja maupun tidak antara warga asli etnis Pribumi dan warga keturunan etnis Tionghoa maka tercipta pula kesenjangan sosial yang melahirkan jarak antara kedua etnis tersebut. Jarak yang tercipta ini menyebabkan rapuhnya hubungan emosional antara keduanya sehingga sedikit saja tersulut akan menimbulkan perasaan benci yang luar biasa. Hal ini pernah dan sering dijadikan senjata oleh para oknum politik untuk memecah belah bangsa demi tujuan politiknya.

Isu SARA menjadi sangat panas di dunia maya dikarenakan murni kepentingan politik dan lemahnya iman dan pengetahuan serta mudah tersulutnya emosi warga Indonesia.

Dalam hal pernikahan berbeda etnis dan suku di Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam mewujudkan pembauran kebangsaan, namun memang harus diakui bahwa keberhasilan pernikahan antara etnis/suku Pribumi dengan sesama etnis/suku Pribumi lebih berhasil diterima dan berbaur dibandingkan dengan pernikahan etnis Tionghoa dengan etnis/suku Pribumi. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat antara warga etnis Pribumi dengan warga keturunan etnis Tionghoa.

Interviewer berhasil mewawancarai pasangan berbeda etnis/suku yakni pasangan Jawa-Tionghoa dan Jawa-Manado, dan dari hasil wawancara, Penulis berkesimpulan bahwa tidak ada masalah yang menyangkut etnis dalam pernikahan berbeda etnis/suku, justru pernikahan tersebut menciptakan rasa toleransi dalam kehidupan berkeluarga baik dalam hubungan pasangan tersebut maupun oleh keluarga besar kedua belah pihak. Namun memang harus diakui bahwa kedua orang tua masing-masing pasangan sebenarnya lebih setuju apabila anak mereka menikah dengan etnis/suku yang sama, dikarenakan alasan perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat.

Dari hasil interview di atas dan digabung dengan hasil interview yang lain, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembauran kebangsaan dalam arti biologis sudah berlangsung sejak dulu. Akan tetapi, ada hambatan yang berarti dalam bidang agama/keyakinan dan paham kebangsaan yang sempit (*chauvinis*).

Sedangkan toleransi dan harmonisasi dalam keluarga beda etnis dan beda agama tidak menjadi faktor penghambat pembauran. Pertengkaran dalam keluarga beda etnis dan agama dan/atau sudah satu agama bukan disebabkan faktor asal-usul etnis, lebih disebabkan oleh faktor ekonomi.

2. Dalam persepsi pembauran ipoleksosbud pernikahan beda etnis antarpribumi, beda agama serta beda etnis pribumi dengan etnis Tionghoa meningkatkan sikap toleransi yang tinggi, tercipta hubungan harmonis serta terjadi adaptasi kemudian dapat bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan dapat melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
3. Isu SARA yang marak di media sosial, murni dari adanya kepentingan politik tertentu. Tujuan untuk mengadu domba masyarakat agar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa. Secara historis hal itu diciptakan penjajah Belanda agar Indonesia terpecah belah.

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut dapat diungkap faktor-faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional adalah sbb:

1. Toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa,
2. Asimilasi, perkawinan campuran (biologis dan ipoleksosbud),
3. Komunikasi antarpersonal yang sejuak,
4. Solidaritas sosial yang tinggi dan
5. Dorongan pemerintahan yang terus menerus.

Sebaliknya ada beberapa faktor yang dapat menciptakan disintegrasi sosial atau perpecahan bangsa, antara lain:

1. Eksklusivisme - kelompok masyarakat yang menghindari pembauran
2. Chauvinisme - memiliki faham kebangsaan yang sempit, menganggap etnis lain lebih rendah.
3. Makar, kekerasan bersenjata dan terorisme.

Peran Tokoh Etnik Dalam Integrasi

Tokoh etnik, lazim disebut tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Sebab tokoh etnik memiliki kewibawaan dan kekuatan sosial dalam berperan menenteramkan dan membuat situasi menjadi kondusif. Para tokoh dapat berperan mengendalikan ketegangan sosial, mengantisipasi konflik dan penyelesaian persengketaan. Zaman dahulu, tokoh-tokoh etnik inilah yang tampil mendamaikan setiap ada pergolakan, pertentangan (konflik), pertikaian, perbuatan kriminalitas dan menyelesaikan melalui pendekatan budaya, adat-istiadat (hukum adat), sehingga tidak semua persengketaan dan perbuatan kriminal harus diproses menurut hukum formal.

Para tokoh etnik biasanya secara informal pasti memimpin komunitas etnisnya. Mereka diangkat dan diakui sebagai pemimpin etnik karena memang memiliki kelebihan, kewibawaan dan keistimewaan oleh paguyuban komunitas etnik tersebut. Paguyuban (*gemeinsschaft*) merupakan bentuk kehidupan bersama dimana para anggota diikat hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal.

Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah ditakdirkan berada dalam satu komunitas yang guyub. Terbentuknya paguyuban dilatarbelakangi 3 (tiga) faktor, (1) pertalian darah berdasarkan garis keturunan (*gemeinschaft by blood*), (2) berdasarkan tempat (*gemeinschaft by place*) terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong, (3) guyub karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*) terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berdekatan tetapi mereka mempunyai pikiran dan jiwa yang sama atau satu ideologi.

Keberadaan tokoh etnik yang alami atau asli biasanya menjabat sebagai kepala suku dan/atau kepala adat. Dulu dan bahkan sampai sekarang (meskipun sudah sedikit agar luntur pengakuannya) para tokoh etnik - kepala suku dan/atau kepala adat -berperan besar dalam pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan etnis maupun wilayah dimana mereka berada.

Bila di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 etnik (BPS 2010), maka sejumlah itu juga adanya kepala etnik yang menjadi pemimpin informal pada komunitasnya. Dalam model kepemimpinan kolektif, kepemimpinan kepala suku/etnik dapat dipersatukan ke dalam suatu kepemimpinan yang lebih besar cakupannya. Misalkan dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi terdapat beberapa suku/etnik yang bermukim di wilayah tersebut, maka melalui musyawarah antara etnis yang difasilitasi pemerintah daerah dapat mengambil kesepakatan dan menetapkan salah seorang yang berasal dari satu etnik di lingkup wilayah itu untuk menjadi ketua adat. Sebagai pemimpin informal yang merepresentasikan seluruh suku/etnis dalam lingkup wilayah kerjanya dan akhirnya, ketua adat dipandang sebagai figur yang dapat memberikan kontribusi bagi ketenteraman, keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

Upaya pemerintah dalam memperkuat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34/2006. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap, agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan forum pembauran kebangsaan adalah representasi dari masing-masing etnik dalam lingkup wilayah provinsi untuk keanggotaan forum pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota untuk keanggotaan forum pada tingkat kabupaten/kota.

Para tokoh etnik bekerja memberikan bantuan kepada pemerintah NKRI dalam rangka menenteramkan dan menciptakan kondisi kondusif. Pekerjaan menyangkut ajakan-ajakan pencegahan (preventif) kepada seluruh anak bangsa, dengan melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pembauran bangsa atau integrasi nasional. Apabila sudah terjadi fenomena perpecahan, maka tugas utamanya memberikan rasa nyaman dan tenteram dengan membantu penyelesaian secara persuasif dan restoratif.

Persuasif artinya melakukan tindakan untuk dapat mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Dengan mengambil istilah suku bangsa Minang “bulat air di pembulu, bulat kata di mufakat” sehingga tidak perlu terjadi kekerasan dan anarkis yang dapat membuat luka dendam makin dalam. Tetapi justru sebaliknya dapat mendamaikan yang berseteru dan menghamoniskan kehidupan. Restoratif artinya penyelesaian persoalan dimasyarakat yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan, dengan cara memainkan peran adat istiadat, budaya dan norma untuk mencari solusi yang damai bukan memberikan *funishment* yang dapat meningkatkan naiknya tensi dan suhu politik akibat hukuman yang dipadang tidak memberikan rasa adil dan tidak mengedukasi. Namun apa bila sudah tidak dapat diselesaikan lagi secara restoratif, maka ditempuh melalui jalur penegak hukum melalui proses peradilan, agar mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

Daftar Pustaka

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.

- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri
- Ridhuan, Syamsu & Waid, Aliaras. 2019. *Pendidikan Kewargangaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul.
- Rawlins E.A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

MODUL 6

WAWASAN NUSANTARA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang wawasan nusantara untuk membentuk sikap cinta tanah air dan bertekad mampu untuk melaksanakan kewajiban bela negara sepanjang hayat.

Pengantar

Bahan pembelajaran pada modul keenam ini adalah Wawasan Nusantara, merupakan inti dari Pendidikan Kewarganegaraan (dulu Pendidikan Kewiraan). Bahan pembelajaran yang inti lainnya adalah Ketahanan Nasional, sedangkan bahan pembelajaran atau pokok bahasan-pokok bahasan yang lain merupakan pendukung dari pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Esensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah memberikan kemampuan (*softskill*) bela negara. Sedangkan komponen bela negara adalah cinta tanah air dan ketangguhan, yang secara detail akan disajikan pada modul ketujuh. Untuk dapat mengetahui, mengerti dan memahami akan makna cinta tanah air, maka salah satu pokok bahasan pembelajaran yang sangat penting sebagai pembentuk domain tersebut adalah Wawasan Nusantara.

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologi wawasan nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan nusantara. Wawasan merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Jawa. **Wawas** mengandung arti melihat, memandang. **Wawasan** berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Jadi, wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa, sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Berisi dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan agar dapat mewujudkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan dalam mencapai tujuan hidup. Makna wawasan juga sebagai pantulan (refleksi) dan pancaran dari falsafah hidup, yang berisi asas-asas, metode dan isi cita-cita.

Nusantara berasal dari dua kata yakni **nusa** berarti pulau. Berupa pulau-pulau yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia/Indonesia). Kemudian kata **antara** diartikan sebagai tanah air Indonesia, yaitu kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak diantara dua samudera Pasifik dan Hindia/Indonesia dan dua benua Asia dan Australia (Lemhanas. 1997 : 3).

Dalam buku Kewiraan Untuk Mahasiswa (Lemhanas. 1995: 16-17), secara runut didefinisikan wawasan nasional dan wawasan nusantara sebagai berikut :

1. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggap indrawi.

2. Istilah nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk yang berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan bernegara dan menegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai suatu bangsa yang telah menegara. Dengan demikian, maka arti *wawasan nasional* adalah cara pandang suatu bangsa yang perwujudannya atau manifestasinya ditentukan melalui dialog dinamis dari bangsa tersebut dengan lingkungan sepanjang sejarahnya, dengan kondisi objektif, geografis maupun kebudayaannya sebagai kondisi subjektif, serta idealistis yang dijadikan aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dijadikan aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Karena itu memiliki identitas yang khas pada jiwa bangsa dan memiliki identitas yang khas pada jiwa bangsa tersebut yang menuntun atau menggerakkan segenap tindak kebijaksanaannya.
3. Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia. **Wawasan Nusantara** diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

Dari buku *Wawasan Nusantara* (Lemhanas. 1997 : 3) wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang serba nusantara dan lingkungan dunia yang serba berubah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografisnya, dalam upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional maka Wawasan Nusantara disingkat menjadi WASANTARA.

Menurut Syarbaini dan Wahid (2015 : 179) Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Definisi ini sama persis dengan yang berasal dari buku *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, seperti yang sudah dikutip di atas. Wawasan Nusantara mencakup empat pokok perwujudan negara kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara kemudian dijadikan wawasan pembangunan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dari buku *Pendidikan Kewarganegaraan* (Kemristek Dikti. 2016) melansir beberapa pengertian wawasan nusantara sebagai berikut :

1. **Hasnan Habib**, wawasan nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan (hankam).
2. **Wan Usaman**, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
3. **MPR TAHUN 1998**, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. **Lembanga Ketahanan Nasional Tahun 1999**, wawasan nusantara adalah Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
5. **Ridhuan dan Wahid, 2017**, wawasan nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang bangsa, wilayah nasional dan dinamika internasional agar tetap terwujud persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air Indonesia.

Menurut Ridhuan (2017) wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang yang mengakui eksistensi dan legitimasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa keberadaan (eksistensi) bangsa dan NKRI merupakan hasil perjuangan panjang, bukan sebagai hadiah penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan sendiri oleh bangsa Indonesia atas nama “Soekarno-Hatta” sehingga secara legitimasi berdaulat dan bermartabat di atas wilayah nusantara sebagai wilayah NKRI. Atas dasar eksistensi dan legitimasi itulah maka bangsa dan negara manapun harus mengakui NKRI sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di atas tanah airnya sendiri, dengan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, yang patut dipahami dan diimplementasikan, baik oleh bangsa Indonesia sendiri, maupun oleh bangsa dan negara lain dalam memandang, menyikapi dan menghormati setiap kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Wawasan Kebangsaan

Secara historis, wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan (Belanda dan Jepang). Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik *divide et impera* pecah bela dan kuasa. Kendati

demikian, perlawanan para pahlawan telah membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam mengusir penjajah di wilayah nusantara. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional, disusul tahun 28 Oktober 1928 Para Pemuda mengumandangkan ikrar Sumpah Pemuda; bertanah air satu, berbangsa satu dan bahasa Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan embrio keberadaan wawasan kebangsaan Indonesia.

Dalam *desk* pemantapan wawasan kebangsaan Kementerian Polhukam Republik Indonesia, yang dipublikasikan dalam Forum Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an di Jakarta tanggal 28 April 2016, mendefinisikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasannya adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia, sehingga akan berguna untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, demi mencapai masyarakat yang aman, adil makmur sejahtera.

Secara etimologi wawasan kebangsaan, berasal dari dua suku kata yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan berarti (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan dapat pula berarti (2) konsepsi cara pandang. Sedangkan kebangsaan berasal dari kata bangsa, yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti (1) ciri-ciri yang memadai golongan bangsa, (2) perihal bangsa, mengenai (yang berlainan dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Jadi wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, mendefinisikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi serta persatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan dan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.

Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin

keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia, bersumber dari perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia, yang secara tegas menolak adanya diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial.

Berbagai Persoalan Faktual Perihal Wawasan Kebangsaan

1. Memudarnya nilai-nilai budaya, solidaritas dalam toleransi beragama, gotong royong dan rasa cinta tanah air.
2. Implementasi karakter bangsa dan bela negara belum optimal.
3. Para pemimpin kurang bisa memberi keteladanan yang menjadi panutan rakyat.
4. Rendahnya budaya taat hukum.
5. Masyarakat lebih mudah menyerap budaya luar yang negatif, dari pada melestarikan kebudayaan lokal.
6. Nilai-nilai Pancasila cenderung terabaikan, sehingga tidak terimplementasi sesuai kaidah-kaidah kebangsaan.
7. Kearifan lokal mulai dirong-rong paham negatif radikalisme dan ekstremisme yang berasal dari luar negeri.
8. Lemahnya komunikasi, koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga pemerintah dalam pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan.

Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara dan di atas udara secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan sebagai pertahanan keamanan.

Wawasan kebangsaan sebagai konsep politik dan kenegaraan merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Secara konseptual geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan nusantara dan politik luar negeri secara bebas aktif. Sedangkan berdasarkan geostrategis, Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumpu pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Landasan Wawasan Kebangsaan adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Wawasan kebangsaan memiliki tiga unsur dasar, yaitu :

1. Wadah (*contour*), wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud super struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik
2. Isi (*content*) adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional
3. Tata laku (*conduct*) adalah hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan, yang terdiri dari :
 - Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
 - Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional

Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nusantara /nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Asas wawasan kebangsaan adalah kepentingan atau tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerja sama dan kesetiaan terhadap kesepakatan.

Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, memiliki beberapa makna antara lain :

1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika diperlukan.
3. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik.
4. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.
5. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain.

Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu :

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu.
3. Cinta tanah air dan bangsa.
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
5. Kesetiakawanan sosial.
6. Masyarakat adil dan makmur.

Rasa, Paham dan Semangat Kebangsaan

Rasa Kebangsaan, merupakan refleksi dari rasa memiliki (*sense of belonging*) dan merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa tidak akan pernah kuat atau besar, manakala secara individu maupun kolektif tidak merasa memiliki bangsanya. Rasa kebangsaan adalah suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Paham Kebangsaan, merupakan pemahaman tentang keberadaan jati diri seseorang atau sekelompok orang sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan eksternal. Pemahaman ini mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga mendorong setiap warga negara sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Paham kebangsaan dilandasi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang pada akhirnya bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

Semangat Kebangsaan, adalah perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Kondisi semangat kebangsaan atau nasionalisme suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman.

Wawasan Kebangsaan Indonesia

Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah wawasan nusantara yang lazim disebut wawasan nasional. Perbedaan wawasan nusantara dan wawasan nasional adalah sebagai berikut. Wawasan nusantara lebih bermakna khas bagi Indonesia sebagai negara berdaulat dari Sabang hingga Merauke, disebut Nusantara. Sedangkan wawasan kebangsaan lebih bercirikan universal, dimana setiap bangsa di dunia membutuhkannya

sebagai landasan psikologis demi eksistensinya di tengah kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia (Lemhanas. 1999 : 7).

Sejak awal wawasan kebangsaan, yang kemudian dikonkritkan menjadi wawasan nusantara, telah memuat ajaran maupun konsepsi dasar yang menghendaki persatuan dan kesatuan segenap komponen bangsa. Hal ini sangat disadari oleh pendiri bangsa ini, berdasarkan pengalaman sejarah maupun kondisi objektif bangsa dan wilayah negara. Betapa kuatnya kemampuan dan kemauan masyarakat di daerah yang saling berpenjar, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan bersama secara nasional. Begitu pula apabila pengembangan potensi nasional melahirkan ketidak seimbangan dan ketidak meratakan kesejahteraan rakyat, akan berakibat kecemburuan sebagian masyarakat terhadap masyarakat lain yang sebangsa.

Faktor-faktor alamiah maupun sosial yang menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia adalah suatu karunia Ilahi yang tak ternilai besar dan manfaatnya. Dengan mempersatukan segenap potensi nasional, bangsa Indonesia akan tetap lestari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelaslah bahwa ajaran maupun konsepsi dasar wawasan nusantara yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen akan mampu menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia sepanjang masa. Wawasan nusantara mencakup kepentingan nasional, guna menjamin pengembangan hidup bangsanya. Oleh sebab itu wawasan nusantara tidak hanya dimengerti tetapi harus menjadi kesadaran dan penghayatan setiap warga negara Indonesia.

Sebagai bentuk wujud kepentingan nasional, wawasan nusantara dapat merupakan suatu gejala sosial yang bergerak/bekerja dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia atau dengan perkataan lain menyelenggarakan dan menjamin kepentingan nasional (Lemhanas. 1995 : 15). Guna mencapai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu :

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wawasan nasional adalah cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungan dalam eksistensi yang serba terhubung dan pengembangannya ditengah-tengah bangsa lain berdasarkan falsafah nasionalnya (Lemhanas. 1997:3). Dengan demikian, wawasan kebangsaan Indonesia atau wawasan nasional harus mencerminkan cara pandang dalam menentukan tindakan untuk kepentingan nasional. Oleh sebab itu, secara nasional maka wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang menyeluruh untuk menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh rakyat dan negaranya. Cara pandang atau wawasan yang demikian adalah cara pandang nasional Indonesia, yaitu wawasan

nusantara yang merupakan cerminan Pancasila. Tentang wawasan nusantara secara lebih detail akan disajikan pada bagian berikut ini.

C. Konsepsi Wawasan Nusantara

Sebagai cara pandang bangsa Indonesia, wawasan nusantara mempunyai konsepsi yang sangat utuh untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara dipandang sebagai suatu metode yang tepat dalam menyatukan atau mengintegrasikan wilayah, bangsa dan negara Indonesia. Sehingga wawasan nusantara mampu menciptakan pandangan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan kepulauan nusantara.

Implementasi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional digunakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun bangsa dan negara, yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, dalam satu kesatuan wilayah nusantara. Wawasan nusantara memberikan pedoman pada pencapaian tujuan nasional yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaannya harus memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mengimplementasikan integrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsayang tersebar di wilayah nusantara. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat holistik, beraneka ragam suku yang memiliki aneka ragam kebiasaan, kebudayaan, agama sampai bentuk fisik. Namun dengan adanya wawasan nusantara, keragaman tersebut menjadi kekayaan dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan nusantara. Satu kesatuan atau integrasi tercermin pada perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dengan demikian, maka implementasinya terhadap segala aspek kehidupan harus menjadi pemersatu atau pengintegrasi bukan sebaliknya yang dapat memecah belah bangsa dan Negara Kesatuan Indonesia. Dalam kondisi apapun termasuk hadirnya ancaman globalisasi dunia, paham-paham radikal, teroris, narkoba, dunia maya yang setiap saat mengancam keutuhan bangsa Indonesia, namun patokan dasar harus tetap solid dalam satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Pandangan ini sangat penting untuk dapat menangkal tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan dalam rangka melaksanakan pembangunan bangsa. Baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan pembangunan nasional.

1. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam pemerintahan yang kuat, bersih, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan menyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan menuju kepentingan nasional.

2. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Disamping itu implementasi wawasan nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa kenyataan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

- b. Bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- c. Bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku bangsa, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosial. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asal tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikanya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa keseluruhannya, dengan tidak menolak budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

4. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara
- b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, wawasan nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Bahwa pembangunan nasional

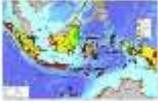
hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri
- Rawlins E.A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

MODUL 7

WILAYAH GEOGRAFI-TERITORIAL, GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI NKRI



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang wilayah geografi-teritorial, geopolitik dan geostrategi Indonesia untuk membentuk sikap-perilaku cinta tanah air dan bertekad mampu untuk melaksanakan kewajiban bela negara sepanjang hayat.

Pengantar

Eksistensi geografi Indonesia sebagai wilayah territorial Indonesia, terdiri dari wilayah perairan (laut), darat dan dirgantara. Wilayah perairan dipandang sangat penting karena sebagai penghubung antara pulau di wilayah nusantara. Pada pembahasan berikut akan diutarakan secara detail mengenai wilayah territorial perairan (laut) secara historis dan yuridis formal.

Wilayah daratan terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh perairan laut, lazim disebut dengan negara kepulauan (*archipelago*), sedangkan wilayah dirgantara meliputi wilayah udara dan pengaturan tentang *Geo Stasionere Orbit* (GSO). Di bagian akhir dibahas mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia, sehingga memberikan kelengkapan pengetahuan tentang wilayah geografi-teritorial, geopolitik dan geostrategi.

Wilayah Geografi

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*), bukan negara pulau (*island state*). Negara kepulauan artinya negara yang terdiri gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh air laut sebagai pemersatunya. Sedangkan negara pulau adalah negara yang hanya dikelilingi oleh air laut dan bukan sebagai penghubung melainkan sebagai pemisah antar pulau satu dengan pulau lainnya.

Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia memiliki sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada. Luas wilayah Indonesia 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut territorial dan laut nusantara. Keatas (udara) berdaulat setinggi 36.000 km

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN :
MAHASISWA DAPAT MENGIMPLEMENTASIKAN PENGETAHUAN WAWASAN NUSANTARA YANG
DIWUJUDKAN PADA SIKAP DAN PERILAKU DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SEBAGAI WARGA
NEGARA YANG BAIK

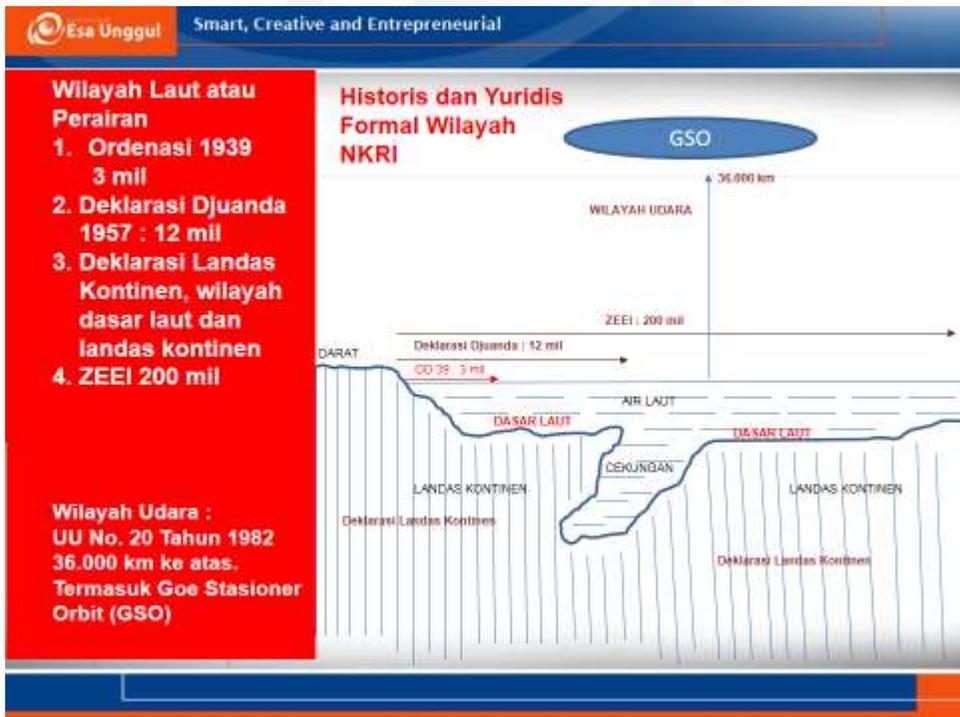


Dari luas wilayah darat dan laut secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa luas wilayah laut lebih luas, sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari pada wilayah daratan. Sedangkan wilayah udara, Indonesia berdaulat setinggi 36.000 km. Inilah wilayah Indonesia secara utuh yang wajib diketahui dan dipahami agar, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, mampu dalam menjaga dan memberdayakannya seoptimal mungkin demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

D. Historis dan Yuridis Formal

Sebelum menelaah lebih dalam tentang historis dan yuridis formal wilayah kedaulatan Indonesia, maka di bawah ini ditampilkan ilustrasi tentang wilayah Indonesia sebagai berikut :

1. Menurut ordenansi 1939, panjang wilayah laut Indonesia 3 mil di ukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sebagaimana diketahui bahwa 1 mil ekuivalen dengan 1,609 km, sehingga kalau 3 mil berarti panjang wilayah perairan dari pangkal pantai 4,827 km. Panjang Selat Sunda 30 km, bila ditarik dari Merak Pulau Jawa ke arah laut lepas 4,827 km dan dari Bakauheni Pulau Sumatra 4,827 km berarti di Selat Sunda ada laut bebas sepanjang 20,346 km atau sekitar 12,645 mil. Ordenasi ini dibuat oleh Belanda, sengaja untuk melancarkan politik pecah belah dan kuasa (*divide et impera*), ini tidak cocok dengan konsep negara kepulauan.



2. Deklarasi Djuanda 1957, melegitimasi luar wilayah laut Indonesia sepanjang 12 mil di ukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sehingga tidak terdapat lagi laut bebas di dalam wilayah Indonesia, terutama selat yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya.
3. Deklarasi Landas kontinen tahun 1969, wilayah yang berada di dasar laut dan di bawah dasar laut di dalam landas kontinen merupakan milik Indonesia, termasuk *depresie* atau cekungannya.
4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dikukuhkan dengan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983.
5. Wilayah udara setinggi 36.000 km, dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit* (GSO) berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial.

Sebagai perwujudan kepulauan nusantara dalam dimensi satu kesatuan wilayah, wawasan nusantara memiliki latar belakang hitoris, sosilogis dan politis.

1. Latar Belakang Historis

Keberadaan wilayah nusantara, Indonesia sampai sekarang yang terdiri dari wilayah daratan, perairan (laut) dan udara (dirgantara) tidak dengan sendirinya ada, tetapi melalui proses perjuangan yang sangat panjang hingga memiliki wilayah yang terintegrasi, utuh dan menyeluruh. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan negara Indonesia, mempunyai sejarah (*historis*) dan yuridis formal tentang eksistensi wilayah daratan, wilayah perairan atau laut dan wilayah udara, serta kondisi geografi, geopolitik dan geostrategis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

WILAYAH DARAT

Pada awalnya penjajah Belanda memberikan wilayah teritorial perairan Indonesia yang tertuang dalam hukum kolonial, yang disebut sebagai ***Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie*** 1939 atau lebih dikenal dengan istilah Ordinasi 1939, dimana lebar wilayah laut (perairan) Indonesia 3 mil di ukur dari garis pangkal lurus. Keberadaan Ordinasi 1939 ini sengaja diberikan dengan tujuan untuk memecah belah wilayah nusantara, agar tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Melihat kondisi wilayah nusantara, yang tidak lain adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpecah belah seperti itu, maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuatan hukum dan legitimasi keberadaan wilayah nusantara yang utuh. Langkah-langkah itu, tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :



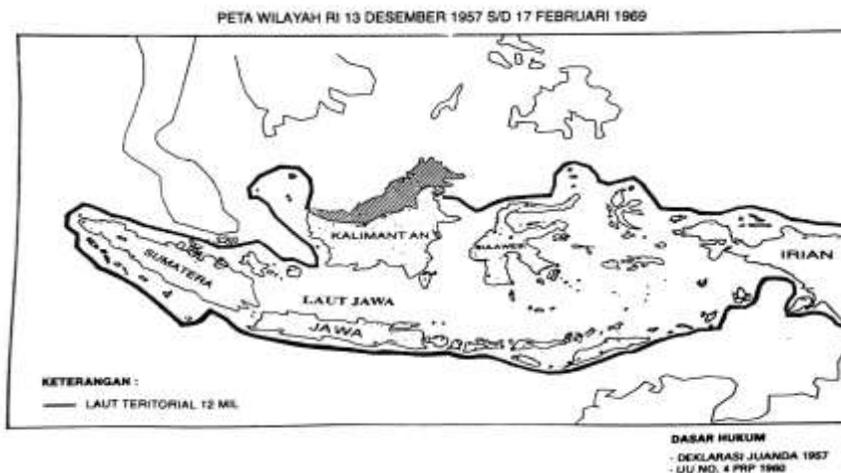
a. Deklarasi Djuanda

Menurut Lemhanas (1995 : 27-28), dengan menggunakan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state concept*), maka tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan “**Deklarasi Djuanda**” yang menyatakan :

1. Bentuk negara geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Menurut sejarah, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.
3. Batas laut teritorial yang termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939. Memecah belah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Isi *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939 yang memecah belah wilayah darat Indonesia, karena lebar wilayah laut atau perairan Indonesia 3 mil diukur dari garis pangkal lurus, sehingga dapat dipastikan antara pulau Sumatra dan pulau Jawa, pulau Jawa dan pulau Kalimantan, pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi, pulau Sulawesi dan pulau Papua (Irian Jaya) serta pulau-pulau kecil lainnya di dalam wilayah nusantara terpisah oleh laut bebas.

Untuk mempertegas dasar hukum Deklarasi Djuanda, dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 4 Tahun 1960 yang diikuti dengan Peraturan Pelaksanaan mengenai lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1962. Berdasarkan PERPU Nomor 4 tahun 1960 wilayah laut lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (*straight base line*), semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat, maka luas wilayah Indonesia menjadi 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dari sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara.



b. Deklarasi Landas Kontinen

Dalam rangka mengamankan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasional, maka pada tanggal 17 Februari 1969

pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Landas Kontinen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedenter yang terdapat **pada dasar laut dan tanah di bawahnya** di landas kontinen, merupakan milik Indonesia dan berada di wilayah yuridis yang eksklusif.
2. Termasuk *depressie-depressie* (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia melakukan perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
3. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (*median line*) yang ditarik dari garis pantai dari pada pulau-pulau Indonesia yang terluar.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari pada perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya.

Terhadap negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan, diadakan perundingan dengan semangat kebijaksanaan bertetangga baik (*good neighborhood policy*). Persetujuan batas kontinen dengan negara tetangga telah menguatkan pendirian bahwa negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen seluas lebih kurang 800.000 mil² (sekitar 2.072.000 km²). Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Landas kontinen dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Perjuangan untuk menegakkan wawasan nusantara bidang wilayah makin mantap. Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. ZEEI dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berfungsi sebagai zona perdagangan dan zona perikanan. Oleh sebab itu, negara manapun yang diketahui masuk dalam wilayah teritorial ZEEI tanpa ada izin pemerintah Indonesia, mencuri ikan (*illegal fishing*) dan mengambil kekayaan

sumber daya alam (SDA) Indonesia di laut dan di dasar laut harus ditindak sesuai dengan hukum laut yang berlaku. Dengan penetapan ZEEI, maka Indonesia mempunyai :

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non hayati serta hak berdaulat lainnya eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga air, arus dan angin.
2. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 - a. Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan pembangunan lainnya.
 - b. Penelitian ilmiah mengenai laut
 - c. Pelestarian lingkungan laut
 - d. Hak lain berdasarkan hukum internasional.

Luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lebih kurang 1.577.300 mil persegi. Secara teoritis dan menurut hukum laut internasional, ditemukan dua konsepsi pokok mengenai wilayah laut, sebagai berikut:

- a. *Res nullius*, menyatakan bahwa laut tidak ada yang mempunyainya, karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
- b. *Res communis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.



WILAYAH UDARA (DIRGANTARA)

Kedaulatan wilayah dirgantara atau wilayah yang berada di atas wilayah darat dan perairan (laut) menganut beberapa teori, namun sebelum menjelaskan secara detail tentang teori kedaulatan di wilayah dirgantara. Terlebih dahulu penulis mencantumkan penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang “Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.” Dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit* (GSO) berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, baik untuk bidang perekonomian maupun bidang pertahanan dan keamanan.

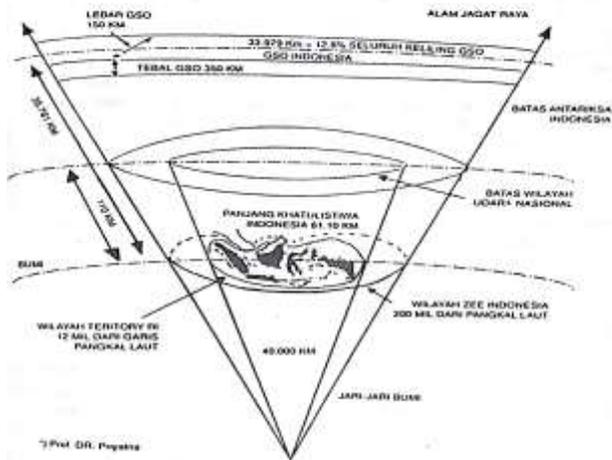
Dari buku “Kewiraan Untuk Mahasiswa” (Lemhanas. 1995 : 34-35), terdapat dua teori mengenai wilayah udara, yaitu teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*) dan teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*).

Teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*)

Teori Udara Bebas terbagi menjadi dua aliran, yaitu :

- a. Kebebasan ruang udara tanpa batas. Ruang Udara itu bebas, dapat dipergunakan oleh siapa pun juga. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.
- b. Kebebasan udara terbatas, yang selanjutnya dibagi menjadi dua sebagai berikut :
 - 1) Negara kolong (negara bawah, *subadjacent state*) berhak mengambil tindakan tentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. Ketentuan ini diambil pada sidang *Institute de Droit International* pada sidang di Genta (1906), Verona (1910) dan Madrid (1911). Ditentukan bahwa waktu damai, hubungan udara internasional adalah bebas kecuali adanya hak negara bawah untuk mengambil tindakan tertentu demi keamanan dan keselamatannya. Sedangkan waktu perang, pertempuran udara hanya diperkenankan bila kehancuran akibat perang udara terhadap barang dan orang tidak lebih besar dari pada perang di wilayah darat dan di laut.
 - 2) Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona teritorial tertentu.

GAMBAR GSO INDONESIA DAN BATAS DIRGANTARA NASIONAL*)



Teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*)

Dari konvensi Paris (1919) dan kemudian diganti dengan konvensi Chicago (1944) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya (*Every state has complete and exclusive sovereignty in airspace above its territory*). Beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalah

a. Teori Keamanan

Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Fauchille di tahun 1901, menyatakan ketinggian 1.500 m, kemudian tahun 1910 diturunkan menjadi 500 m.

b. Teori Penguasaan Cooper (*Cooper's Control Theory*)

Pada tahun 1951 Cooper menyampaikan teorinya bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.

c. Teori Udara (*Schachter*)

Wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian dimana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara (*is sufficiently dense support balloon and airplanes*). Pada saat ini ketinggian tersebut berada 30 mil dari

permukaan bumi. Cara menarik garis batas ruang udara secara vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- 1) Menarik garis dari “pusat bumi” ke atas wilayah negara ke angkasa yang mengakibatkan bahwa wilayah udara lebih luas dari pada wilayah darat dan laut (seperti kerucut).
- 2) Menarik garis tegak lurus dari perbatasan wilayah negara ke angkasa yang berarti ada kantong-kantong udara bebas mengingat bentuk bumi yang bulat.

Negara Dalam Posisi Silang

Letak negara Indonesia, berada dalam posisi silang. Maksudnya bahwa wilayah nusantara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh perairan, berada diantara dua samudera dan dua benua. Diantara benua Asia dan benua Australia, serta diantara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

Dengan kondisi silang ini, pada satu sisi dapat menjadikan negara Indonesia dalam posisi yang strategis dan menguntungkan. Sebaliknya pada sisi lain akan menjadikan negara Indonesia dalam posisi yang cukup rawan. Sebagai Negara yang berada dalam posisi strategis, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam bidang ekonomi : perdagangan, bisnis, kerja sama, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya potensial menjadi produktif, baik diperaian maupun di wilayah darat yang secara langsung dapat menambah devisa negara.

Dalam konteks kerwanan, sebetulnya merupakan tantangan bagi negara Indonesia untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan menangkal terhadap segala bentuk kejahatan trans internasional, kejahatan-kejahatan yang secara langsung dapat masuk melalui wilayah perairan sebagai zona atau tempat transksional kejahatan. Sebagai contoh dengan luasnya wilayah perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terbentang wilayah perairan, laut dan selat merupakan jalur strategis bagi penyelundupan, peredaran gelap narkotika dan pencurian-pencurian di wilayah perairan.

Kerawan lain, dengan posisi silang. Negara Indonesia akan dengan mudah menjadi incaran dari negara-negara barat dan timur jauh dalam melancarkan “serangan” perang *proxy*. Suatu perang dengan spektrum yang sangat luas. Diketahui bahwa perang ini berkeja bisa menghancurkan keyakinan terhadap ideolog bangsa, Pancasila. sebab masuknya paham liberalis, komunis dan radikal dapat dengan mudah menyebar keseluruh wilayah Indonesia. Dan ancaman-ancaman tersebut sudah menjadi sangat nyata terlihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya bisa terjadi runtuhnya kekuatan

ekonomi nasional sebagai akibat permodalan dikuasai oleh kelompok tertentu sebagai konglomerasi penguasa modal. Dalam bidang sosial budaya, terjadi hegemoni budaya oleh sekelompok negara yang kuat serta bergesernya sistem sosial dan norma lokal kepada kelompok hegemoni tersebut.

Dengan demikian, posisi silang dapat membawa manfaat besar pada satu sisi, yaitu apabila bangsa Indonesia dapat dengan segera memberdayakan potensi-potensi sumber-sumber menjadi produktif dan dapat menjadi subjek dari segala bentuk aktivitas transnasional. Namun pada sisi lain akan dapat terkena dampak negatif, apabila bangsa Indonesia menjadi objek bagi kepentingan negara-negara lain untuk memanfaatkan posisi silang sebagai media dan infrastruktur dalam mengeruk keuntungan.

Hubungan Wawasan Nusantara dengan Bela Negara

Tujuan mempelajari Wawasan Nusantara adalah memahami bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat dalam lingkup satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Baik secara fisik-geografis dan etnis yang mendiaminya maupun non fisik yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara. Beberapa wujud dari pengejawantahan bela negara antara lain adalah cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dengan memahami kondisi objektif NKRI secara utuh dan menyeluruh, diharapkan timbul rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Cinta biasanya diawali dengan mengetahui melihat dan secara nyata terhadap yang dicintai. Lalu dilanjutkan dengan memahami dan menerima apa adanya tanpa kritik maupun mendiskreditkan objek yang dicintai. Bila cinta sudah bersemi di hati, maka pasti akan setia dan selalu memperhatikan serta menjaganya dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat berakibat dari lepasnya objek yang dicintai dari dirinya. Jadi disadari atau tidak bahwa konsekuensi logis dari mencintai sesuatu pasti ada pengorbanan dalam rangka membela yang dicintai.

Cinta kepada pancar, cinta kepada anak, istri/suami, keluarga dan cinta kepada apa saja sudah dapat dipastikan selalu aktif memperhatikan, memenuhi kebutuhan, merawat dan menjaga perasaan cinta kepada yang dicintai. Adalah tidak masuk akal, bila seseorang rela "menjual" apa yang dicintainya apa lagi membiarkan yang dicintainya disakiti, diganggu dan pada akhirnya diambil orang. Apa mungkin? Tentu tidak. Pasti akan mempertahankannya mati-matian sampai tetes darah penghabisan. Maka wajar bila bangsa Indonesia mencintai Tanah Air Indonesia dan seluruh yang berada di dalam wilayah nusantara (Negara Kesatuan Indonesia). Mencintai tanah air berarti rela berkorban demi membela negara. Contoh kalau orang Amerika pasti mereka akan membela negara Amerika. Orang Inggris pasti membela negara Inggris,

orang Australia pasti membela negara Australia. Orang Jepang pasti membela negara Jepang. Orang China pasti membela negara China. Jadi kalau orang Indonesia sudah menjadi kewajiban membela negara Indonesia. Jika tidak mau membela negara Indonesia, sebaiknya pergi dan keluar saja dari NKRI ke negara lain yang dia cintai! Namun dapat dipastikan bahwa ketika yang bersangkutan menjadi warga negara dimana ia berada, maka wajib baginya untuk membela negara dimana ia berada.

Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi warga negara selain wajib membela negara. Dengan mencintai tanah air NKRI, maka akan timbul rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki tanah air sebagai tempat dimana berada, memiliki suku-suku bangsa (etnis) sebagai saudara dan kerabatnya dan memiliki kebudayaan sebagai hasil daya cipta dan karsa mereka dalam mengisi hidup dan kehidupannya. Tanah air, etnis dan kebudayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tanah Air

Meliputi wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan air (laut) sebagai penghubungnya. Oleh karena itu, meskipun berupa pulau-pulau yang terserak namun tetap terintegrasi bukan terpecah belah. Terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan menyeluruh.

Itulah negara Indonesia, sebuah negara kepulauan yang diproklamasikan oleh Indonesia Soekarno-Hatta putra-putra terbaik bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di planet bumi ini.

Dalam konteks ini, maka cinta tanah air harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh bangsa Indonesia, berada dalam satu wilayah kedaulatan, dapat hidup berdampingan secara damai, aman, tentram dan sejahterah. Wawasan Nusantara memberikan rasa cinta tanah air, karena dengan memahami wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia berarti memberikan garansi atau jaminan bahwa setiap warga negara menjunjung tinggi kepentingan negara dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kempompok.

2. Etnis

Bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa (*plural*), baik yang merupakan etnis asli pribumi maupun etnis pendatang. Menurut sensus BPS tahun 2010 terdapat sebanyak 1.340 suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara ini, yang merupakan suku bangsa asli maupun percampuran berbagai suku bangsa pendatang. Beberapa contoh suku bangsa asli diantaranya Jawa, Sunda, Badui, Banten, Betawi, Aceh, Batak, Minang, Palembang, Madura, Dayak, Ambon, Sulawesi, Asmat, dan dari setiap suku bangsa tersebut masih

memiliki sub suku bangsa. Misalkan suku bangsa Palembang terdiri dari suku bangsa Lintang, Pasemah, Lematang, Kikim, Ogan, Kemering, dan lain sebagainya. Contoh suku bangsa percampuran, antara lain etnis Tionghoa, Arab, Eropa dan lain sebagainya.

Aneka ragam suku bangsa adalah anugra terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa Indonesia. Karena walaupun berbeda-beda namun tetapi satu, dalam pengertian bahwa persatuan dari seluruh etnis dapat memperkuat kesatuan bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Namun bila perbedaan ini menjadi sensitif dan cenderung diskriminatif akan menjadi beban nasional, maka akan menimbulkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memahami cara padangan bangsa Indonesia wawasan nusantara, akan timbul persatuan etnis dalam ikatan kekeluargaan dan psikologis yang kuat. Perbedaan perilaku, ketidakan samaan norma-norma lokal, bukan jadi penghalang bagi persatuan. Tetapi justru memperkaya budaya bangsa dan neagara Indonesia.

3. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di wilayah nusantara disebut kebudayaan nasional. Menurut Tap MPR Nomor 2 tahun 1998, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Sebagai wujud kebudayaan, misalkan di daerah ada rumah adat, tari-tarian, upacara adat, musik tradisional, wayang, pakaian adat, dan lain sebagainya.

Dapat ditarik benang merah sebagai simpulan keberadaan hubungan wawasan nusantara dengan bela negara, adalah sebagai berikut: bahwa dengan mengetahui dan memahami wawasan nusantara, akan menimbulkan rasa cinta tanah air dan memiliki kesadaran berbangsa-bernegara. Juga terdapat hubungan psikologis yang mendalam sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dimana bangsa Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah nusantara yang utuh. Bangsa Indonesia sendiri berasal dari etnis atau suku bangsa yang beraneka ragam yang mendiami wilayah nusantara, kemudian secara alamiah membentuk dan memiliki kebudayaan masing-masing etnis yang pada akhirnya terintegrasi dalam kebudayaan nasional Indonesia.

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

Geopotitik

Geographical Politic atau disingkat Geopolitik semula bersinonim Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) suatu cabang ilmu bumi yang dikembangkan oleh Frederich Ratzel (1844-1904). Istilah Geopolitik

kemudian berubah artinya setelah dipopulerkan oleh Karl Haushofer (1869-1946) dimana geopolitik menjurus kepada ekspansionisme dan rasialisme. Secara detail teori Karl Haushofer dan teori-teori lain tentang geopolitik, akan disajikan berikut ini :

1. Ajaran Karl Haushofer

Berkembang di Jerman, ajaran Karl Haushofer dipengaruhi oleh pemikiran yang dituangkan dalam disertasinya “Perang adalah bapak dari segala hal” atau dengan perkataan lain “perang merupakan hal yang diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara”. Ajaran ini mempengaruhi Adolf Hitler dalam menjalankan pemerintahan Nazi di Jerman, juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran *Hako Ichiu* yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Menurut Lemhanas (1997 : 9) Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen, sebagai berikut :

- a. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai laut.
- b. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- c. Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah:
 - 1) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan kepada soal-soal strategi perbatasan.
 - 2) Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
 - 3) Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidupnya.

2. Ajaran Frederich Ratzel

Hasil penelitian Frederich Ratzel tentang Ilmu Bumi Politik menemukan dua sudut pandang kekuatan, yaitu kekuatan darat dan kekuatan laut. Frederich Ratzel melihat adanya persaingan antara kedua kekuatan itu, sehingga ia mengemukakan pemikiran baru dengan meletakkan dasar-dasar superstruktur geopolitik yaitu suatu kekuatan total atau menyeluruh suatu negara mewadahi pertumbuhannya dihadapkan pada kondisi dan kedudukan geografi di sekitarnya.

Dalam bukunya *Anthropo Geography* dan *Politische Geography* menyatakan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) mencukupi agar dapat tumbuh dengan subur. Menurut Lemhanas (1997 : 7) pokok-pokok ajaran Frederich Ratzel dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan negara dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, susut dan mati.
- b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).
- c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
- d. Membenarkan/melegitimasi hukum ekspansi, yaitu :
 - 1) Bahwa perkembangan atau dinamika budaya/kebudayaan dalam bentuk-bentuk gagasan, kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi dengan pemekaran wilayah.
 - 2) Batas-batas suatu negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, maka dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara. Baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

3. Ajaran Rudolf Kjellen

Pendapat Frederich Ratzel menarik perhatian Rudolf Kjellen. Beliau mengatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Esensi ajaran Rudolf Kjellen adalah sebagai berikut:

- a. Negara sebagai satuan biologis, suatu organisme hidup yang juga memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuan negara hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
- b. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, social politik, kartopolitik (politik memerintah).
- c. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional, yaitu:
 - 1) Ke dalam - mencapai peraturan dan kesatuan yang harmonis.
 - 2) Ke luar - memperoleh batas-batas negara yang lebih baik.
 - 3) Kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut.

4. Ajaran Sir Halford Mackinder

Ahli geografi Inggris menyatakan bahwa kekuatan darat ada kemungkinan akan menguasai kekuatan maritim. Barang siapa dapat menguasai **daerah jantung** yaitu Eurasia (Eropa dan Asia)

akan dapat menguasai pulau dunia yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Selanjutnya barang siapa dapat menguasai pulau dunia akan dapat menguasai dunia.

5. Ajaran Alfred Thayer Mahan dan Sir Walter Raleigh

Hipotesa yang dikembangkan oleh Alfred Thayer Mahan (1840-1914) adalah bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran dan keamanan nasional. Ada enam faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu negara sebagai kekuatan laut, yaitu: letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Teori Alfred Thayer Mahan ini tergolong dalam teori wawasan bahari, memperkuat teori yang dikembangkan oleh Sir Walter Raleigh (1554-1618), yang menyatakan bahwa: "Siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia."

6. Ajaran Guilio Douhet dan William "Billy Mitchell"

Setelah perang dunia I, Guilio Douhet menulis buku *Dominio dell'Aria, Saggio Sull'arte della Geura Aerea (The Command or Air: Essy in the Art or Aerial Warfare)* terbit tahun 1921. Kemudian William "Billy Mitchell" menulis buku *Winged Defence* terbit pada tahu 1925, keduanya mengurai tentang teori dirgantara, menyatakan bahwa kekuatan udara akan menjadi kekuatan yang paling menentukan. Dengan pemikiran bahwa kekuatan udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman yang dapat diandalkan dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

7. Ajaran Nicholas J Spykman

Terkenal dengan teori daerah batas (*rimland theory*) merupakan teori kombinasi yang menghubungkan wawasan benua, wawasan bahari dan wawasan dirgantara. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengoptimalkan geopolitik mana saja diantara tiga wawasan itu harus ditonjolkan. Dengan kata lain, ketika medan perang pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan, situasi dan kondisi yang berkembang.

8. Ajaran Bangsa Indonesia

Geopolitik di Indonesia tidak digunakan untuk keperluan perang, adu kekuatan dan merebut kekuasaan negara. Indonesia mempunyai Ideologi Pancasila, sehingga teori dan praktek geopolitik harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Lemhanas (1997 : 11) Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mempunyai paham tertentu tentang perang dan damai. Ajaran geopolitik yang dikembangkan oleh para ahli tersebut di

atas tidak dapat sepenuhnya diterima dan diterapkan dalam ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena Teori geopolitik yang dikembangkan mengandung benih konflik, persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi Pancasila dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah geografi Indonesia.

Bangsa Indonesia ingin dapat menjamin kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah dinamika forum dunia sekitarnya. Bagi bangsa Indonesia kepentingan nasional yang paling mendasar adalah persatuan dan kesatuan nasional, identitas (jati diri) bangsa kelangsungan hidup bangsa dan negara (*survival*).

Geostrategi

Geostrategi berasal dari kata *geo* artinya bumi yang mencakup segala unsur dan organisme yang terkandung di dalamnya. Sedangkan strategi, dalam bahasa Yunani diartikan sebagai *the art of the general*, adalah seni yang digunakan untuk berperang. Namun pada abad modern strategi tidak semata-mata hanya digunakan dalam kaitan militer, tetapi berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akan semakin mempengaruhi penetapan suatu strategi.

Dalam kaitan dengan geostrategi, strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam rangkaian mengembangkan dan menggunakan segala unsur dan organisme yang ada di bumi guna mencapai tujuan. Geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan dari geopolitik yang sudah diadaptasi dengan kondisi objektif Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan geopolitik Indonesia perlu ada strategi harus memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimulai dari penyusunan perencanaan yang luwes, dinamis dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai pada kemampuan untuk melaksanakannya agar mencapai hasil yang optimal.

Menurut Lemhanas (1997 : 11) geostrategi merupakan perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Sebagai contoh bangsa Indonesia dalam menentukan strategi nasionalnya untuk memenuhi tujuan politik nasional, memperhatikan kondisi geografi Indonesia berupa kepulauan dan posisinya diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Indonesia dan Pasifik. Demikian juga memperhatikan kondisi sosial, sumber alam, penduduk, maupun lingkungan sekitarnya baik regional maupun global. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, bangsa Indonesia

diharapkan mampu membina dan memanfaatkannya serta menjamin tercapainya tujuan nasional.

Geostrategi Indonesia haruslah dikaitkan dengan keberadaan posisi Indonesia di dunia internasional. Indonesia berada dalam posisi silang. Kalaupun secara fisik-geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara samudera Indonesia dan Pasifik, maka secara non fisik menurut Lemhanas (1995 : 26) eksistensi Indonesia berada pada posisi, antara lain :

1. Demografis antara daerah yang berpenduduk tipis di Selatan (Australia) dan daerah yang berpenduduk padat di Utara (RRC dan Jepang).
2. Ideologis, antara liberalisme di Selatan dan komunisme di Utara.
3. Politis, antara sistem demokrasi parlementer di Selatan dan sistem diktator proletariat di Utara (Asia daratan bagian Utara).
4. Ekonomi, antara sistem ekonomi liberal (kapitalis di Selatan dan sistem ekonomi terpusat di Utara).
5. Sosial, antara individualisme di Selatan dan komunisme/ sosialisme di Utara (*komune-komune*).
6. Budaya, antara kebudayaan barat di Selatan dan kebudayaan timur di Utara.
7. Hankam, antara sistem pertahanan kontinental (kekuatan di darat) di Utara dan sistem pertahanan maritim di Barat, Selatan dan Timur.

Keberadaan posisi silang memberikan dua kemungkinan bagi negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, sebagai berikut :

1. Membiarkan diri terus-menerus menjadi objek dan lalu lintas kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh dari luar yang melintasi kedudukan Indonesia, dengan setiap kali menyandarkan dan menggantungkan diri pada kekuatan/pengaruh yang terbesar pada suatu waktu.
2. Ikut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh tersebut dalam arti ikut memainkan peranan sebagai subjek.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa secara geostrategis posisi Indonesia pada satu sisi sangat rawan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar. Pada sisi lain dengan posisi silang itu bermanfaat besar bagi bangsa dan negara Indonesia, sebab dapat dijadikan potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi negara makmur, maju

Daftar Pustaka

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri
- Rawlins E.A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.